PEMBANGUNAN
DAERAH DALAM ANGKA

Maluku
2020

Kementerian PPN/
Bappenas

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

(BAPPENAS)

KATA PENGANTAR

Buku Profil Pembangunan Daerah Dalam Angka (PDDA) 2020 merupakan salah satu materi publikasi yang disusun oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Deputi Bidang Pengembangan Regional. Penyusunan Buku PDDA ini ditujukan untuk memberikan gambaran kondisi dan perkembangan hasil pembangunan antardaerah dalam unit provinsi di wilayah Maluku.

Buku PDDA 2020 ini menyajikan data dan informasi kondisi terakhir dan perkembangannya dalam periode 5 tahun terakhir dari Indikator-indikator pembangunan sebagai berikut: (i) 5 (lima) Perkembangan Indikator Utama Pembangunan yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Rasio, (ii) Perkembangan Kependudukan dan Ketenagakerjaan, (iii) Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat (iv) Perkembangan Ekonomi Wilayah, (v) Perkembangan Infrastruktur Wilayah, (v) Pengembangan Wilayah, serta (vi) Informasi mengenai perkembangan penyebaran covid-19 dan dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat berdasarkan data dan informasi yang terkumpul hingga awal November 2020.

Uraian dari setiap pembahasan dalam publikasi ini lebih menekankan terhadap metode penyajian informasi yang mudah dipahami, sehingga pembaca akan dimudahkan dalam memahami gambaran capaian dari hasil pembangunan setiap provinsi, keberbandingannya antarprovinsi dalam lingkup wilayah pulau dan nasional, serta keberbandingan antar tahun. Gambaran tersebut tentunya menyesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi yang digunakan, yaitu data-data yang bersumber dari Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), dan publikasi dari kementerian dan lembaga terkait.

Kami mengucapkan terimakasih atas segala dukungan berbagai pihak dalam penyusunan publikasi ini. Kami sangat menghargai kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan publikasi di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2020

Deputi Bidang Pengembangan Regional

TIM PENYUSUN

PENGARAH:

Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D

Deputi Bidang Pengembangan Regional

PENANGGUNG JAWAB:

Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D

Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana

TIM PENYUSUN :

Ika Retna Wulandary, ST, M.Sc; Zulfakar, S.Kom, ME; Fidelia Silvana, SP. M.Int. Econ& F; Supriyadi, S.Si, MT; Moh. Agung Widodo, SP, MIDEC ; Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT; Nur Fitrianto Adi Suasono, S.Kom; Afini Mahabas, SKom, MPA; Asep Sukmayadi, ST, MT

TIM AHLI:

Setya Agung Riyadi; Eka Lesniawati;

TIM PENDUKUNG:

Anna Astuti; Eni Arni; Sapto Mulyono; Samsudin

Donny Yanuar; Toni Hernandi, Sri Wulandari;.

Komentar, saran dan kritik dapat disampaikan ke:

Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana
Deputi Bidang Pengembangan Regional
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jl. TamanSuropati No. 2 JakartaPusat 10310
Telp/Fax. (021) 3193 4195
e-mail : dit.pw@bappenas.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

TIM PENYUSUN ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR ix

LAMPIRAN

1. PERKEMBANGAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN 2

1.1. Pertumbuhan Ekonomi 2
1.2. Pengangguran Terbuka 4
1.3. Kemiskinan 8
1.4. Indeks Pembangunan Manusia 9
1.5. Gini Ratio 10

2. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN 13

2.1. Kependudukan 13
2.2. Ketenagakerjaan 14

3. PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT 20

3.1. Pendidikan 20
3.2. Kesehatan 24
3.3. Ekonomi Masyarakat 32

4. PERKEMBANGAN EKONOMI WILAYAH 36

4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 36
4.2. Investasi PMA dan PMDN 40
4.3. Ekspor dan Impor 42
4.4. Perbankan 45
4.5. Pembangunan Sektor Unggulan 47
4.6. Perkembangan Keuangan Daerah 58

5. PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 64
5.1. Jalan 64
5.2. Listrik 65

6. PENGEMBANGAN WILAYAH 68
6.1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Di Wilayah Maluku 68
6.2. Pembangunan Daerah Tertinggal 71

7. PERKEMBANGAN PENYEBARAN COVID-19 DAN DAMPAK TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT 76
7.1. Penyebaran COVID-19 76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2010 Provinsi Di Wilayah Maluku Tahun 2015-2020, (dalam persen)	3
Tabel 2.	Perkembangan jumlah Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pengangguran Terbuka Antarprovinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015-2020	5
Tabel 3.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Antarprovinsi Menurut Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Maluku Tahun 2015-2020	6
Tabel 4.	Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Maluku, Tahun 2020	6
Tabel 5.	Perkembangan Pengangguran terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di wilayah Maluku pada tahun 2015 dan tahun 2020	7
Tabel 6.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Antarprovinsi di Perdesaan dan Perkotaan Periode 2015-2020	8
Tabel 7.	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2020	9
Tabel 8.	Perkembangan IPM, Ranking dan Reduksi *Shortfall* Antarprovinsi Tahun 2015-2019	10
Tabel 9.	Perkembangan Gini Ratio Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2015 - 2020	11
Tabel 10.	Luas Wilayah dan Kependudukan Antarprovinsi Di Wilayah Maluku tahun 2019	13
Tabel 11.	Perkembangan Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan *Dependency Ratio* Antarprovinsi Di Wilayah Maluku	13
Tabel 12.	Perkembangan Angkatan Kerja Antarprovinsi Di Wilayah Maluku Periode 2015-2020	14
Tabel 13.	Penduduk Wilayah Maluku Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Perdesaan-Perkotaan Tahun 2015 dan 2020	16
Tabel 14.	Penduduk Wilayah Maluku Menurut Status Pekerjaan Utama dan Perdesaan-Perkotaan Tahun 2015 dan 2020	18
Tabel 15.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Antarprovinsi di wilayah Maluku tahun 2015 - 2019	20
Tabel 16.	Perkembangan Angka Partisipasi sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Antarprovinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015-2019	21
Tabel 17.	Rasio Murid-Guru, Murid-Rombel, Rombel-Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019 Di Wilayah Maluku	22
Tabel 18.	Kondisi Bangunan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan TA. 2018/2019 Di Wilayah Maluku	22
Tabel 19.	Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Komputer dan Internet Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Provinsi	23

Tabel 20.	Perkembangan Persentase Balita Menurut Status Gizi Dengan Indeks BB/U Di Wilayah Maluku Periode Tahun 2013 – 2018	25
Tabel 21.	Perkembangan Persentase Balita Menurut Status Gizi Dengan Indeks BB/U di Wilayah Maluku Periode Tahun 2013 – 2018	26
Tabel 22.	Perkembangan Persentase Balita Menurut Status Gizi Dengan Indeks BB/Tinggi Badan (TB) Di Wilayah Maluku Periode Tahun 2013 – 2018	27
Tabel 23.	Perkembangan Jumlah Kasus Tuberkulosis Antarprovinsi di Wilayah Maluku Periode 2015-2019	28
Tabel 24.	Perkembangan Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis atau *Case Notification Rate* (CNR) Antarprovinsi di Wilayah Maluku Periode 2015-2019	28
Tabel 25.	Perkembangan Kasus Baru HIV dan AIDS Tahun 2015 – 2019 di Wilayah Maluku	29
Tabel 26.	Jumlah Puskesmas dan Rasio dengan Kecamatan Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2019	30
Tabel 27.	Jumlah dan Persentase Puskesmas Rawat Inap dan Terakreditasi menurut Provinsi Tahun 2019	30
Tabel 28.	Jumlah Rumah Sakit dan Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk	31
Tabel 29.	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita sebulan Disesuaikan Antarprovinsi Tahun 2015-2019	33
Tabel 30.	Persentase Pengeluaran Perkapita sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan di Perdesaan/Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2019	34
Tabel 31.	Nilai PDRB ADHB dan ADHK Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015-2020, Triwulan II, (dalam triliun rupiah)	36
Tabel 32.	Peran Ekonomi Wilayah Maluku terhadap Perekonomian Nasional ADHB Tahun 2015-2020 Triwulan II, (dalam persen)	36
Tabel 33.	Peran Ekonomi Provinsi Terhadap Perekonomian Wilayah Maluku ADHB Tahun 2015-2020 Triwulan II, (dalam persen)	36
Tabel 34.	Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK (2010) menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2016-2019, (persen)	38
Tabel 35.	Perkembangan PDRB Perkapita ADHB menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015-2019, (Rp. ribu/jiwa)	38
Tabel 36.	Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Wilayah Maluku Tahun 2015-2020 Triwulan I, (persen)	38
Tabel 37.	Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Wilayah Maluku Tahun 2015-2020 Triwulan I, (persen)	39
Tabel 38.	Pertumbuhan PDRB Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Provinsi Di Wilayah Maluku Tahun 2015-2020 Triwulan I, (rata-rata persen)	39
Tabel 39	Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Wilayah Maluku	39
Tabel 40.	Share PDRB menurut Pengeluaran ADHB (Tahun 2010) Wilayah Maluku Tahun 2015-2020 Triwulan I, (persen)	40

Tabel 41.	Share PDRB menurut Pengeluaran ADHB Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015-2020, (rata-rata persen)	40
Tabel 42.	Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Padi tahun 2020 dan Jagung serta Kedelai Tahun 2018 menurut Provinsi di Wilayah Maluku	50
Tabel 43.	Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Utama Wilayah Maluku Tahun 2015 dan 2019	50
Tabel 44.	Penyebaran Produksi Tanaman Perkebunan Utama menurut Provinsi Di Wilayah Maluku Tahun 2019	51
Tabel 45.	Populasi Ternak Besar menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2019. (ekor)	52
Tabel 46.	Perkembangan Populasi Ternak Unggas menurut Provinsi Di Wilayah Maluku Tahun 2015 dan 2019, (Ribu ekor)	52
Tabel 47.	Perkembangan Perikanan Tangkap Di Wilayah Maluku Tahun 2014 dan 2018 Berdasarkan Provinsi (Ton)	53
Tabel 48.	Perkembangan Perikanan Budidaya berdasarkan Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2014 dan 2018 (Ton)	54
Tabel 49.	Jumlah Tamu Asing pada Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2015-2019, (orang)	54
Tabel 50.	Jumlah Tamu Domestik pada Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2015-2019, (orang)	55
Tabel 51.	Jumlah Akomodasi/Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2013-2018	55
Tabel 52.	Jumlah kamar Akomodasi/Hotel Bintang dan Non Bintang Menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2013-2018	55
Tabel 53.	Jumlah Tenaga Kerja Akomodasi/Hotel Bintang dan Non-Bintang menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2014-2018	56
Tabel 54.	Perkembangan Jumlah Pendapatan dan Tenaga Kerja Industri Mikro-Kecil menurut Provinsi Di Wilayah Maluku Tahun 2015 dan 2019	57
Tabel 55.	Perkembangan PAD dan Rasio Kemandirian Daerah Antarprovinsi Tahun 2015-2019	59
Tabel 56.	Perkembangan Belanja di Seluruh Wilayah Maluku Tahun 2015-2019	60
Tabel 57.	Perkembangan Belanja Pegawai dan Rasio Belanja terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019	61
Tabel 58.	Perkembangan Belanja Modal dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019	62
Tabel 59.	Peta Kapasitas Fiskal Antarprovinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015-2019	62
Tabel 60.	Kualitas Jalan menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2018	64
Tabel 61.	Perkembangan Investasi di KEK Morotai	68
Tabel 62.	Jumlah Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku	71
Tabel 63.	Karakteristik Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku Tahun 2017/2019	72

Tabel 64.	Perkembangan Alokasi Dana Desa untuk Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku Periode 2015-2020	74
Tabel 65	Jumlah Terkonfirmasi, Sembuh dan Meninggal Akibat COVID-19 Antarprovinsi di Wilayah Maluku	77
Tabel 66	Perkembangan Pengangguran Terbuka Periode Februari dan Agustus 2020	77
Tabel 67	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III menurut Lapangan Usaha dan Provinsi di Wilayah Maluku	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 Wilayah Maluku dan Nasional Tahun 2015-2020, (persen)	2
Gambar 2.	Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 Wilayah Maluku Tahun 2015-2020, (persen)	3
Gambar 3.	Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015-2020, (dalam persen)	4
Gambar 4.	Perkembangan Pengangguran Terbuka dan TPT di Wilayah Maluku Tahun 2015-2020	4
Gambar 5.	Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka (Orang) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Periode 2015-2020 di Wilayah Maluku	5
Gambar 6.	Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Maluku Tahun 2020	7
Gambar 7.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Antarprovinsi Tahun 2015-2020 (Ribu Jiwa)	8
Gambar 8.	Distribusi Jumlah Penduduk Miskin Antarprovinsi Tahun 2020 (Ribu Jiwa)	8
Gambar 9.	Perkembangan IPM Nasional Tahun 2015-2019	9
Gambar 10.	Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Maluku dan Maluku Utara Periode 2015-2020	10
Gambar 11.	Jumlah Penduduk dan *Dependency Ration* Antarprovinsi di Wilayah Maluku	13
Gambar 12.	Perkembangan Angkatan Kerja di Wilayah Maluku Menurut Perdesaan dan Perkotaan, Tahun 2015-2020	15
Gambar 13.	Penyebaran Angkatan Kerja Antarprovinsi Menurut Perdesaan dan Perkotaan, Tahun 2020	15
Gambar 14.	Penduduk Wilayah Maluku menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2015 dan 2020	15
Gambar 15.	Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Penduduk Antarprovinsi Wilayah Maluku Tahun 2020	17
Gambar 16.	Penduduk Wilayah Maluku menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2015 dan 2020	17
Gambar 17.	Status Pekerjaan Utama Penduduk Antarprovinsi Wilayah Maluku Tahun 2020	18
Gambar 18.	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Antarprovinsi di Wilayah Maluku Tahun 2019	20
Gambar 19.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia Antarprovinsi di Wilayah Maluku Tahun 2019	21
Gambar 20.	Persentase Guru/kepala Sekolah Minimal Berijazah D4/S1 Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2018/2019	23
Gambar 21.	Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yangMenggunakan Internet Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tahun 2019	24

Gambar 22.	Angka Harapan Hidup (AHH) AntarprovinsidDi Wilayah Maluku Tahun 2015 dan 2019	24
Gambar 23.	Persentase Balita Menurut Status Gizi Dengan Indeks Berat Badan (Bb)/ Umur (U) di Wilayah Maluku Tahun 2018	25
Gambar 24.	Persentase Balita Usia 0-59 Bulan menurut Status Gizi dengan Indeks Tinggi Badan (TB)/Umur (U) di Wilayah Maluku Tahun 2018	26
Gambar 25.	Persentase Balita Usia 0-59 Bulan menurut Status Gizi dengan Indeks Berat Badan (TB)/Tinggi Badan (TB) di Wilayah Maluku Tahun 2018	27
Gambar 26.	Perkembangan Jumlah Kasus Tuberkulosis di Wilayah Maluku Periode 2015-2019	27
Gambar 27.	Kasus baru HIV dan AIDS Komulatif Tahun 2015-2019 Antarprovinsi di Wilayah Maluku	29
Gambar 28.	Perkembangan Jumlah Puskesmas menurut Provinsi Tahun 2015 dan 2019 Antarprovinsi	30
Gambar 29.	Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Terakreditasi menurut Provinsi Tahun 2019	30
Gambar 30.	Jumlah Rumah Sakit dan Tempat Tidur Rumah Sakit Antarprovinsi Tahun 2019	31
Gambar 31.	Gambaran Tingkat Kecukupan Tenaga Medis di Puskesmas Antarprovinsi Tahun 2019	32
Gambar 32.	Persentase Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Wilayah Maluku Menurut Kelompok Barang, Tahun 2015 dan 2019	33
Gambar 33.	Perkembangan Struktur Perekonomian ADHB Wilayah Maluku Tahun 2015 dan 2019 Triwulan I, (dalam persen)	37
Gambar 34.	Struktur Perekonomian Provinsi di Wilayah Maluku ADHB Tahun 2015-2020, (rata-rata dalam persen)	37
Gambar 35.	Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) Wilayah Maluku Tahun 2015-2019	40
Gambar 36.	Distribusi Nilai Realisasi Investasi PMDN (%) menurut Wilayah dan Provinsi Tahun 2015-2019	41
Gambar 37.	Perkembangan Realisasi Investasi PMA (juta US$) Wilayah Maluku Tahun 2015-2019	41
Gambar 38.	Distribusi Nilai Realisasi Investasi PMA (%) menurut Pulau dan Provinsi Tahun 2015-2019	42
Gambar 39.	Perkembangan Perdagangan Migas dan Non Migas Wilayah Maluku dan Provinsi Tahun 2015-2019. (dalam juta US$)	42
Gambar 40.	Perdagangan Migas dan Non Migas menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015-2019. (rata-rata dalam persen)	43
Gambar 41.	Perkembangan Nilai Ekspor Migas dan Non Migas Wilayah Maluku Tahun 2015-2019, (dalam juta US$)	43
Gambar 42.	Kontribusi Nilai Ekspor Migas dan Non Migas Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015 - 2019. (rata-rata dalam persen)	44

Gambar 43. Perkembangan Nilai Impor Migas dan Non-Migas Wilayah Maluku Tahun 2015-2019, (dalam juta US$) 44

Gambar 44. Perkembangan Kontribusi Nilai Impor Migas dan Non Migas Wilayah Maluku Tahun 2015-2019, (dalam persen) 45

Gambar 45. Perkembangan Nilai Pinjaman/Kredit dan Simpanan (Rp. miliar) Masyarakat Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR Tahun 2015 – 2020 45

Gambar 46. Posisi Pinjaman/Kredit yang Diberikan Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR menurut Provinsi (Rp. Miliar) 46

Gambar 47. Rasio Pinjaman/kredit terhadap Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR menurut Provinsi Tahun 2015 dan 2019 46

Gambar 48. Rasio Kredit Bermasalah terhadap Pinjaman/Kredit menurut Provinsi 47

Gambar 49. Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi di Wilayah Maluku Tahun 2016-2020 47

Gambar 50. Distribusi Produksi Padi menurut Pulau dan Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2020 48

Gambar 51. Perkembangan Produksi dan Produktivitas Jagung di Wilayah Maluku Tahun 2014-2018 48

Gambar 52. Distribusi Produksi Jagung menurut Pulau dan Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2018 49

Gambar 53. Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Kedelai di Wilayah Maluku Tahun 2014-2018 49

Gambar 54. Distribusi Produksi Kedelai menurut Wilayah dan Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2018 50

Gambar 55. Perkembangan Populasi Ternak Besar di Wilayah Maluku Tahun 2015 dan 2019, (dalam ribu ekor) 51

Gambar 56. Perkembangan Populasi Ternak Unggas Wilayah Maluku Tahun 2015 dan 2019, (dalam ribu ekor) 52

Gambar 57. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya berdasarkan Wilayah di Indonesia, (ton) 53

Gambar 58. Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Bintang di Provinsi Wilayah Maluku, Tahun 2019-2020 56

Gambar 59. Perkembangan Jumlah Industri Usaha Mikro-Kecil (IMK) Wilayah Maluku Tahun 2015 dan 2019, (dalam unit) 57

Gambar 60. Komposisi Perkembangan Nilai Tambah Industri Menengah Besar di Indonesia Tahun 2017 57

Gambar 61. Nilai Tambah Industri Menengah Besar di Wilayah Maluku berdasarkan Provinsi Tahun 2017 58

Gambar 62. Jumlah Tenaga Kerja Industri Menengah Besar di Wilayah Maluku berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017 58

Gambar 63. Perkembangan PAD dan Rasio Kemandirian Antarprovinsi Tahun 2015-2019 59

Gambar 64. Perkembangan Belanja di Seluruh Wilayah Maluku Tahun 2015-2019 60

Gambar 65.	Perkembangan Belanja Pegawai dan Rasio Belanja terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019	60
Gambar 66.	Perkembangan Belanja Modal dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019	61
Gambar 67.	Peta kapasitas Fiskal Antarprovinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015 dan 2019	62
Gambar 68.	Perkembangan Panjang Jalan menurut Kewenangan di Wilayah Maluku Tahun 2015-2018, (dalam Km)	64
Gambar 69.	Perkembangan Energi yang Diproduksi di Wilayah Maluku Tahun 2014-2018, (dalam GWh)	65
Gambar 70.	Komposisi Produksi Energi Listrik menurut Jenis Pembangkit di Wilayah Maluku Tahun 2019, (dalam persen)	65
Gambar 71.	Perkembangan Rasio Elektrifikasi Wilayah Maluku Tahun 2016-2019, (dalam persen)	66
Gambar 72.	Rasio Elektrifikasi menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2019, (dalam persen)	66
Gambar 73.	Masterplan KEK Morotai	68
Gambar 74.	Infrastruktur yang sudah dibangun di KEK Morotai	70
Gambar 75.	Hotel/Resort yang sudah dibangun di KEK Morotai	70
Gambar 76.	Destinasi Wisata di Pulau Morotai	71
Gambar 77.	Alokasi Dana Desa untuk Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku periode 2015 - 2019	73
Gambar 78.	Alokasi Dana Desa untuk Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku Tahun 2019	73
Gambar 79.	Jumlah Terkonfirmasi, Sembuh dan Meninggal Akibat COVID-19 Antarprovinsi di Wilayah Maluku	76
Gambar 80.	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III Wilayah Maluku Tahun 2019 dan 2020	78
Gambar 81.	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III menurut Lapangan Usaha di Wilayah Maluku	79
Gambar 82.	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III menurut Provinsi di Wilayah Maluku	80
Gambar 83.	Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN pada Triwulan I dan II menurut Provinsi di Wilayah Maluku	81

PERKEMBANGAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN WILAYAH MALUKU

- Pada tahun 2020 Triwulan II, pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku terkontraksi pada angka -0,57 persen, dengan rincian Provinsi Maluku tumbuh -0,92 persen, dan Povinsi Maluku Utara tumbuh -0,16 persen
- Sektor-sektor yang memberikan andil besar dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara adalah sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor adm. Pemerintahan.
- Pengangguran Terbuka pada Februari 2020 di wilayah Maluku, Provinsi Maluku sebanyak 52.710 orang dengan TPT sebesar 7,02 persen, dan di Maluku Utara sebanyak 23.436 orang atau dengan TPT 4,26 persen.
- Persentase Pengangguran terbuka berpendidikan terakhir SMU di Provinsi Maluku Utara mencapai 51,84 persen, berikutnya adalah pendidikan universitas (13,96%), dan di Provinsi Maluku persentase pengangguran terbuka berpendidikan SMA Umum (45,53%), pendidikan universitas (24,19%).
- Jumlah penduduk miskin di wilayah Jawa-Bali pada semester 1 (Maret) tahun 2020 Provinsi Maluku sebanyak 318,18 ribu jiwa atau 78,65 persen dari total penduduk miskin wilayah Maluku. Tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku mencapai 17,44 persen, sedangkan di Provinsi Maluku Utara sebesar 6,78 persen.
- IPM Provinsi Maluku (69,45) yang menduduk ranking ke-26 ditingkat nasional, dan Provinsi Maluku Utara (68,7) menduduki ranking 27.
- Nilai koefisien Gini Ratio di Provinsi Maluku dan Maluku Utara pada tahun 2020 sudah berada di bawah gini rasio nasional, dengan nilai koefisien Gini Ratio tertinggi di Provinsi Maluku (0,318) dan Maluku Utara (0,308).

01 Perkembangan Indikator Utama Pembangunan

1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku periode 2015-2019 menunjukkan peningkatan, dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2019 ekonomi wilayah Maluku tumbuh sebesar 5,83 persen sedikit mengalami perlambatan dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,84 persen. Pada tahun 2020 Triwulan II bersamaan dengan adanya krisis pandemik Covid-19 berdampak cukup signifikan terhadap penurunan kinerja ekonomi wilayah Maluku, pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku pada tahun 2020 Triwulan II terkontraksi pada angka -0,57 persen (**Gambar 1**). Sementara sektor yang memiliki andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku hingga Triwulan I, diantaranya adalah sektor pertanian, sektor industi pengolahan, sektor adm. Pemerintahan, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor konstruksi, sementara untuk sektor pertambangan dan penggalian terkontraksi di angka 0,64 persen (**Gambar 2**).

Gambar 1:

Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 Wilayah Maluku dan Nasional Tahun 2015-2020, (persen)

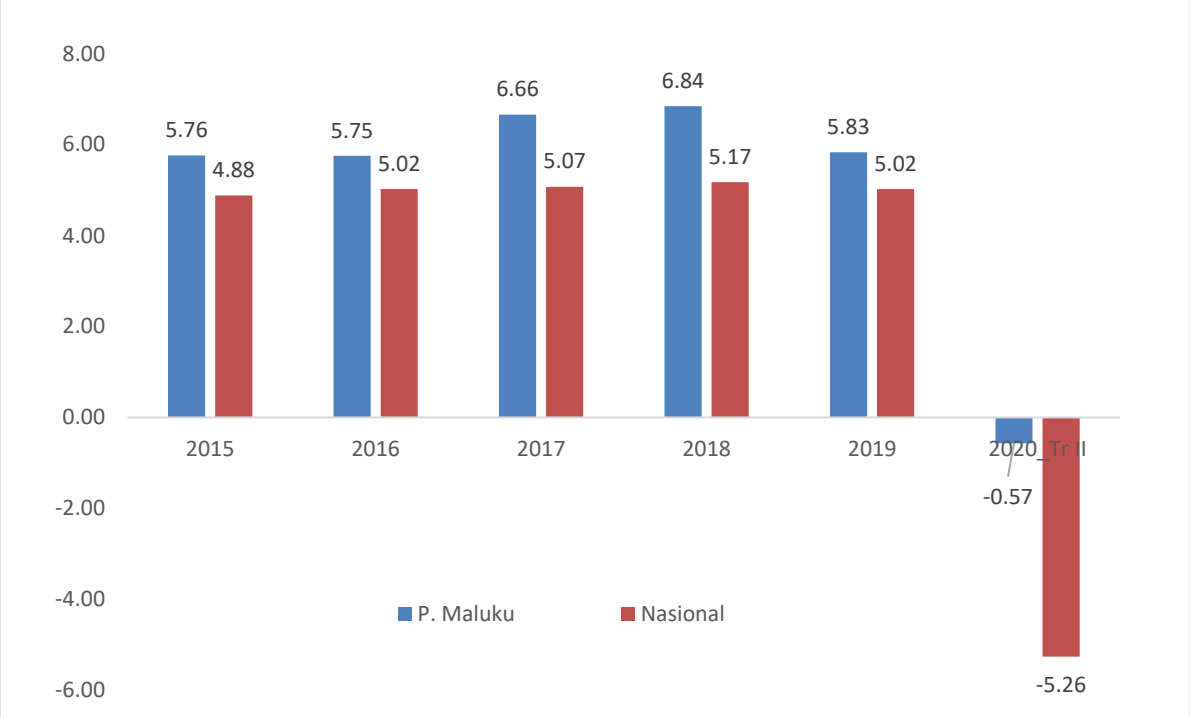

Gambar 2:

Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 Wilayah Maluku Tahun 2015-2020, (persen)

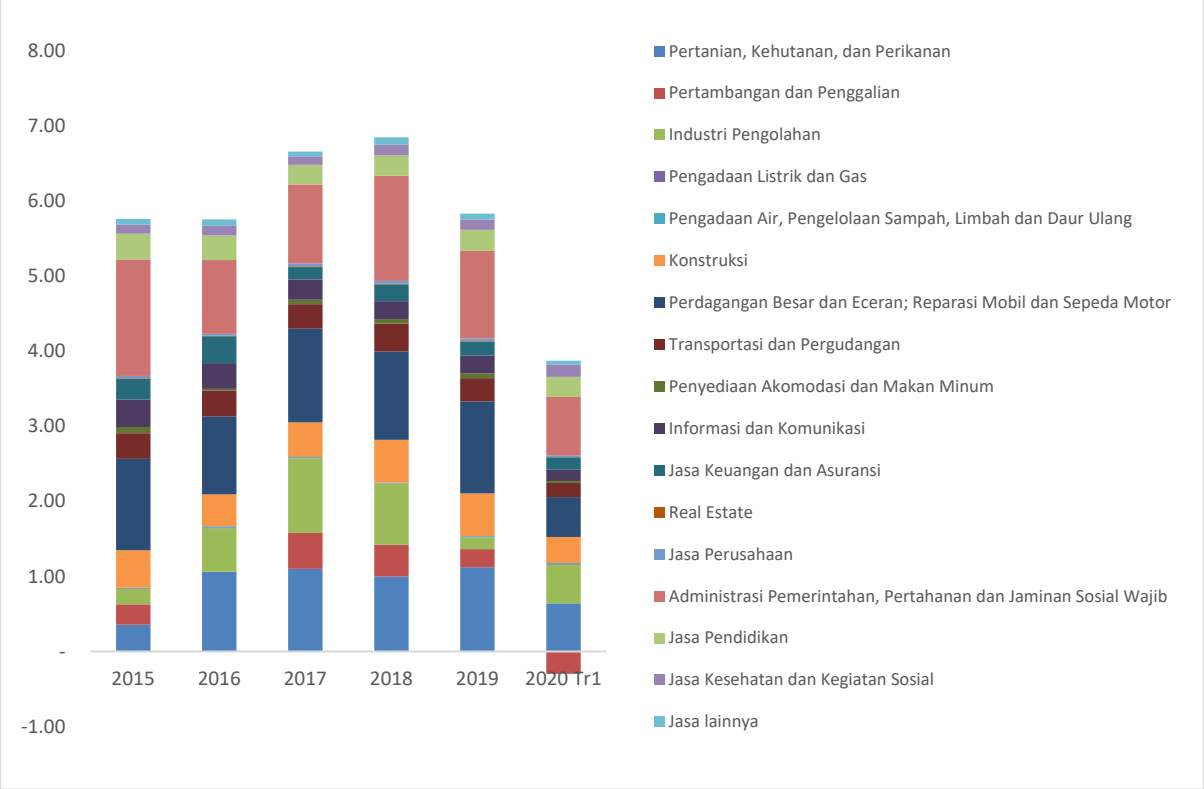

Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2015-2020, BPS

Pertumbuhan ekonomi provinsi di wilayah Maluku, rata-rata tumbuh positif selama periode 2015-2019, dengan pertumbuhan rata-rata di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,94 persen, dan pertumbuhan di Provinsi Maluku Utara tertinggi terjadi tahun 2018 sebesar 7,92 persen. Perkembangan ekonomi selama periode 2015-2020 triwulan II, dampak pandemi Covid-19 berpengaruh cukup signifikan terhadap menurunnya kinerja ekonomi wilayah, seluruh provinsi pada tahun 2020 Triwulan II terkontraksi dengan angka pertumbuhan negatif, yaitu Provinsi Maluku terkontraksi di angka -0,92 persen, dan Povinsi Maluku Utara terkontraksi di angka -0,16 persen (**Tabel 1**). Sektor-sektor yang memberikan andil besar dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor adm. Pemerintahan. Sektor lain yang memberikan adil cukup besar adalah sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian, masing-masing memberikan andil sebesar 0,88 persen dan 0,46 persen (**Gambar 3**).

Tabel 1:

Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2010 Provinsi di Wilayah Maluku
Tahun 2015-2020, (dalam persen)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020_Tr II
Maluku	5,48	5,73	5,82	5,94	5,57	-0,92
Maluku Utara	6,10	5,77	7,67	7,92	6,13	-0,16
MALUKU	**5,76**	**5,75**	**6,66**	**6,84**	**5,83**	**-0,57**

Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2015-2020, BPS

Gambar 3:
Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Maluku
Tahun 2015-2020, (dalam persen)

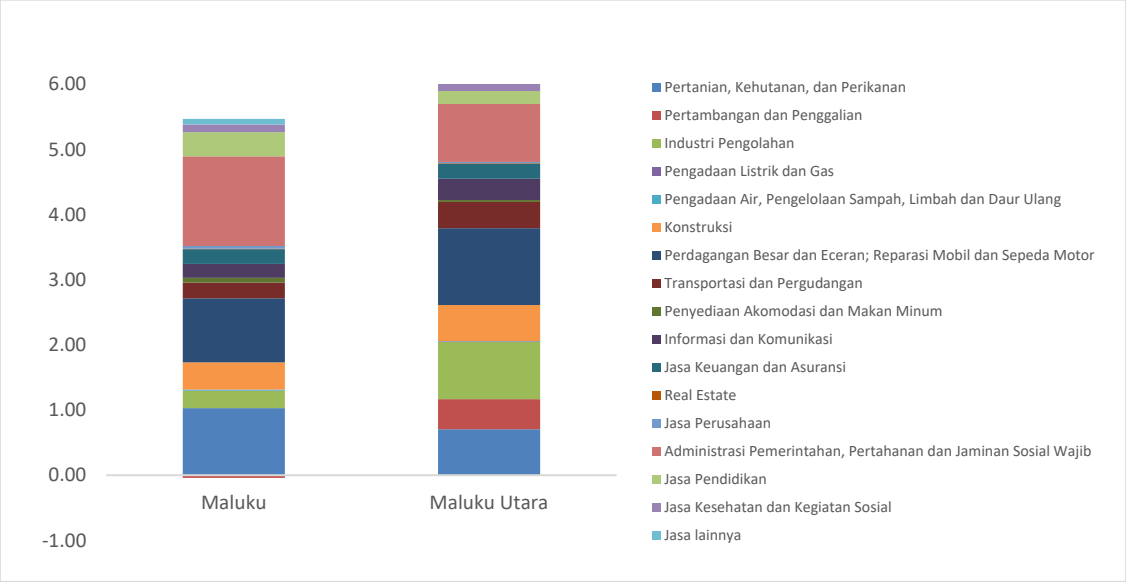

Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2015-2020, BPS

1.2. Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka di wilayah Maluku pada tahun 2020 sebanyak 76.146 orang atau dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,85 persen, lebih tinggi dibanding TPT nasional (5,34%). Perkembangan pengangguran terbuka di wilayah Maluku tersebut menunjukkan peningkatan pada periode 2016-2017 hingga mencapai 6,53 persen, namun menurun kembali hingga tahun 2020.

Pengangguran Terbuka antarprovinsi pada tahun 2020 di wilayah Maluku, Provinsi Maluku menunjukkan jumlah 52.710 orang dengan TPT sebesar 7,02 persen. Sementara itu jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Maluku Utara sebanyak 23.436 orang atau dengan TPT 4,26 persen (berada di bawah TPT nasional).

Perkembangan jumlah pengangguran terbuka antarprovinsi di wilayah Maluku dalam periode 2015-2020 menunjukkan tren yang berlawanan, yakni di Provinsi Maluku menunjukkan peningkatan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 4.915 orang (TPT : 0,30%), sementara itu di Provinsi Maluku Utara menunjukkan penurunan sebanyak 5.394 orang atau berdasarkan TPT berkurang sebesar 1,30 persen.

Gambar 4:
Perkembangan Pengangguran Terbuka dan TPT
di Wilayah Maluku Tahun 2015-2020

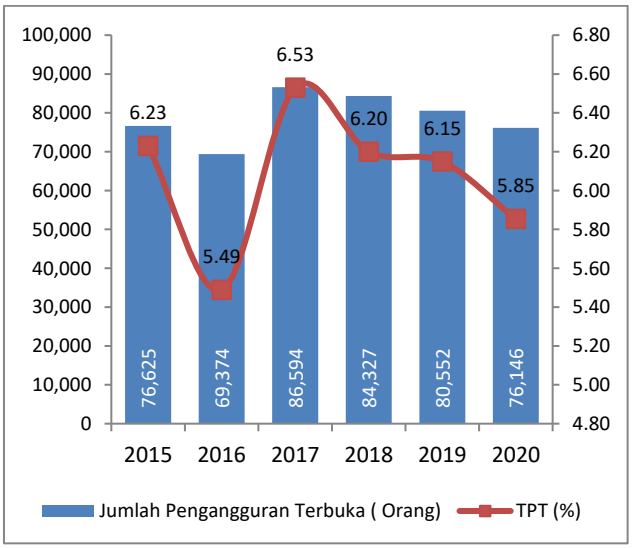

Sumber : Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Tabel 2:

Perkembangan jumlah Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pengangguran Terbuka Antarprovinsi di Wilayah Maluku Pada Tahun 2015-2020.

Wilayah	Tahun						Δ ('15-'20
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Pengangguran Terbuka (ribu orang)							
Maluku	47.795	51.164	59.745	56.958	52.821	52.710	4.915
Maluku Utara	28.830	18.210	26.849	27.369	27.731	23.436	-5.394
MALUKU	**76.625**	**69.374**	**86.594**	**84.327**	**80.552**	**76.146**	**-479**
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)							
Maluku	6,72	6,98	7,77	7,38	6,91	7,02	0,30
Maluku Utara	5,56	3,43	4,82	4,65	5,09	4,26	-1,30
MALUKU	**6,23**	**5,49**	**6,53**	**6,20**	**6,15**	**5,85**	**-0,38**

Sumber : Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Pengangguran Terbuka menurut Perdesaan-Perkotaan. Jumlah pengangguran terbuka dan TPT pada periode 2015-2020 menunjukkan dominasi di perkotaan, dengan TPT pada tahun 2015 (6,37%) meningkat hingga mencapai 10,40 persen pada tahun 2017, dan menurun kembali hingga menjadi 9,00 persen pada tahun 2020. Sementara untuk TPT di perdesaan, tertinggi sebesar 6,15 persen pada tahun 2015 dan berkurang 2,17 persen pada tahun 2020 menjadi 3,98 persen.

Gambar 5:

Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka (orang) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Periode 2015-2020 di Wilayah Maluku

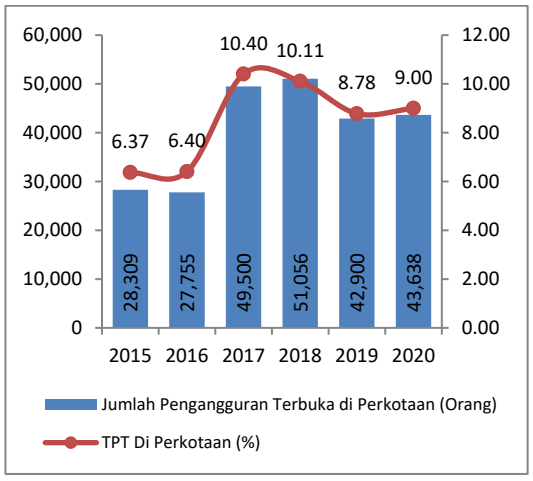

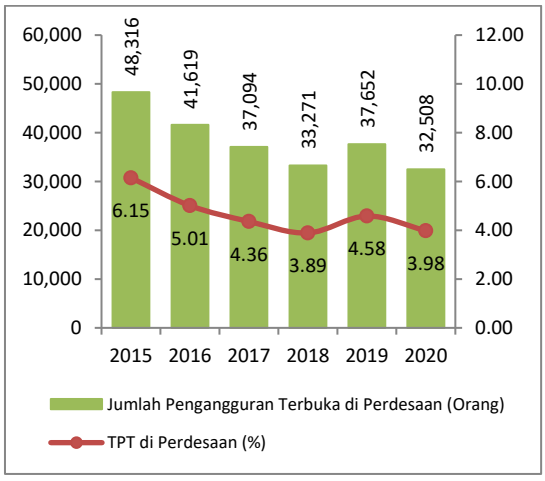

Sumber : Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Selama periode 2015-2020, Provinsi Maluku menunjukkan peningkatan TPT di perkotaan sebesar 4,55 persen hingga mencapai 10,49 persen (tahun 2020), sementara di perdesaan menunjukkan penurunan TPT sebesar 2,87 persen hingga mencapi 4,41 persen (tahun 2020). Kondisi yang lebih baik terjadi di Provinsi Maluku Utara yang menunjukkan penurunan TPT baik di perkotaan maupun di perdesaan masing-masing berkurang sebesar 1,18 persen dan 1,37 persen.

Tabel 3:

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Antarprovinsi Menurut Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Maluku Tahun 2015-2020

Provinsi	TPT PERKOTAAN (%)							TPT PERDESAAN (%)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Δ ('15-'20)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Δ ('15-'20)
Maluku	5,94	7,57	12,31	12,44	10,37	10,49	4,55	7,28	6,58	4,69	3,47	4,32	4,41	-2,87
Maluku Utara	7,22	3,99	6,81	5,46	5,57	6,04	-1,18	4,89	3,23	3,98	4,33	4,89	3,52	-1,37
MALUKU	**6,37**	**6,40**	**10,40**	**10,11**	**8,78**	**9,00**	**2,63**	**6,15**	**5,01**	**4,36**	**3,89**	**4,58**	**3,98**	**-2,17**

Sumber : Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan. Pengangguran terbuka di wilayah Maluku pada tahun 2020 sebagian besar dikontribusi oleh kelompok pengangguran berpendidikan terakhir SMA Umum (47,47%), Universitas (21,05%), dan SMA Kejuruan (11,61%). Persentase Pengangguran terbuka berpendidikan terakhir SMU di Provinsi Maluku Utara mencapai 51,84 persen, kemudian persentase tertinggi berikutnya adalah pendidikan universitas (13,96%) dan Tamat SMP (13,46%). Sementara itu di Provinsi Maluku, persentase tertinggi adalah pengangguran terbuka berpendidikan SMA Umum (45,53%), pendidikan universitas (24,19%), dan SMK (11,78%).

Tabel 4:

Pengangguran Terbuka menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Maluku Tahun 2020

Provinsi	Jumlah Penganggur an Terbuka (orang)	Persentase Pengangguran terbuka menurut Pendidikan							
		Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMU	Tamat SMK	Diploma I/II/III Akademi	Universitas
Maluku	52.710	-	1,30	5,27	8,10	**45,53**	11,78	3,82	**24,19**
Maluku Utara	23.436	-	3,02	5,54	**13,46**	**51,84**	11,21	0,96	**13,96**
MALUKU	**76.146**	**-**	**1,83**	**5,36**	**9,75**	**47,47**	**11,61**	**2,94**	**21,05**

Sumber : Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Berdasarkan keberadaan pengangguran terbuka di perdesaan dan perkotaan, menunjukkan pengangguran terbuka pada kelompok berpendidikan lebih tinggi dari SMP sebagian besar berada di perkotaan, sementara untuk yang berpendidikan SMP dan pendidikan lebih rendah sebagian besar berada di perdesaan. Berdasarkan gender, pengangguran terbuka berpendidikan tertinggi (universitas dan Diploma) sebagian besar adalah kaum perempuan, dan tingkat pendidikan lebih rendah sebagian besar dari kaum laki-laki.

Gambar 6 :
Pengangguran Terbuka MenurutPendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Maluku
Tahun 2020

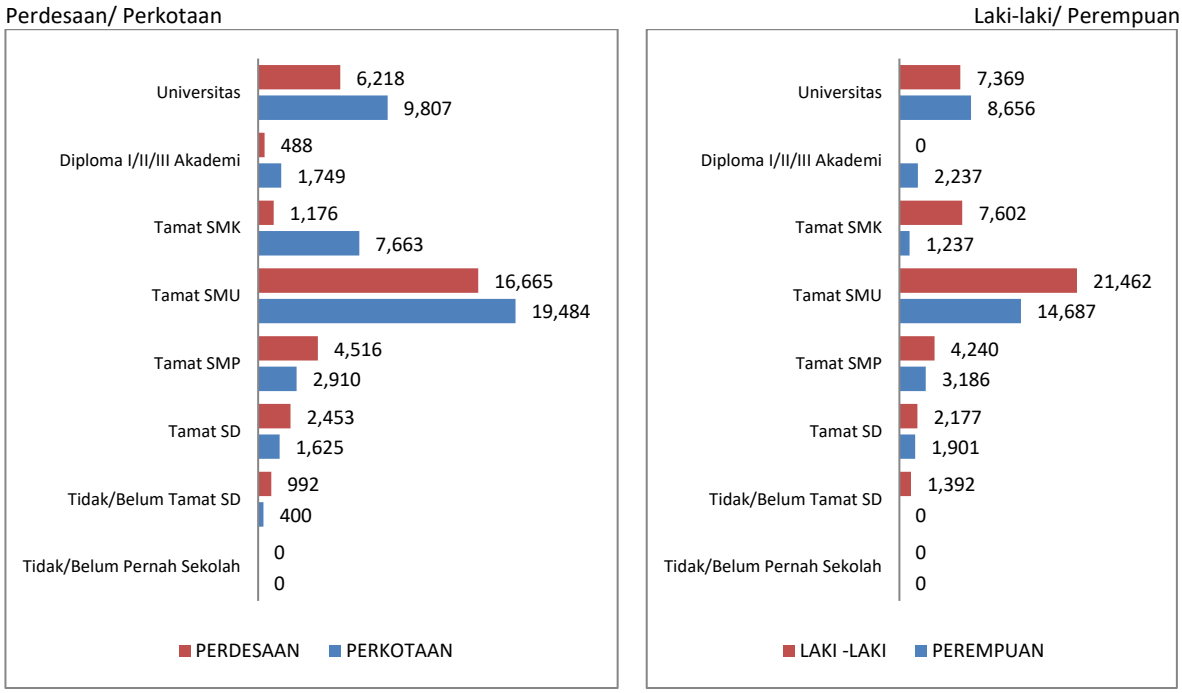

Sumber : Sakernas Februari 2020, BPS

Perkembangan pengangguran terbuka menurut pendidikan yang ditamatkan di wilayah Maluku pada tahun 2015 dan tahun 2020 menunjukkan penurunan jumlah dan persentase dari setiap tingkat pendidikan, kecuali untuk tingkat pengangguran terbuka untuk berpendidikan SMA Umum meningkat sebanyak 6.680 orang (9,01%), Universitas 2.863 orang (3,87%), dan SMA Kejuruan (2.165 orang (2,90%).

Tabel 5:
Perkembangan Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
di Wilayah Maluku Tahun 2015 dan 2020

Maluku	Tahun	Pengang-guran Terbuka (orang)	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				Diploma I/II/III Akademi Diploma I/II/III	Univer sitas
					Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas			
							Umum	Kejuruan		
Jumlah (orang)	**2015**	76.625	475	3.126	6.674	7.776	29.469	6.674	9.269	13.162
	2020	76.146	0	1.392	4.078	7.426	36.149	8.839	2.237	16.025
	Δ ('15-'20)	**-479**	**-475**	**-1.734**	**-2.596**	**-350**	**6.680**	**2.165**	**-7.032**	**2.863**
(%)	**2015**	100,00	0,62	4,08	8,71	10,15	38,46	8,71	12,10	17,18
	2020	100,00	-	1,83	5,36	9,75	47,47	11,61	2,94	21,05
	Δ ('15-'20)	**0,00**	**-0,62**	**-2,25**	**-3,35**	**-0,40**	**9,01**	**2,90**	**-9,16**	**3,87**

Sumber:Sakernas Februari 2015-2020, BPS

1.3. Kemiskinan

Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin Indonesia semester 1 (Maret) tahun 2020 sebanyak 26,42 juta jiwa (9,78%), berkurang sebanyak 2,17 juta jiwa (1,44%) jika dibandingkan dengan penduduk miskin tahun 2015 sebanyak 28,59 Juta jiwa (11,22%). Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di wilayah Maluku mencapai 404,55 ribu jiwa atau 1,53 persen dari total penduduk miskin di Indonesia.

Gambar 7:
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Antarprovinsi Tahun 2015 - 2020

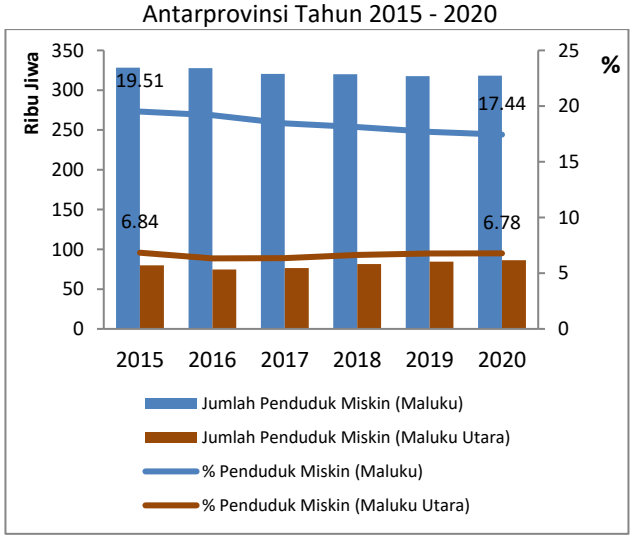

Gambar 8:
Distribusi Jumlah Penduduk Miskin Antarprovinsi Tahun 2020

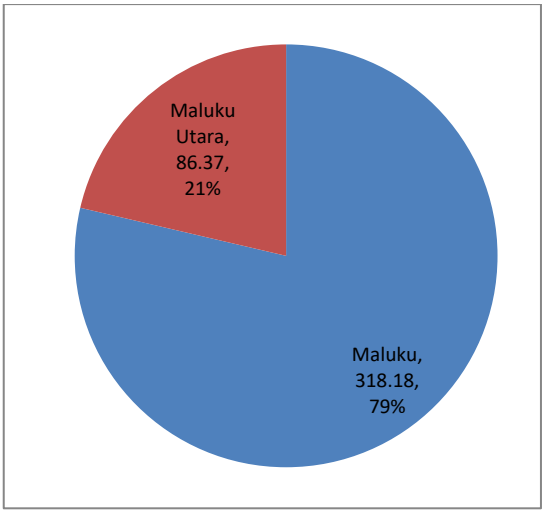

Sumber: Data Kemiskinan Semester 1 (maret), Publikasi BPS Tahun 2020

Berdasarkan penyebaran jumlah penduduk miskin tahun 2020 antarprovinsi sebagian besar berada di Provinsi Maluku sebanyak 318,18 ribu jiwa atau 78,65 persen dari total penduduk miskin wilayah Maluku. Penyebaran penduduk miskin di provinsi Maluku sebanyak 84,32 persen diantaranya berada di perdesaan, sedangkan di Provinsi Maluku Utara sebanyak 86,37 ribu jiwa, dan 80,80 persen diantaranya berada di perdesaan. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara menunjukkan adanya peningkatan sebesar 6,47 ribu jiwa, yang dikontribusi oleh peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan (3,86%). Sedangkan di Provinsi Maluku menunjukkan penurunan sebesar 10,23 ribu jiwa, namun diikuti peningkatan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 0,08 persen.

Tabel 6:
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Antarprovinsi di Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 dan 2020

Provinsi	Jumlah (ribu jiwa)			Perkotaan (%)			Perdesaan (%)		
	2015	2020	Δ ('15-'20)	2015	2020	Δ ('15-'20)	2015	2020	Δ ('15-'20)
Maluku	328,41	318,18	-10,23	15,76	15,68	-0,08	84,24	84,32	0,08
Maluku Utara	79,9	86,37	6,47	15,33	19,20	3,86	84,67	80,80	-3,86
MALUKU	**408,31**	**404,55**	**-3,76**	**15,68**	**16,43**	**0,75**	**84,32**	**83,57**	**-0,75**

Sumber: Data Kemiskinan Semester 1 (maret), Publikasi BPS Tahun 2020

Berdasarkan persentase penduduk miskin antarprovinsi pada tahun 2020, Tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku (17,44%) masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional (9,78%), sedangkan di Provinsi Maluku Utara sudah mencapai tingkat kemiskinan sebesar 6,78 persen. Tingginya tingkat kemiskinan tahun 2020 di Provinsi Maluku dikontribusi oleh tingkat kemiskinan di perdesaan yang mencapai 26,21 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 6,23 pesen. Tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara sebagian besar dikontribusi dari tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 7,7 persen, dan di perkotaan sebesar 4,53 persen. Selama periode 2015-2020, penurunan tingkat kemiskinan terbesar berada di Provinsi Maluku sebesar 2,07 persen, sebagian besar dikontribusi penurunan tingkat kemiskinan di perkotaan (1,68%).

Tabel 7.
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2020

Provinsi	Perkotaan (K)			Perdesaan (D)			Jumlah (K + D)		
	2015	2020	Δ ('15-'20)	2015	2020	Δ ('15-'20)	2015	2020	Δ ('15-'20)
Maluku	7,91	6,23	-1,68	26,90	26,21	-0,69	19,51	17,44	-2,07
Maluku Utara	3,85	4,53	0,68	7,95	7,7	-0,25	6,84	6,78	-0,06
INDONESIA	**8,29**	**7,38**	**-0,91**	**14,21**	**12,82**	**-1,39**	**11,22**	**9,78**	**-1,44**

Sumber: Data Kemiskinan Semester 1 (maret), Publikasi BPS Tahun 2020

1.4. Indeks Pembangunan Manusia

IPM antarprovinsi di wilayah Maluku selama periode 2014 – 2019 menunjukkan peningkatan, namun masih berada di bawah IPM nasional (71,92). IPM Provinsi Maluku (69,45) yang menduduki ranking ke-26 ditingkat nasional, dan Provinsi Maluku Utara (68,7) menduduki ranking ke-27.

Gambar 9:
Indeks Pembangunan Manusia Antarprovinsi Periode 2014-2019

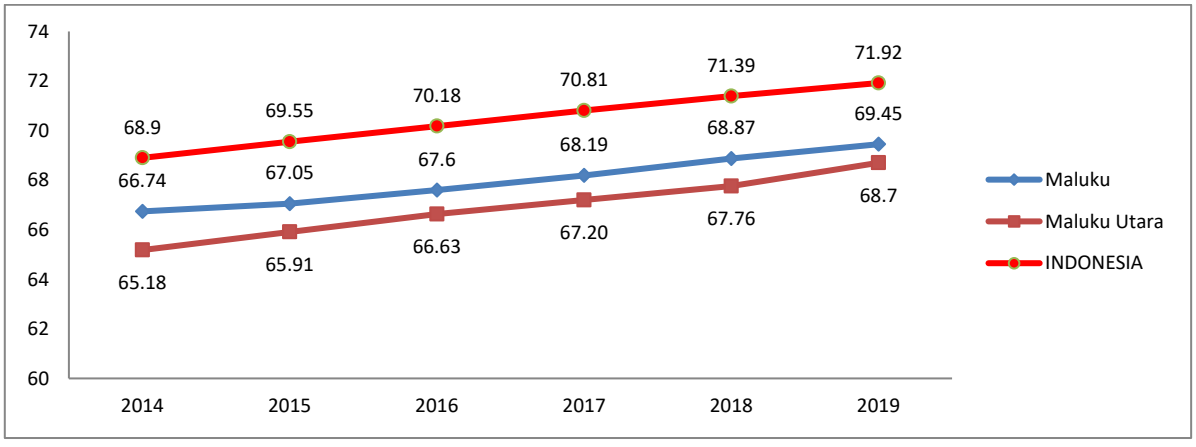

Sumber: Publikasi BPS, 2020

Berdasarkan perkembangan IPM antara tahun 2015 dan 2019, peningkatan tertinggi di Provinsi Maluku Utara yang meningkat sebanyak 2,79 poin, dan di Provinsi Maluku meningkat sebesar 2,40 poin. Berdasarkan perkembangan ranking IPM secara nasional, Provinsi Maluku pada tahun 2015 menempati ranking ke-24, menurun menjadi ranking ke-26 pada tahun 2019, sedangkan untuk IPM

Provinsi Maluku Utara masih tetap menduduki ranking ke-27. Untuk menunjukkan kecepatan perkembangan IPM selama periode 2015-2019 dapat diindikasikan melalui reduksi *short fall* pertahun *(annual reduction in short fall)* yaitu perhitungan secara sederhana untuk menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai IPM ideal (IPM =100). Berdasarkan hasil perhitungan, Provinsi Maluku Utara dan Maluku memiliki nilai reduksi *short fall* per tahun termasuk kategori menengah (1,5-1,7).

Tabel 8:

Perkembangan IPM, Ranking dan Reduksi Shortfall Antarprovinsi Tahun 2015-2019

Provinsi	2015		2016		2017		2018		2019		Δ ('15-'20)	Reduksi Shortfall Per tahun
	IPM	Ranking Nasional	IPM	Ranking Nasional	IPM	Ranking Nasional	IPM	Ranking Nasional	IPM	Ranking Nasional		
Maluku	67,05	24	67,6	25	68,19	25	68,87	26	69,45	26	2,40	1,64
Maluku Utara	65,91	27	66,63	27	67,20	27	67,76	27	68,7	27	2,79	1,69
INDONESIA	**69,55**		**70,18**		**70,81**		**71,39**		**71,92**		**2,37**	**1,67**

Sumber data, BPS

Keterangan: Kategori reduksi *short fall* pertahun : (a) Sangat lambat jika : < 1,3; (b) Lambat jika : 1,3 – 1,5; (c). Menengah : 1,5 – 1,7; dan (d) Cepat jika : > 1,7.

1.5. Gini Ratio

Gini Ratio atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana Gino Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, dan sebaliknya Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan tidak merata sempurna.

Gambar 10:

Pekembangan Gini Ratio di Provinsi Maluku dan Maluku Utara Periode 2015-2020

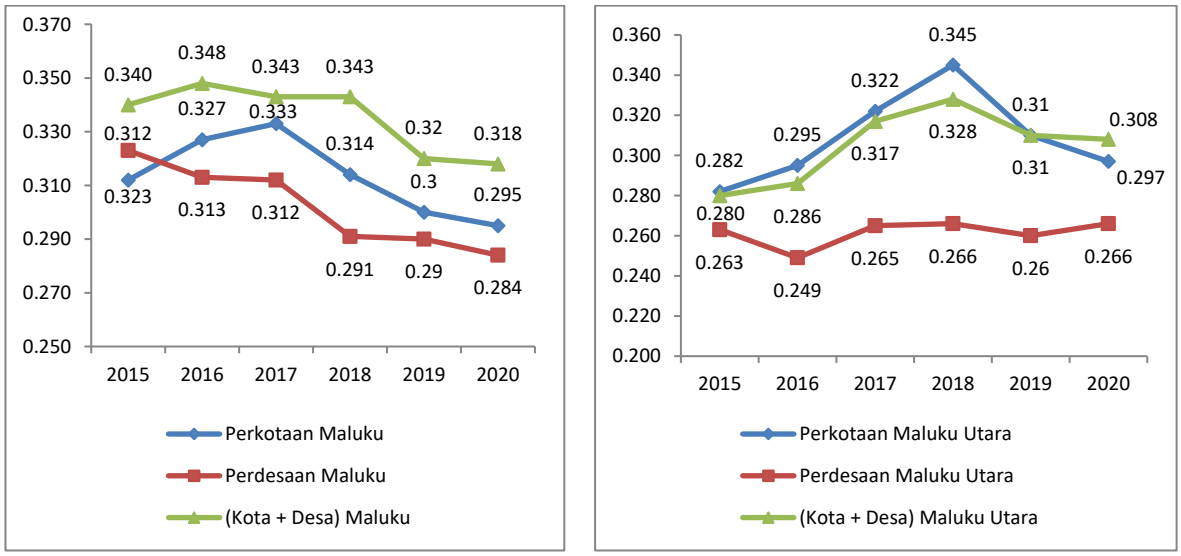

Sumber: Data Gini Ratio Semester 1 (maret), Publikasi BPS Tahun 2020

Berdasarkan data BPS, perkembangan nilai koefisien gini ratio secara nasional pada periode 2015-2020 menunjukkan penurunan, yaitu sebesar 0,408 pada tahun 2015 berkurang sebesar 0,027 menjadi 0,381 pada tahun 2020. Nilai koefisien gini ratio di Provinsi Maluku dan Maluku Utara sudah berada di bawah gini rasio nasional, dengan nilai koefisien gini ratio tertinggi di Provinsi Maluku (0,318) dan Maluku Utara (0,308). Perkembangan ketimpangan di Provinsi Maluku Utara menunjukkan peningkatan dengan tambahan nilai koefisien gini ratio sebesar 0,028, sedangkan di Provinsi Maluku menunjukkan penurunan sebesar 0,022.

Tabel 9:

Perkembangan Gini Ratio Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2020

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	2015	2020	Δ ('15-20)	2015	2020	Δ ('15-20)	2015	2020	Δ ('15-20)
Maluku	0,312	0,295	-0,017	0,323	0,284	-0,039	0,340	0,318	-0,022
Maluku Utara	0,282	0,297	0,015	0,263	0,266	0,003	0,280	0,308	0,028
NASIONAL	**0,428**	**0,393**	**-0,035**	**0,334**	**0,317**	**-0,017**	**0,408**	**0,381**	**-0,027**

Sumber: Data Gini Ratio Semester 1 (maret), Publikasi BPS Tahun 2020

Berdasarkan perkembangan nilai koefisien gini ratio di perdesaan dan perkotaan tahun 2015-2020, peningkatan ketimpangan di Provinsi Maluku Utara dikontribusi oleh peningkatan nilai koefisien gini ratio di perkotaan (0,015) dan peningkatan di perdesaan (0,003). Sebaliknya untuk di Provinsi Maluku penurunan ketimpangan dikontribusi dari penurunan nilai koefisien gini ratio perkotaan (0,017) dan perdesaan (0,039).

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

- Wilayah Maluku pada tahun 2019 berpenduduk sebanyak 3.06 juta jiwa atau 1,14 persen dari penduduk Indonesia, dengan jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Maluku sebanyak 1,80 juta jiwa atau 58,94 persen dari penduduk di wilayah Maluku.
- Tingkat kepadatan penduduk di wilayah Maluku pada tahun 2019 mencapai 38,77 jiwa/Km^2 , dengan kepadatan di Provinsi Maluku Utara sebesar 39,27 Jiwa/Km^2 lebih besar dibanding kepadatan di Provinsi Maluku sebesar 38,43 Jiwa/Km^2 .
- Laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010-2019 di wilayah Maluku mencapai 1,92 persen, dengan Laju pertumbuhan di Provinsi Maluku Utara (2,08%) lebih tinggi dibanding Provinsi Maluku (1,75%).
- Angka beban tanggungan (dependency ratio) di wilayah Maluku masih berada di atas 50 persen, dengan angka beban tanggungan di Provinsi Maluku sebesar 58,2 persen, lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Maluku Utara sebesar 56,0 persen.
- Penduduk wilayah Maluku sebagian besar bergerak pada jenis lapangan pekerjaan: (i) pertanian, kehutanan dan perikanan (39,87%), (ii) perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (17,20%),serta (iii) industri pengolahan (8,07%).
- Penduduk wilayah Maluku sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai (34,13%), berusaha sendiri (24,58%), serta berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (15,60%).
- Status pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan/pegawai, tertinggi di Provinsi Maluku Utara (35,57%) dan Maluku Utara (34,13%), dan status pekerjaan lainnya yang cukup tinggi adalah berusaha sendiri dengan persentase di Provinsi Maluku (26,27%) lebih tinggi dibanding Provinsi Maluku Utara (22,34%).

02 Perkembangan Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

2.1. Kependudukan

Wilayah Maluku pada tahun 2019 berpenduduk sebanyak 3.06 juta jiwa atau 1,14 persen dari penduduk Indonesia. Jumlah penduduk tertinggi berada di Provinsi Maluku sebanyak 1,80 juta jiwa atau 58,94 persen dari penduduk di wilayah Maluku. Berdasarkan rasio jenis kelamin laki-laki dan perempuan menunjukkan rasio laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.

Tabel 10:
Luas Wilayah dan Kependudukan Antarprovinsi di Wilayah Maluku Tahun 2019

Provinsi	Luas Wilayah Daratan		Penduduk		Rasio Jenis Kelamin	Laju Pertumbuhan Penduduk (2010-2019) (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km^2)
	(km^2)	%	(ribu jiwa)	%			
Maluku	46.914,0	59,46	1.802,9	58,94	101,60	1,75	38,43
Maluku Utara	31.982,5	40,54	1.255,8	41,06	104,00	2,08	39,27
MALUKU	**78.896,5**	**100,00**	**3.058,7**	**100,00**	**102,80**	**1,92**	**38,77**

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 (Pertengahan tahun/Juni)

Tingkat kepadatan penduduk di wilayah Maluku pada tahun 2019 mencapai 38,77 jiwa/km^2, dengan kepadatan di Provinsi Maluku Utara sebesar 39,27 Jiwa/km^2 lebih besar dibanding kepadatan di Provinsi Maluku sebesar 38,43 Jiwa/km^2. Laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010-2019 di wilayah Maluku mencapai 1,92 persen, dengan Laju pertumbuhan di Provinsi Maluku Utara (2,08%) lebih tinggi dibanding Maluku (1,75%).

Kepadatan penduduk wilayah Maluku pada tahun 2015 sebesar 36,05 jiwa/Km^2 meningkat sebesar 2,72 jiwa/km^2 menjadi 38,77 jiwa/km^{2}pada tahun 2019. Pada periode 2015-2019, peningkatan kepadatan penduduk di Provinsi Maluku sebesar 2,54 jiwa/km^2, sedangkan di Provinsi Maluku Utara sebesar 2,99 jiwa/km^2.

Tabel 11:
Perkembangan Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan *Dependency Ratio* Antarprovinsi di Wilayah Maluku

Provinsi	Penduduk (ribu jiwa)			Kepadatan Penduduk (Jiwa per km^2			Dependency Ratio		
	2015	2019	Δ ('15-'19)	2015	2019	Δ ('15-'19)	2015	2020	Δ ('10-'20)
Maluku	1.683,86	1.802,90	119,04	35,89	38,43	2,54	59,7	58,2	-1,5
Maluku Utara	1.160,28	1.255,80	95,52	36,28	39,27	2,99	58,5	56,0	-2,5
MALUKU	**2.844,13**	**3.058,70**	**214,57**	**36,05**	**38,77**	**2,72**			

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

Angka beban tanggungan (*dependency ratio*) di wilayah Maluku masih berada di atas 50 persen, artinya masih lebih banyak kelompok usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dibanding usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun). Angka beban tanggungan di Provinsi Maluku sebesar 58,2 persen, lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Maluku Utara sebesar 56,0 persen.

Gambar 11:

Jumlah Penduduk dan *Dependency Ratio* Antarprovinsi di Wilayah Maluku

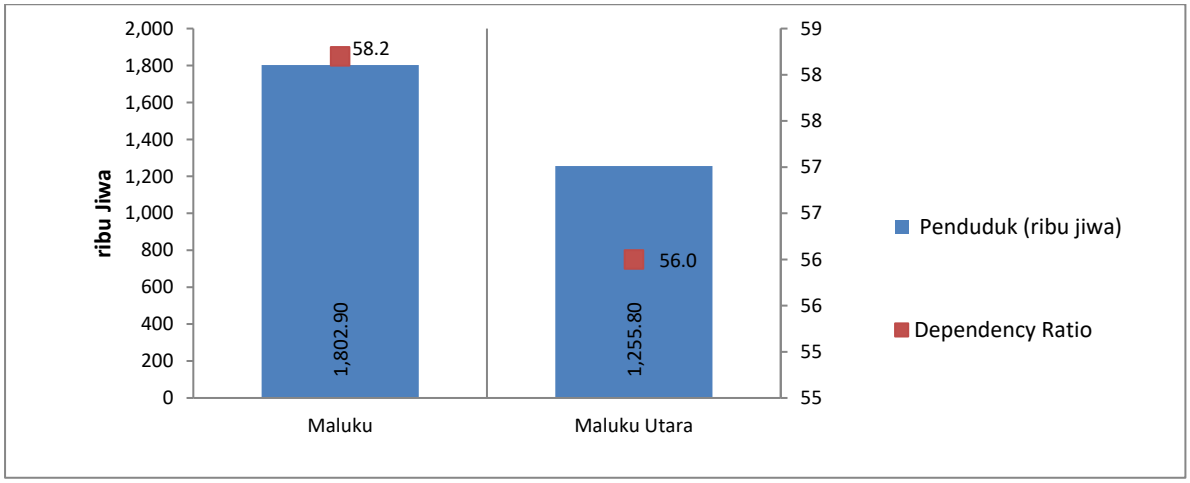

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

2.2. Ketenagakerjaan

Angkatan Kerja. Total angkatan kerja di wilayah Maluku pada Februari 2020 sebanyak 1,3 juta orang atau meliputi 0,94 persen dari total angkatan kerja di Indonesia. Perkembangan selama periode 2015-2020 Provinsi Maluku dan Maluku Utara menunjukkan peningkatan, dengan peningkatan di Provinsi Maluku sebesar 39.578 orang lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Maluku Utara sebesar 31.257 orang.

Tabel 12:

Perkembangan Angkatan Kerja Antarprovinsi di Wilayah Maluku Periode 2015-2020

Provinsi	Angkatan Kerja						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Δ('15-'20)
Maluku	711.056	733.337	769.108	772.174	764.939	750.634	39.578
Maluku Utara	518.982	530.721	557.120	587.972	544.980	550.239	31.257
MALUKU	**1.230.038**	**1.264.058**	**1.326.228**	**1.360.146**	**1.309.919**	**1.300.873**	**70.835**

Sumber : Sakernas Februari 2015- 2020, BPS

Angkatan Kerja di Perdesaan-perkotaan. Menurut distribusinya sebanyak 816,08 ribu orang berada di perdesaan atau 62,73 persen dari total angkatan kerja. Perkembangan angkatan kerja pada periode 2015-2020, angkatan kerja di perdesaan dan perkotaan menunjukkan peningkatan pada periode 2016-2018, dan terjadi penurunan pada periode 2018-2020. Persentase angkatan kerja di perdesaan Provinsi Maluku Utara sebesar 70,57 persen, lebih tinggi dibanding di Provinsi Maluku sebesar 56,99 persen.

Gambar 12:
Perkembangan Angkatan Kerja di Wilayah Maluku Menurut Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015-2020

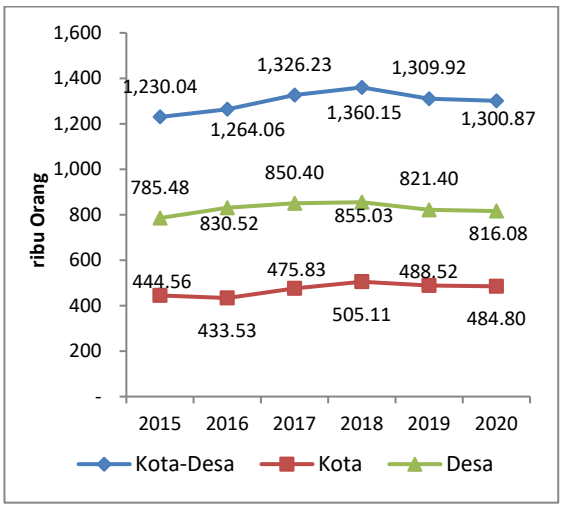

Gambar 13:
Penyebaran Angkatan Kerja Antarprovinsi menurut Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020

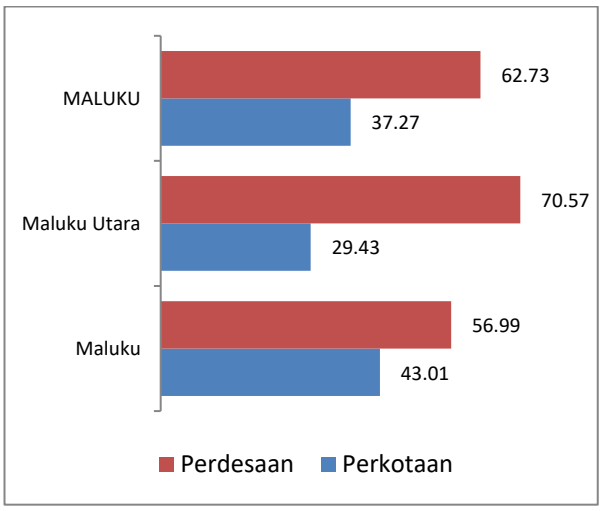

Sumber : Sakernas Februari 2015- 2020, BPS

Bekerja menurut lapangan Pekerjaan Utama. Berdasarkan 17 jenis lapangan pekerjaan utama, penduduk wilayah Maluku sebagian besar bergerak pada jenis pekerjaan: (i) pertanian, kehutanan dan perikanan (39,87%), (ii) perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (17,20%), serta (iii) industri pengolahan (8,07%). Perkembangan pekerja antara tahun 2015 dan 2020 meningkat sebesar 2,84 juta orang atau tumbuh sebesar 11,24 persen. Peningkatan tersebut terjadi pada setiap jenis lapangan pekerjaan utama, kecuali untuk jenis pekerjaan jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh (-10,86%), serta jasa persewaan bangunan menunjukkan sedikit penurunan yang tumbuh (-36,94%), lihat **Gambar 14.**

Gambar 14:
Penduduk Wilayah Maluku menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2015 dan 2020

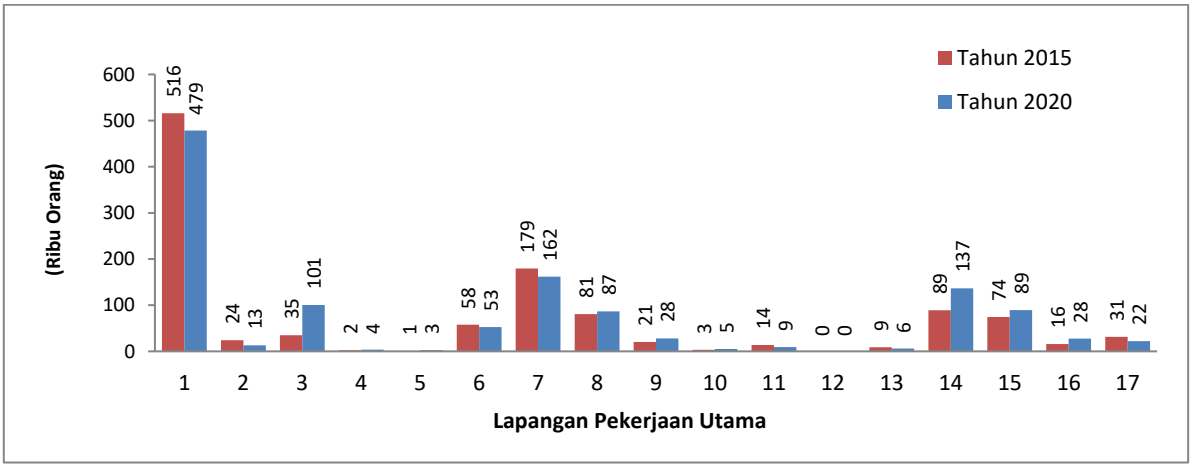

Sumber: Sakernas Februari 2015-2020,BPS

Keterangan:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2.Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Pengadaan Listrik dan Gas; 5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; 6.Bangunan; 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; 8. Transportasi dan Pergudangan; 9. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum; 10. Informasi dan Komunikasi; 11. Jasa Keuangan dan Asuransi; 12. Jasa Persewaan Bangunan; 13. Jasa Perusahaan; 14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; 15. Jasa Pendidikan; 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17. Jasa Lainnya.

Pada tahun 2020, penduduk wilayah Maluku dengan jenis pekerjaan pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 478.609 orang, sebagian besar dilakukan di perdesaan (86,50%), dan jenis pekerjaan perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebanyak 161.842 orang yang sebagian besar dilakukan di perkotaan (55,29%). Jenis pekerjaan lainnya yang dominan dilakukan di perdesaan adalah pertambangan dan penggalian (78,67%), industri pengolahan (71,45%), pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (86,26%), bangunan (67,50%), dan jasa pendidikan 55,69%).

Perkembangan pekerja antara tahun 2015 dan 2020 peningkatan paling dominan terjadi pada lapangan pekerjaan: pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang dengan pertumbuhan sebesar 337,36 persen, dan industri pengolahan (187,83%). Sementara itu penurunan pertumbuhan tertinggi terjadi pada jenis lapangan pekerjaan pertambangan dan penggalian (-45,01%), jasa keuangan dan asuransi (-31,96%), dan jasa perusahaan (-30,38%), lihat **Tabel 13**.

Tabel 13:

Penduduk Wilayah Maluku menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Perdesaan- Perkotaan Tahun 2015 dan 2020

Lapangan Pekerjaan Utama	2015				2020				Δ ('15-'20) (orang)	Tumbuh ('15-'20) (%)
	Pekerja		Kota (%)	Desa (%)	Pekerja		Kota (%)	Desa (%)		
	Jumlah (orang)	%			Jumlah (orang)	%				
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	516.020	44,74	17,04	82,96	478.609	39,08	13,50	86,50	-37.411	-7,25
2.Pertambangan dan Penggalian	24.025	2,08	22,69	77,31	13.211	1,08	21,33	78,67	-10.814	-45,01
3. Industri Pengolahan	34.920	3,03	35,59	64,41	100.511	8,21	28,55	71,45	65.591	187,83
4. Pengadaan Listrik dan Gas	2.455	0,21	92,71	7,29	3.870	0,32	56,43	43,57	1.415	57,64
5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	629	0,05	-	100,0	2.751	0,22	13,74	86,26	2.122	337,36
6. Bangunan	57.973	5,03	40,78	59,22	52.537	4,29	32,50	67,50	-5.436	-9,38
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	179.407	15,55	61,87	38,13	161.842	13,21	55,29	44,71	-17.565	-9,79
8. Transportasi dan Pergudangan	80.542	6,98	55,35	44,65	86.715	7,08	59,41	40,59	6.173	7,66
9. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	20.533	1,78	43,69	56,31	28.096	2,29	70,22	29,78	7.563	36,83
10. Informasi dan Komunikasi	3.229	0,28	100,00	-	5.036	0,41	64,44	35,56	1.807	55,96
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	13.817	1,20	40,10	59,90	9.401	0,77	85,54	14,46	-4.416	-31,96
12. Jasa Persewaan Bangunan		-								
13. Jasa Perusahaan	8.988	0,78	78,28	21,72	6.257	0,51	63,24	36,76	-2.731	-30,38
14.Adm.Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	89.000	7,72	52,77	47,23	136.687	11,16	60,22	39,78	47.687	53,58
15. Jasa Pendidikan	74.358	6,45	34,96	65,04	89.371	7,30	44,31	55,69	15.013	20,19
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16.024	1,39	52,05	47,95	27.659	2,26	49,88	50,12	11.635	72,61
17. Jasa Lainnya	31.493	2,73	72,66	27,34	22.174	1,81	61,73	38,27	-9.319	-29,59
TOTAL	**1.153.413**	**100,0**	**36,09**	**63,91**	**1.224.727**	**100,0**	36,02	63,98	71.314	6,18

Sumber: Sakernas Februari 2015-2020,BPS

Lapangan pekerjaan utama antarprovinsi di wilayah Maluku memiliki pekerja paling dominan pada jenis lapangan pekerjaan pertanian, kehutanan dan perikanan, dengan persentase tertinggi berada di Provinsi Maluku Utara (41,16%). Jenis lapangan pekerjaan lainnya yang cukup tinggi adalah perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang sedikit lebih banyak berada di Provinsi Maluku (13,21%), serta pekerjaan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial yang sedikit lebih banyak berada di Provinsi Maluku Utara (11,39%).

Gambar 15:

Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Penduduk Antarprovinsi Wilayah Maluku Tahun 2020

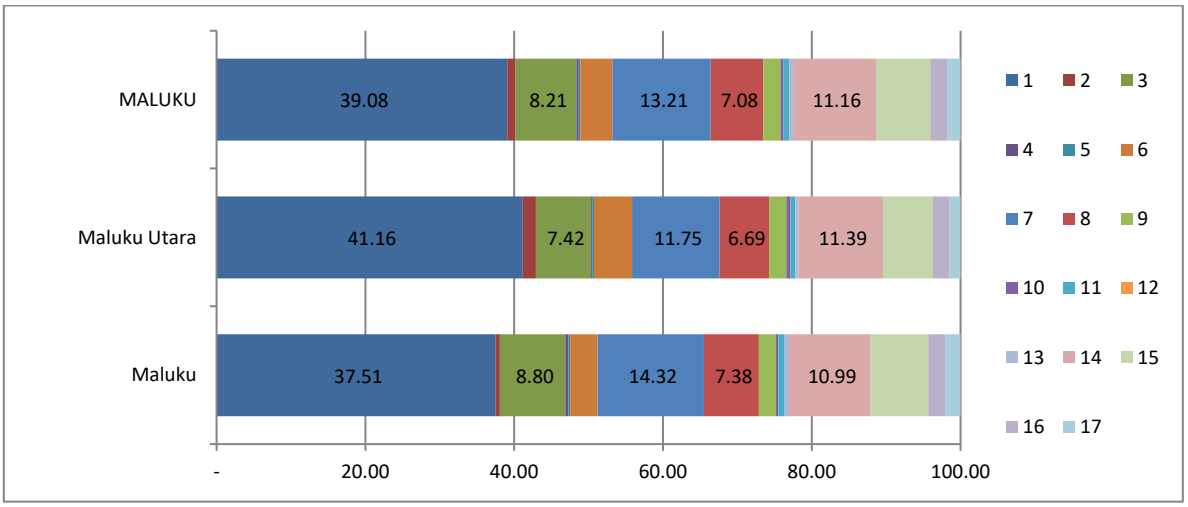

Sumber: Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Keterangan:
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2.Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Pengadaan Listrik dan Gas; 5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; 6.Bangunan; 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; 8. Transportasi dan Pergudangan; 9. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum; 10. Informasi dan Komunikasi; 11. Jasa Keuangan dan Asuransi; 12. Jasa Persewaan Bangunan; 13. Jasa Perusahaan; 14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; 15. Jasa Pendidikan; 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17. Jasa Lainnya.

Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama. Berdasarkan 7 jenis status pekerjaan utama pada tahun 2020, penduduk wilayah Maluku sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai (34,13%), berusaha sendiri (24,58%), serta berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (15,60%). Perkembangan status pekerja utama antara tahun 2015 dan 2020 meningkat sebesar 71.314 orang atau tumbuh sebesar 6,18 persen. Peningkatan tersebut hanya terjadi pada status pekerjaan utama buruh/karyawan/ pegawai sebanyak 57.660 orang atau dengan pertumbuhan sebesar 16 persen, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebanyak 35.724 orang atau dengan pertumbuhan 17,82 persen (**Gambar 16**).

Gambar 16:

Penduduk Wilayah Maluku menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2015 dan 2020

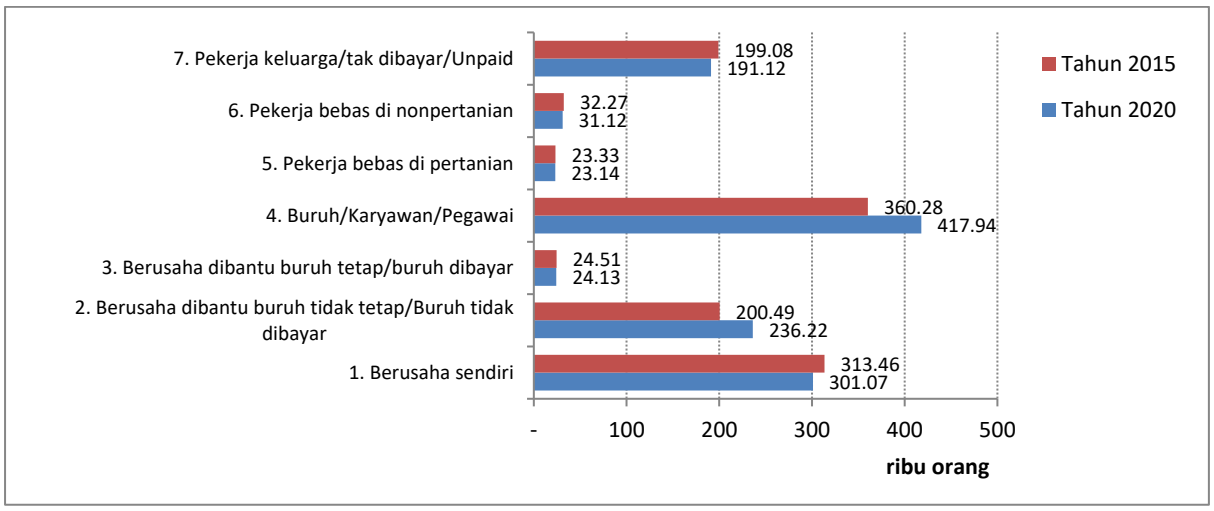

Sumber: Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Pada tahun 2020, status pekerjaan yang dominan di perkotaan hanya jenis pekerjaan buruh/karyawan/pegawai (51,52%), sementara itu untuk jenis pekerjaan lainnya sebagian besar berada di perdesaan, terutama untuk jenis status pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (80,97%). Pekerja keluarga/tak dibayar (80,29%), dan pekerja bebas di pertanian (79,88%).

Tabel 14:

Penduduk Wilayah Maluku menurut Status Pekerjaan Utama dan Perdesaan- Perkotaan Tahun 2015 dan 2020

Lapangan Pekerjaan Utama	2015				2020				Δ ('15-'20) (orang)	Tumbuh ('15-'20) (%)
	Pekerja		Kota (%)	Desa (%)	Pekerja		Kota (%)	Desa (%)		
	Jumlah (orang)	%			Jumlah (orang)	%				
1. Berusaha sendiri	313.455	27,18	40,07	59,93	301.065	24,58	38,76	61,24	-12.390	-3,95
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/Buruh tidak dibayar	200.491	17,38	22,72	77,28	236.215	19,29	19,03	80,97	35.724	17,82
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	24.506	2,12	27,65	72,35	24.133	1,97	44,62	55,38	-373	-1,52
4. Buruh/Karyawan/Pegawai	360.281	31,24	50,10	49,90	417.941	34,13	51,52	48,48	57.660	16,00
5. Pekerja bebas di pertanian	23.330	2,02	8,99	91,01	23.140	1,89	20,12	79,88	-190	-0,81
6. Pekerja bebas di nonpertanian	32.271	2,80	44,03	55,97	31.118	2,54	35,72	64,28	-1.153	-3,57
7. Pekerja keluarga/tak dibayar	199.079	17,26	20,85	79,15	191.115	15,60	19,71	80,29	-7.964	-4,00
MALUKU	**1.153.413**	**100,0**	**36,09**	**63,91**	**1.224.727**	**100,0**	**36,02**	**63,98**	**71.314**	**6,18**

Sumber: Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Status pekerjaan utama antarprovinsi di wilayah Maluku paling dominan pada status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai, dengan persentase lebih tinggi di Provinsi Maluku Utara (35,57%). Jenis status pekerjaan lainnya yang cukup tinggi adalah berusaha sendiri dengan persentase di Provinsi Maluku (26,27%) lebih tinggi dibanding Maluku Utara (22,34%), dan status pekerjaan berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar yaitu sebesar 19,51 persen di Provinsi Maluku dan 19 persen di Provinsi Maluku Utara.

Gambar 17:

Status Pekerjaan Utama Penduduk Antarprovinsi Wilayah Maluku Tahun 2020

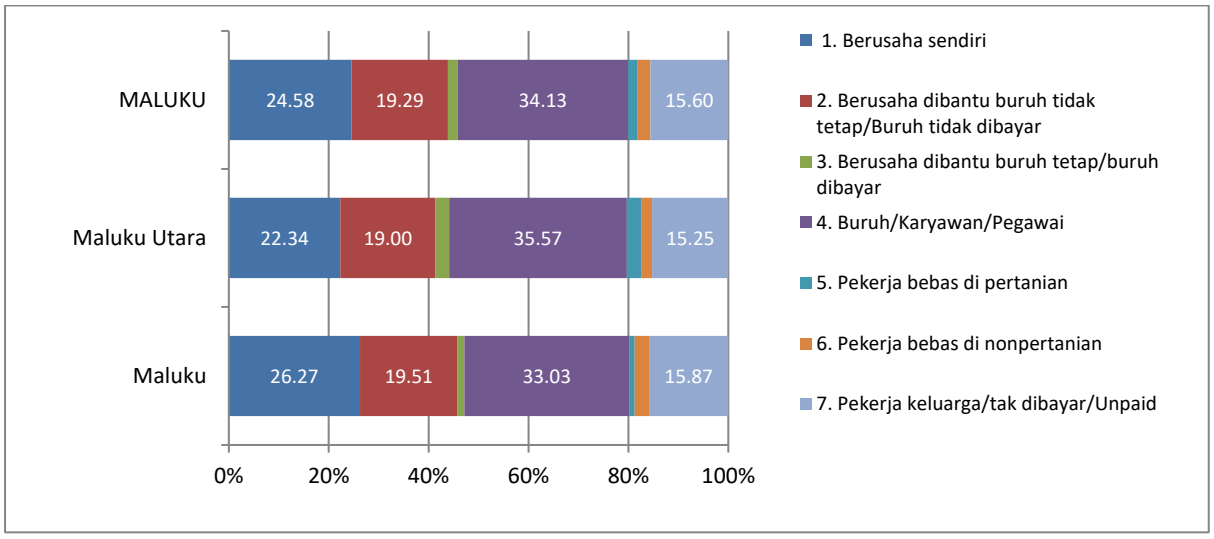

Sumber: Sakernas Februari 2015-2020, BPS

PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

Pendidikan

- *Rata-rata Lama sekolah (RLS) Provinsi Maluku sebesar 9,81 tahun lebih tinggi dari Provinsi Maluku Utara sebesar 9,00 tahun. Sementara itu, berdasarkan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Maluku sebesar 13,94 tahun, lebih tinggi dibanding Provinsi Maluku Utara (13,63 tahun), dan sudah berada di atas HLS Nasional (12,95 tahun).*
- *Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok usia anak 07 - 24 tahun sesuai dengan jenjang pendidikan, di Provinsi Maluku dan Maluku Utara sudah berada di atas rata-rata Nasional. APS kelompok usia 16-18 tahun di Provinsi Maluku (79,65%) lebih tinggi dari Provinsi Maluku Utara (76,41%), dan untuk APS kelompok usia 19-24 tahun di Provinsi Maluku (38,58%) lebih tinggi dari Provinsi Maluku Utara (31,23%).*
- *Berdasarkan rata-rata rasio murid dan guru, serta murid per-rombongan belajar sekolah antarprovinsi di wilayah Maluku telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan pemerintah.*
- *Hampir diseluruh provinsi di wilayah Maluku di setiap jenjang sekolah memiliki bangunan rusak (rusak ringan dan berat) hingga melebihi angka di atas 50 persen. Kondisi bangunan rusak ringan dan berat tersebut, tertinggi untuk jenjang sekolah SD Provinsi Maluku Utara (78,37%) dan Provinsi Maluku (73,25%).*
- *Penggunaan komputer oleh siswa umur 5-24 tahun di perkotaan Provinsi Maluku sebesar 29,54 persen, lebih tinggi dibanding Provinsi Maluku Utara (28,44%), sedangkan di perdesaan Provinsi Maluku (7,39%) dan Provinsi Maluku Utara (4,12%). Sementara itu, untuk pengguna internet di perkotaan di Provinsi Maluku Utara sebesar 53,48 persen, lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Maluku (53,25%), sedangkan di perdesaan Provinsi Maluku sebesar 19,67 persen, lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Maluku Utara (16,36%).*

Kesehatan

- *Umur Harapan Hidup pada tahun 2019 di Provinsi Maluku (65,82 tahun) dan Maluku Utara (68,18 tahun) masih berada di bawah UHH Nasional (71,34 tahun).*
- *Berdasarkan Data Riskesdas 2018, prevalensi gizi buruk dan gizi kurang bayi berusia di bawah lima tahun (Balita usia 0-59 bulan), tertinggi di Provinsi Maluku (24,90%) yang terdiri dari 7,4 persen gizi buruk dan 17,5 persen gizi kurang. Sedangkan untuk prevalensi balita sangat pendek dan pendek (Stunting), tertinggi di Provinsi Maluku sebesar 34,0 persen yang terdiri dari 12,5 persen balita sangat pendek dan 21,5 persen balita pendek.*
- *Jumlah kasus tuberculosis antarprovinsi pada tahun 2019, di Provinsi Maluku sebanyak 3.673 kasus lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Maluku Utara (2.057 kasus).*
- *Jumlah kasus baru HIV kumulatif periode 2015-2019, tertinggi di Provinsi Maluku sebanyak 2.642 kasus, dan untuk kasus baru Aids hingga Desember 2019 sebanyak 774 kasus, sementara di Provinsi Maluku Utara jumlah kasus baru HIV kumulatif mencapai 777 kasus, sedangkan untuk kasus baru AIDS sebanyak 698 kasus.*
- *Distribusi puskesmas terakreditasi dan memiliki rawat inap terbanyak terdapat di Provinsi Maluku masing-masing sebanyak 132 dan 156 puskesmas. Sedangkan berdasarkan persentase puskesmas memiliki fasilitas rawat inap dan terakreditasi, persentase tertinggi terdapat di Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 69,39 persen memiliki rawat inap dan 76,87 persen terakreditasi.*
- *Provinsi Maluku dan Maluku Utara masih memiliki proporsi puskesmas dengan kekurangan dokter umum dan dan dokter gigi, puskesmas kekurangan dokter gigi mencapai 74,1 persen di Provinsi Maluku Utara, dan 83,89 persen di Provinsi Maluku, dan prsentase puskesmas kekurangan dokter di Provinsi Maluku sebesar 51,66 persen, dan di Provinsi Maluku Utara sebesar 48,2 persen.*

03 Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat

3.1. Pendidikan

1.1. Kondisi pendidikan Masyarakat.

Rata-rata Lama sekolah (RLS) antarprovinsi di Wilayah Maluku tahun 2019 sudah berada di atas RLS nasional (8,34 tahun), dengan rincian RLS Provinsi Maluku sebesar 9,81 tahun lebih tinggi dari Provinsi Maluku Utara sebesar 9,00 tahun. Sementara itu, berdasarkan indikator **Harapan Lama Sekolah (HLS)** yang menunjukkan peluang lamanya bersekolah bagi anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal, HLS di Provinsi Maluku sebesar 13,94 tahun, lebih tinggi dibanding Provinsi Maluku Utara (13,63 tahun), dan sudah berada di atas HLS nasional (12,95 tahun).

Gambar 18:
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Antarprovinsi
di Wilayah Maluku Tahun 2019

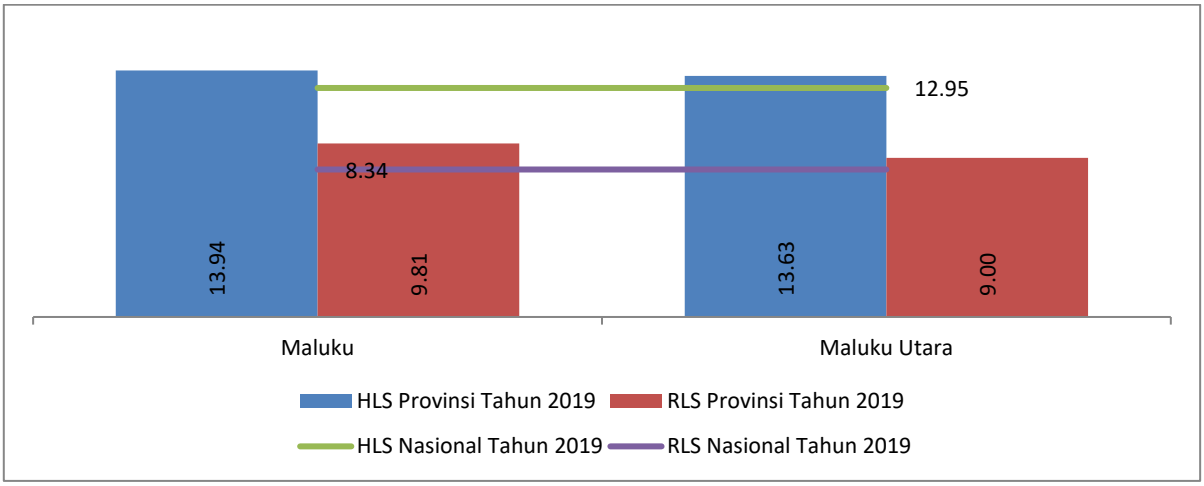

Sumber: Publikasi BPS (bps.go.id) 2019.

Perkembangan HLS dan RLS antarprovinsi di wilayah Maluku pada periode 2015-2019, seluruh provinsi menunjukkan tren peningkatan dengan peningkatan HLS di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,53 tahun lebih tinggi dibanding Provinsi Maluku (0,38 tahun). Sedangkan untuk peningkatan RLS di Provinsi Maluku sebesar 0,65 tahun, lebih tinggi dari peningkatan Provinsi Maluku Utara sebesar 0,63 tahun.

Tabel 15:
Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Antarprovinsi di Wilayah Maluku
Tahun 2015 - 2019

Provinsi	2015		2016		2017		2018		2019		Δ 2015-2019	
	HLS	RLS	HLS	RLS	HLS	RLS	HLS	RLS	HLS	RLS	HLS	RLS
Maluku	13,56	9,16	13,73	9,27	13,91	9,38	13,92	9,58	13,94	9,81	0,38	0,65
Maluku Utara	13,10	8,37	13,45	8,52	13,56	8,61	13,62	8,72	13,63	9,00	0,53	0,63
INDONESIA	**12,55**	**7,84**	**12,72**	**7,95**	**12,85**	**8,10**	**12,91**	**8,17**	**12,95**	**8,34**	**0,40**	**0,50**

Sumber: Publikasi BPS (bps.go.id) 2019.

Perkembangan RLS selama periode 2015-2019, sebagian besar berada di atas rata-rata peningkatan RLS nasional (0,50 tahun), termasuk peningkatan HLS di Provinsi Maluku Utara (0,53 tahun) sudah berada di atas rata-rata peningkatan HLS nasional (0,40 tahun).

Gambar 19:
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia Antarprovinsi di Wilayah Maluku Tahun 2019.

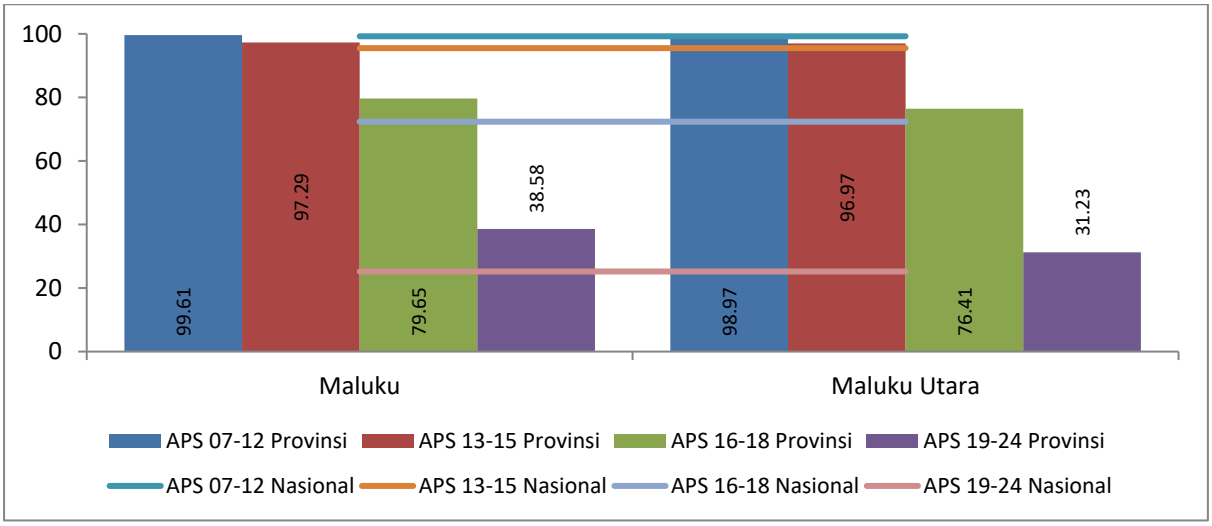

Sumber: Publikasi BPS (bps.go.id) 2019.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) wilayah Maluku tahun 2019 untuk kelompok usia anak 07-12 tahun, Provinsi Maluku dan Maluku Utara sudah berada di atas rata-rata nasional (99,24%), dengan APS tertinggi di Provinsi Maluku Utara sebesar 99,97 persen. Hal yang sama untuk APS kelompok usia 13-15 tahun, Provinsi Maluku dan Maluku Utara sudah berada di atas rata-rata APS nasional (95,51%), dengan APS Provinsi Maluku sebesar 97,29 persen dan APS Maluku Utara (96,97%). Untuk APS 16-18 tahun dan APS 19-24 tahun Provinsi Maluku dan Maluku Utara sudah berada di atas APS nasional, dengan rincian APS kelompok usia 16-18 tahun di Provinsi Maluku (79,65%) lebih tinggi dari Provinsi Maluku Utara (76,41%), dan untuk APS kelompok usia 19-24 tahun di Provinsi Maluku (38,58%) lebih tinggi dari Provinsi Maluku Utara (31,23%).

Tabel 16:
Perkembangan Angka Partisipasi sekolah (APS) menurut Kelompok Usia Antarprovinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015-2019

Provinsi	APS (07-12)			APS (13-15)			APS (16-18)			APS (19-24)		
	2015	2019	Δ	2015	2019	Δ	2015	2019	Δ	2015	2019	Δ
Maluku	99,38	99,61	0,23	96,44	97,29	0,85	77,87	79,65	1,78	36,6	38,58	1,98
Maluku Utara	99,08	98,97	-0,11	96,68	96,97	0,29	75,16	76,41	1,25	31,25	31,23	-0,02
INDONESIA	**99,09**	**99,24**	**0,15**	**94,72**	**95,51**	**0,79**	**70,61**	**72,36**	**1,75**	**22,95**	**25,21**	**2,26**

Sumber: Publikasi BPS (bps.go.id) 2019.

Berdasarkan perkembangan APS menurut kelompok usia selama periode 2015-2019, Provinsi Maluku menunjukkan peningkatan diseluruh kelompok APS, dengan peningkatan tertinggi pada kelompok APS 19-24 tahun (1,98 %). Sedangkan untuk APS di Provinsi Maluku Utara menunjukkan penurunan APS kelompok usia 07-12 tahun sebesar (-0,11%), dan kelompok usia 19-24 tahun (0,02%).

1.2. Pelayanan Pendidikan

Kondisi dan Kecukupan Ruang Kelas. Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SM, SMK, menyebutkan bahwa pada jenjang SD satu rombel layaknya mencakup 20-28 peserta didik (murid), jenjang SMP mencakup 20-32 murid, jenjang SMA mencakup 20-36 murid, dan SMK mencakup 15-36 murid. Berdasarkan batasan tersebut, secara rata-rata rasio Murid dan Guru, serta murid per rombongan belajar sekolah antarprovinsi di wilayah Maluku telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan tersebut.

Tabel 17:

Gambaran Rasio Murid-Guru, Murid-Rombel, Rombel-Kelas menurut Jenjang Pendidikan di Wilayah Maluku Tahun 2019

Provinsi	SD			SMP			SMA			SMK		
	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid -Rombel	Rasio Rombel -Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid -Rombel	Rasio Rombel -Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid -Rombel	Rasio Rombel -Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid -Rombel	Rasio Rombel -Kelas
Maluku	13	19	1,06	11	25	0,98	12	25	1,05	9	20	1,13
Maluku Utara	14	18	1,05	11	24	1,01	12	26	1,04	9	19	1,06
NASIONAL	**16**	**22**	**1,06**	**15**	**28**	**0,98**	**15**	**29**	**1,01**	**16**	**27**	**1,11**
KETENTUAN*	**20**	**20-28**	**1**	**20**	**20-32**	**1**	**20**	**20-36**	**1**	**15**	**15-36**	**1**

Berdasarkan rasio rombel per kelas, idealnya menunjukkan jumlah rombel sama dengan jumlah kelas yang tersedia. Hal ini menandakan tidak ada ruang kelas yang digunakan sebagai sarana belajar untuk dua atau lebih rombel yang berbeda. Kondisi tersebut hanya dipenuhi oleh sekolah jenjang SMP di Provinsi Maluku (0,98), sementara untuk jenjang sekolah lainnya dikedua provinsi masih berada di atas ketentuan (>1).

Kondisi Bangunan Sekolah. Penyediaan sarana dan prasarana sekolah harus sesuai standar mutu pendidikan yang telah ditentukan, sehingga akan mendukung proses pembelajaran yang lebih kondusif. Namun demikian, ruang kelas yang ada masih didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak, baik rusak ringan/sedang maupun rusak berat/total (**Tabel 18**).

Tabel 18:

Kondisi Bangunan Sekolah menurut Jenjang Pendidikan TA. 2018/2019 di Wilayah Maluku

Provinsi	SD			SMP			SMA			SMK		
	Baik	Rusak		Baik	Rusak		Baik	Rusak		Baik	Rusak	
		Ringan/ Sedang	Berat/ Total		Ringan/ Sedang	Berat/ Total		Ringan/ Sedang	Berat/ Total		Ringan/ Sedang	Berat/ Total
Maluku	26,75	59,99	13,26	26,95	61,07	11,98	33,96	58,2	7,84	46,81	49,24	3,94
Maluku Utara	21,63	62,78	15,59	27,36	57,83	14,81	27,99	64,17	7,84	42,31	55,29	2,4

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hampir diseluruh provinsi di wilayah Maluku di setiap jenjang sekolah memiliki bangunan rusak (rusak ringan dan berat) hingga melebihi angka di atas 50 persen. Kondisi bangunan rusak ringan dan berat tersebut, tertinggi untuk jenjang sekolah SD di Provinsi Maluku Utara (78,37%) dan Provinsi Maluku (73,25%). Sementara itu, untuk jenjang sekolah SMK menunjukkan persentase bangunan sekolah rusak ringan dan berat relatif lebih rendah dibanding jenjang sekolah lainnya.

Ketersediaan dan Pendidikan Guru. Beban kerja guru dapat dilihat dengan menghitung rasio murid-guru yang menggambarkan jumlah murid terhadap jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) telah memiliki acuan dalam menentukan rasio murid-guru pada setiap jenjang pendidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut rasio pada agregat per provinsi secara umum telah dipenuhi oleh kedua provinsi di wilayah Maluku.

Berdasarkan aspek pendidikan guru/kepala sekolah yang dianggap layak adalah minimal berpendidikan D4/S1. Berdasarkan batasan tersebut, tertinggi dipenuhi oleh guru/ kepala sekolah jenjang SMA di Provinsi Maluku Utara (96,55%), berikutnya untuk jenjang sekolah SMK di Provinsi Maluku (88,52%), dan jenjang SMP di Provinsi Maluku Utara (87,73%).

Gambar 20:

Persentase Guru/kepala Sekolah Minimal Berijazah D4/S1 menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan
Tahun Ajaran 2018/2019

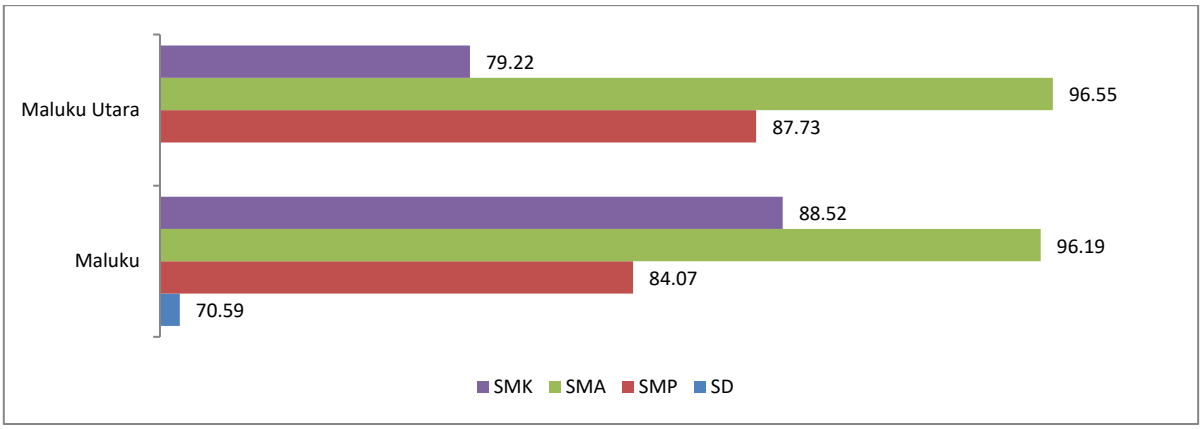

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Akses Teknologi Informasi Siswa. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, perangkat komputer beserta internet sudah menjadi kebutuhan siswa dalam meningkatkan wawasan pengetahuan umum, serta kemudahan dalam mempelajari dan menggali pengetahuan baru disamping materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. Berdasarkan persentase siswa umur 5-24 tahun yang menggunakan komputer dan internet selama tiga bulan terakhir, di wilayah perkotaan dan perdesaan di wilayah Maluku masih berada di bawah rata-rata nasional. Penggunan komputer di Provinsi Maluku memiliki persentase sebesar 29,54 persen, lebih tinggi dibanding Provinsi Maluku Utara (28,44%). Sedangkan untuk perdesaan pengguna komputer di Provinsi Maluku (7,39%) dan Provinsi Maluku Utara (4,12%). Sementara itu, untuk pengguna internet di perkotaan di Provinsi Maluku Utara sebesar 53,48 persen, lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Maluku (53,25%), sedangkan di perdesaan Provinsi Maluku sebesar 19,67 persen, lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Maluku Utara (16,36%).

Tabel 19:

Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Komputer dan Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi

Provinsi	Menggunakan Komputer*			Menggunakan Internet*		
	K	D	K + D	K	D	K + D
Maluku	29,54	7,39	17,45	53,25	19,67	34,91
Maluku Utara	28,44	4,12	11,38	53,48	16,36	27,45
INDONESIA	**31,37**	**15,43**	**24,52**	**62,51**	**40,53**	**53,06**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Sementara itu pada **Gambar 21**, penggunaan internet siswa dari setiap tingkatan (SD sampai dengan Perguruan Tinggi) menunjukkan besaran persentase sesuai dengan tingkat Pendidikan, dengan penggunan tertinggi pada jenjang perguruan tinggi yaitu di Provinsi Maluku (82,78%), berikutnya untuk jenjang SM/Sederajat di Provinsi Maluku (62,31%), jenjang SMP di Provinsi Maluku (37,45%), dan jenjang SD Provinsi Maluku Maluku (11,29%).

Gambar 21:

Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tahun 2019

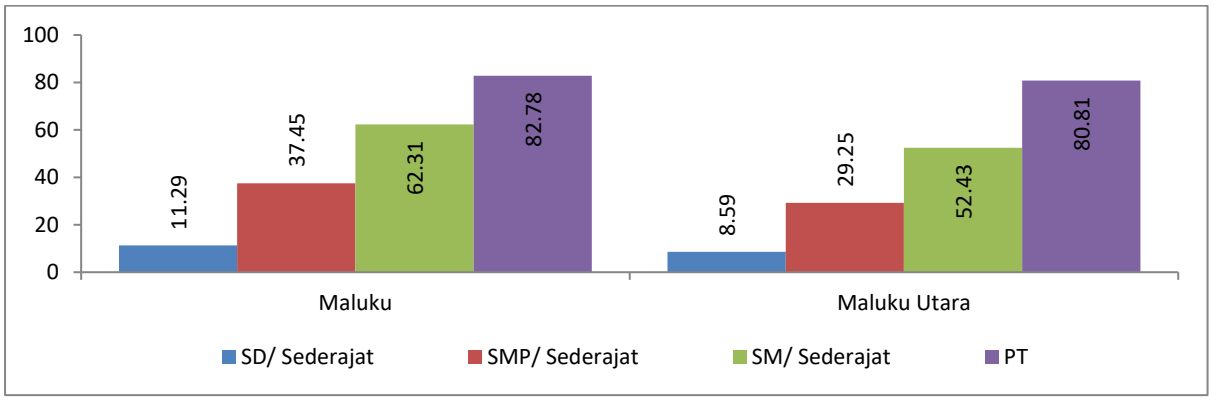

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

3.2. Kesehatan

Kesehatan. Perkembangan kondisi kesehatan penduduk antarprovinsi di Wilayah Maluku selama periode tahun 2015-2019 menunjukkan kondisi perbaikan yang diindikasikan oleh menurunnya Status Gizi Buruk pada balita, dan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Sementara untuk prevalensi penyakit menular diindikasikan oleh jumlah kasus tuberculosis, HIV dan AIDS yang masih menunjukkan kecenderungan peningkatan sejalan dengan pelaporan kasus di daerah.

3.2.1. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2019 di Provinsi Maluku (65,82 tahun) dan Maluku Utara (68,18 tahun) masih berada di bawah UHH nasional (71,34 tahun). Peningkatan UHH selama periode 2015-2019, di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,74 Tahun lebih tinggi dibanding dengan peningkatan di Provinsi Maluku (0,51 tahun) dan peningkatan UHH nasional sebesar 0,56 tahun.

Gambar 22:

Umur Harapan Hidup (UHH) Antarprovinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015-2019

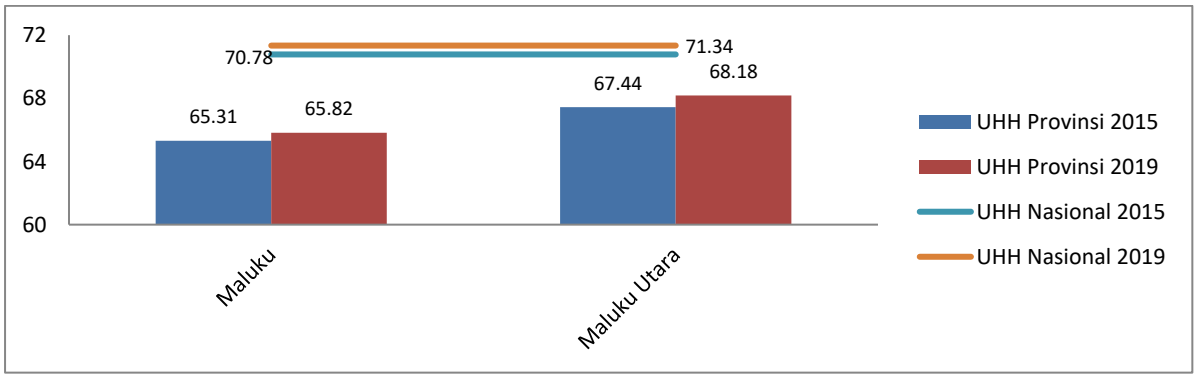

Sumber: Publikasi BPS (bps.go.id) 2020.

3.2.2. Status Gizi Balita

Gizi Buruk dapat terjadi pada semua kelompok umur, tetapi yang perlu lebih diperhatikan pada kelompok bayi dan balita. Pada usia 0-2 tahun merupakan masa tumbuh kembang yang optimal *(golden period)* terutama untuk pertumbuhan janin sehingga bila terjadi gangguan pada masa ini tidak dapat dicukupi pada masa berikutnya dan akan berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus.

Status gizi balita dapat diukur dengan indeks berat badan per umur (BB/U), tinggi badan per umur (TB/U) dan berat badan per tinggi badan (BB/TB). Berdasarkan Data Riskesdas 2018, prevalensi Gizi buruk dan gizi kurang bayi berusia di bawah lima tahun (balita usia 0-59 bulan) di Wilayah Maluku, angka tertinggi terdapat di Provinsi Maluku sebesar 24,90 persen yang terdiri dari 7,4 persen gizi buruk dan 17,5 persen gizi kurang. Berdasarkan angka status gizi buruk dan sedang tersebut di Provinsi Maluku dan Maluku Utara memiliki angka lebih tinggi dibanding dengan angka nasional (17,7%).

Gambar 23:
Persentase Balita menurut Status Gizi Dengan Indeks Berat Badan (Bb)/ Umur (U)
di Wilayah Maluku Tahun 2018

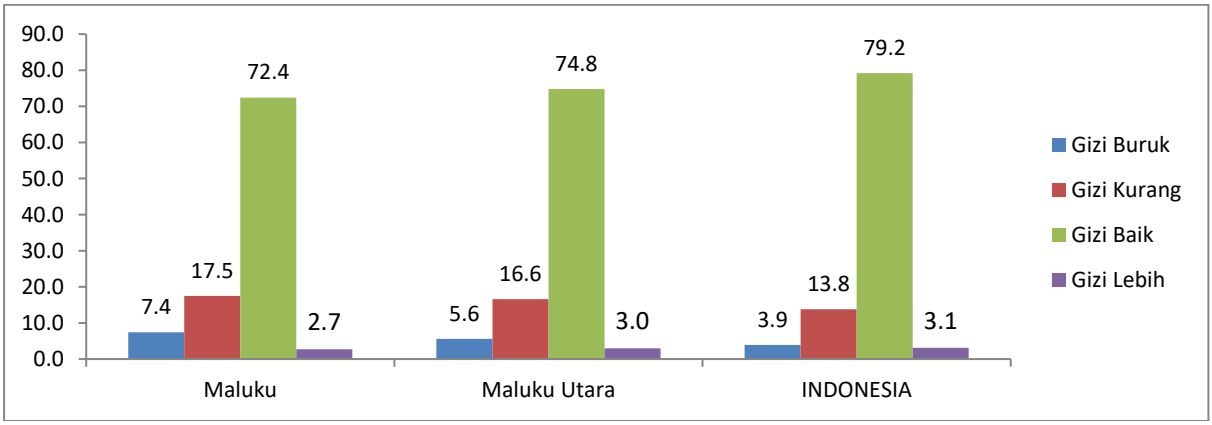

Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Perkembangan status gizi balita pada periode 2013-2018 hampir seluruh provinsi di Wilayah Maluku menunjukkan perkembangan penurunan, dengan penurunan tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara, yaitu gizi buruk menurun sebesar 3,6 persen, dan untuk gizi kurang sebesar 0,9 persen. Sementara itu di Provinsi Maluku menunjukkan penurunan untuk balita gizi buruk (3,1%), namun terjadi peningkatan untuk balita gizi kurang sebesar 0,3 persen. Untuk balita gizi lebih menunjukkan penurunan di kedua provinsi, dengan penurunan tertinggi di provinsi Maluku sebesar 1,8 persen.

Tabel 20:
Perkembangan Persentase Balita menurut Status Gizi Dengan Indeks BB/U di Wilayah Maluku
pada Periode Tahun 2013 – 2018

Provinsi	Gizi Buruk			Gizi Kurang			Gizi Baik			Gizi Lebih		
	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)
Maluku	10,5	7,4	-3,1	17,5	17,8	0,3	67,2	72,4	5,2	4,5	2,7	-1,8
Maluku Utara	9,2	5,6	-3,6	16,6	15,7	-0,9	71,7	74,8	3,1	3,4	3,0	-0,4
INDONESIA	**5,7**	**3,9**	**-1,8**	**13,9**	**13,8**	**-0,1**	**75,9**	**79,2**	**3,3**	**4,5**	**3,1**	**-1,4**

Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Status Gizi Balita Dengan Indeks Tinggi Badan (TB)/Umur (U) - *Stunting*

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Prevalensi balita sangat pendek dan pendek di Wilayah Maluku, angka tertinggi terdapat di Provinsi Maluku sebesar 34,0 persen yang terdiri dari 12,5 persen Balita sangat pendek dan 21,5 persen balita pendek. Angka stunting di Provinsi Maluku dan Maluku Utara (31,4%) masing menunjukkan angka lebih tinggi dibanding angka *stunting* nasional (30,8%).

Gambar 24:
Persentase Balita Usia 0-59 Bulan menurut Status Gizi Dengan Indeks Tinggi Badan (TB)/Umur (U) di Wilayah Maluku Tahun 2018

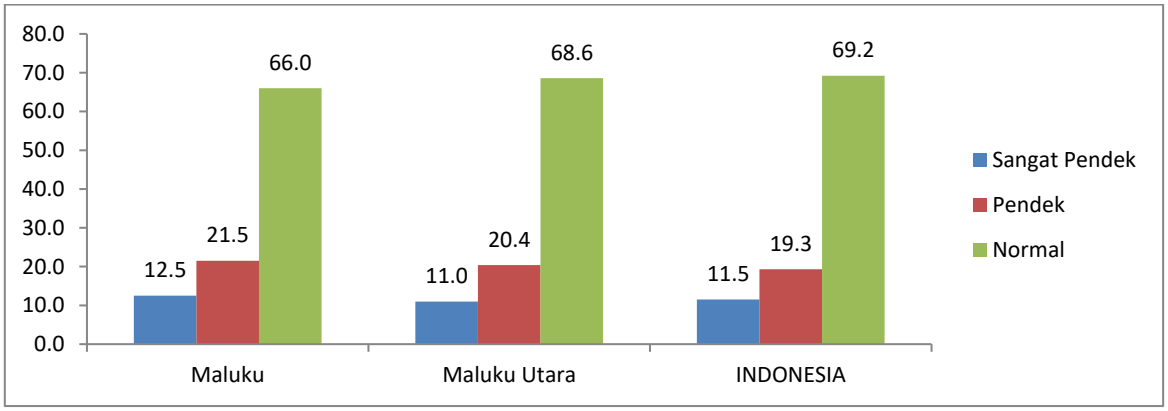

Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Perkembangan proporsi status gizi balita sangat pendek dan pendek (*stunting*) antarprovinsi di Wilayah Maluku selama periode 2013-2018 menunjukkan penurunan untuk balita sangat pendek, dengan penurunan tertinggi terdapat di Provinsi Maluku sebesar 7,9 persen. Pada periode yang sama, balita pendek di Provinsi Maluku Utara berkurang sebesar 2,4 persen, sementara di Provinsi Maluku menunjukkan peningkatan sebesar 1,3 persen.

Tabel 21:
Perkembangan Persentase Balita menurut Status Gizi Dengan Indeks BB/U di Wilayah Maluku Periode Tahun 2013 dan 2018

Provinsi	Sangat Pendek			Pendek			Normal		
	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)
Maluku	20,4	12,5	-7,9	20,2	21,5	1,3	59,4	66,0	6,6
Maluku Utara	18,3	11,0	-7,3	22,8	20,4	-2,4	59,0	68,6	9,6
INDONESIA	18,0	11,5	-6,5	19,2	19,3	0,1	62,8	69,2	6,4

Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Persentase Balita Menurut Status Gizi Dengan Indeks Berat Badan (BB)/Tinggi Badan (TB)

Prevalensi gizi balita sangat kurus dan kurus di Wilayah Maluku menunjukkan angka lebih tinggi dibanding dengan angka nasional (10,2 persen). Persentase balita sangat kurus dan kurus tertinggi terdapat di Provinsi Maluku sebesar 13,1 persen yang terdiri dari 4,0 persen balita sangat kurus dan 9,1 persen balita kurus.

Gambar 25:
Persentase Balita Usia 0-59 Bulan menurut Status Gizi Dengan Indeks Berat Badan (TB)/Tinggi Badan (TB) di Wilayah Maluku Tahun 2018

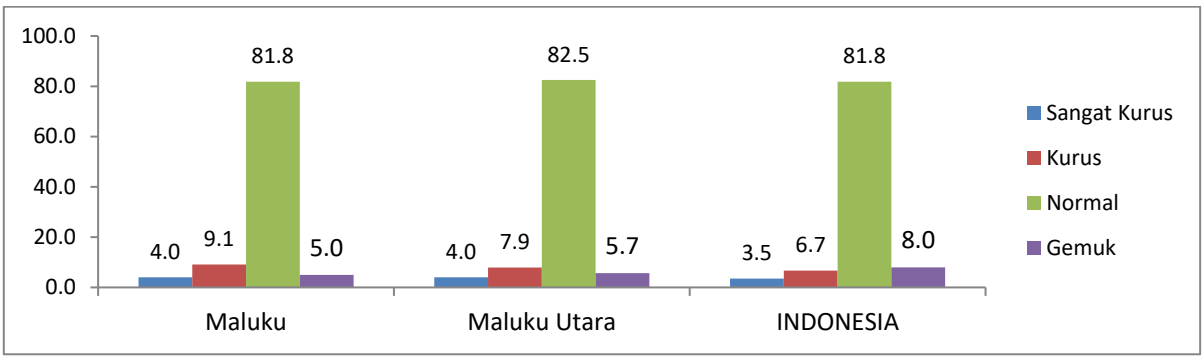

Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Perkembangan proporsi status gizi balita sangat kurus dan kurus antarprovinsi di wilayah Maluku pada periode 2013-2018 menunjukkan penurunan untuk balita sangat kurus di Provinsi Maluku (2,1%), namun terjadi peningkatan di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,1 persen. Sementara itu, untuk balita kurus terjadi penurunan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, dengan penurunan tertinggi di Provinsi Maluku sebesar 1,0 persen. Untuk balita gemuk menunjukkan perkembangan penurunan, dengan penurunan tertinggi di Provinsi Maluku Utara sebesar 1,6 persen.

Tabel 22:
Perkembangan Persentase Balita menurut Status Gizi Dengan Indeks BB/Tinggi Badan (TB) di Wilayah Maluku Periode Tahun 2013 – 2018

Provinsi	Sangat Kurus			Kurus			Normal			Gemuk		
	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)
Maluku	6,1	4,0	-2,1	10,1	9,1	-1,0	77,4	81,8	4,4	6,4	5,0	-1,4
Maluku Utara	3,9	4,0	0,1	8,3	7,9	-0,4	80,5	82,5	2,0	7,3	5,7	-1,6
INDONESIA	5,3	3,5	-1,8	6,8	6,7	-0,1	76,1	81,8	5,7	11,8	8,0	-3,8

Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

3.2.3. Kasus Penyakit Menular

Tuberkulosis. Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*, dan masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan global. Jumlah kasus tuberkulosis pada tahun 2019 di wilayah Maluku ditemukan sebanyak 5.730 kasus, menunjukkan peningkatan sebesar 1.572 kasus bila dibandingkan kasus tuberkulosis pada tahun 2015. Jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 6.267 kasus.

Gambar 26:
Perkembangan Jumlah Kasus Tuberkulosis Di Wilayah Maluku Periode 2015-2019.

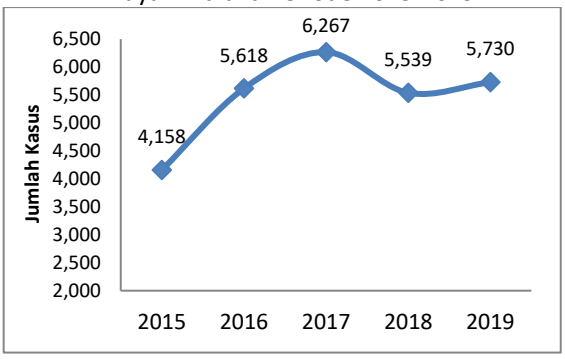

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2019

Jumlah kasus tuberculosis antarprovinsi yang dilaporkan pada tahun 2019, di Provinsi Maluku sebanyak 3.673 kasus lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Maluku Utara (2.057 kasus). Berdasarkan peningkatan jumlah kasus selama periode 2015-2019 di Provinsi Maluku Utara sebanyak 804 kasus, lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Maluku sebesar 768 kasus.

Tabel 23:

Perkembangan Jumlah Kasus Tuberkulosis Antarprovinsi di Wilayah Maluku Periode 2015-2019.

Provinsi	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	Δ '15-'19
Maluku	2.905	3.834	4.341	3.656	3.673	768
Maluku Utara	1.253	1.784	1.926	1.883	2.057	804
MALUKU	**4.158**	**5.618**	**6.267**	**5.539**	**5.730**	**1.572**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes.

Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis atau *Case Notification Rate* (CNR) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu. **Tabel 24** menunjukkan angka notifikasi semua kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk dari tahun 2015-2019. Angka notifikasi semua kasus tuberkulosis pada tahun 2019 tertinggi berada di provinsi Maluku sebesar 204 kasus per 100.000 penduduk, lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Maluku Utara (164 kasus per 100.000 penduduk). Berdasarkan kecenderungan (tren) selama periode 2015-2019, di Provinsi Maluku Utara menunjukkan peningkatan Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis (CNR) sebesar 14 kasus, sedangkan di Provinsi Maluku menunjukkan penurunan sebesar (9 kasus per 100.000 penduduk).

Tabel 24:

Perkembangan Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis atau Case Notification Rate (CNR) Antarprovinsi di Wilayah Maluku Periode 2015-2019

Provinsi	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	Δ '15-'19
Maluku	213	223	249	206	204	-9
Maluku Utara	150	150	159	153	164	14
MALUKU	**363**	**373**	**408**	**359**	**368**	**5**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes.

Penyakit menular HIV/AIDS, merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui layanan konseling dan tes HIV baik secara sukarela (Konseling dan Tes Sukarela/KTS) maupun atas dasar Tes atas Inisiatif Pemberi layanan kesehatan dan Konseling (TIPK). Sedangkan prevalensi HIV pada suatu populasi tertentu dapat diketahui melalui metode sero survey, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).

Jumlah kasus baru HIV kumulatif yang dilaporkan pada periode 2015-2019 antarprovinsi di Wilayah Maluku mencapai 3.419 kasus, dan untuk jumlah kasus Aids kumulatif sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak 1.472 kasus. Kasus baru HIV kumulatif periode 2015-2019, tertinggi di Provinsi Maluku sebanyak 2.642 kasus, dan untuk kasus baru Aids hingga Desember 2019 sebanyak 774 kasus. Sementara di Provinsi Maluku Utara jumlah kasus baru HIV kumulatif mencapai 777 kasus, sedangkan untuk kasus baru AIDS hingga Desember 2019 sebanyak 698 kasus.

Gambar 27:

Kasus baru HIV dan AIDS Komulatif Tahun 2015-2019 Antarprovinsi di Wilayah Maluku

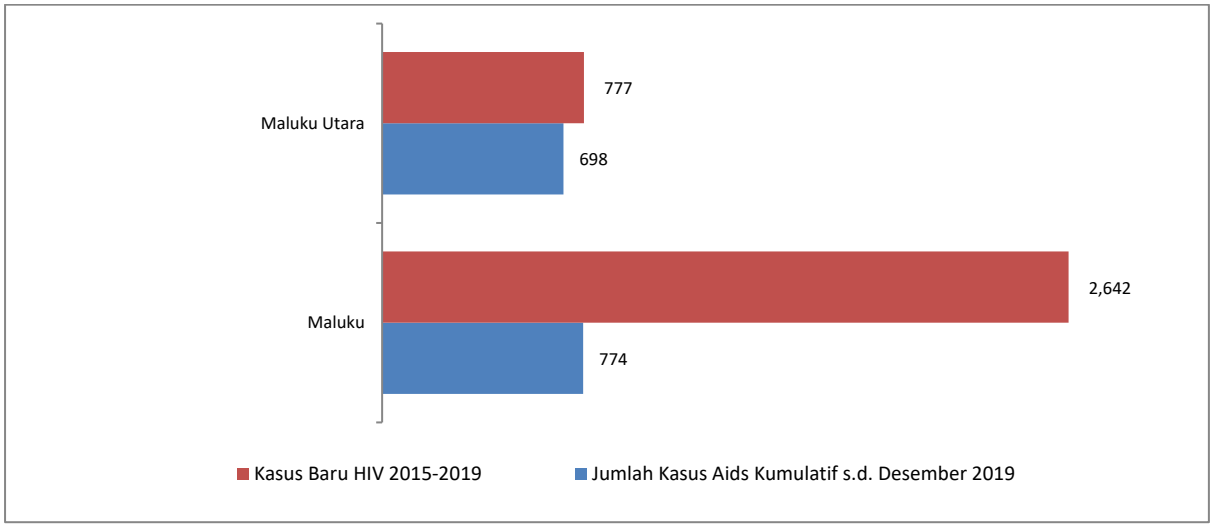

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019, Kemenkes.

Pada periode 2015-2019, penambahan kasus baru HIV dan AIDS setiap tahun menunjukkan angka yang fluktuatif, dan cenderung meningkat. Jika membandingkan jumlah kasus selama periode 2015 dan 2019, peningkatan kasus Aids tertinggi terjadi di Provinsi Maluku sebanyak 128 kasus di tahun 2016, dan Maluku Utara sebanyak 108 kasus (tahun 2018). Untuk kasus HIV baru tertinggi terjadi di Provinsi Maluku sebanyak 688 kasus di tahun 2017, dan di Maluku Utara sebanyak 267 di tahun 2019.

Tabel 25:

Perkembangan Kasus Baru HIV dan AIDS Tahun 2014 - 2018 di Wilayah Maluku

Provinsi	Kasus Baru Aids					Jumlah Kumulatif sd. Des '19	Kasus Baru HIV					Periode '15-'19
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
Maluku	68	128	**88**	68	45	774	409	621	688	462	462	2.642
Maluku Utara	104	77	34	108	61	698	45	120	145	200	267	777
MALUKU	**172**	**205**	**122**	**176**	**106**	**1.472**	**454**	**741**	**833**	**662**		**2.690**

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019, Kemenkes.

3.2.4. Pelayanan Kesehatan

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Pada periode 2015-2019 jumlah puskesmas di wilayah Maluku semakin meningkat, dengan rasio puskesmas terhadap kecamatan pada tahun 2019 sebesar 1,52 . Hal ini menggambarkan bahwa rasio ideal puskesmas terhadap kecamatan minimal 1 puskesmas secara kuantitas sudah terpenuhi. Namun demikian, perlu diperhatikan terkait aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau puskesmas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya kondisi geografis, luas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, dan kemajuan suatu daerah.

Tabel 26:
Jumlah Puskesmas dan Rasio dengan Kecamatan Antarprovinsi

Provinsi	Jml Kec.	Jumlah Puskesmas		Rasio Th. 2019
		2015	2019	
Maluku	118	199	209	1,77
Maluku Utara	116	127	147	1,27
MALUKU	**234**	**326**	**356**	**1,52**

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019, Kemenkes

Gambar 28:
Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2015 dan Tahun 2019 Antarprovinsi

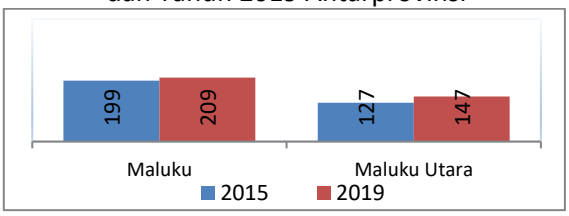

Gambar 29:
Jumlah Puskesmas Iawat Inap dan Terakreditasi menurut Provinsi Tahun 2019

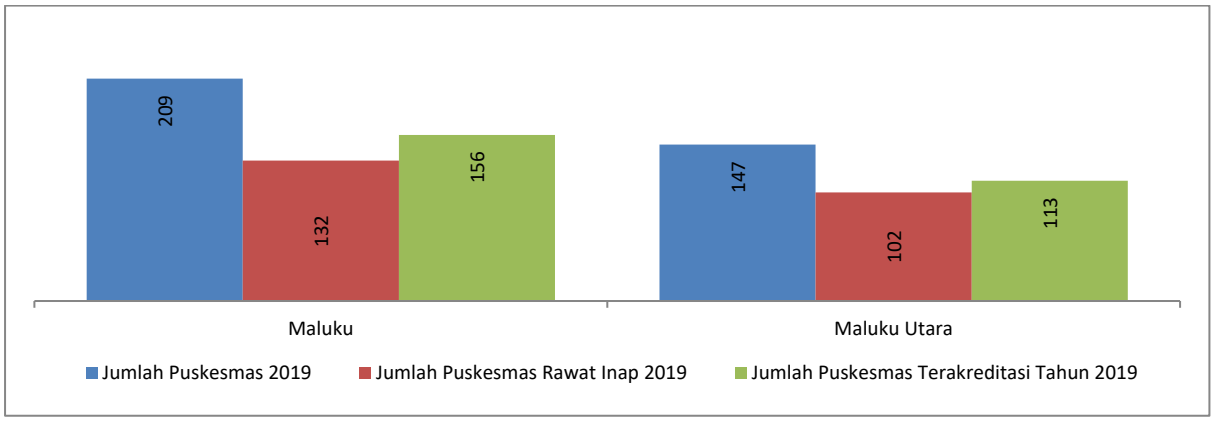

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019, Kemenkes

Berdasarkan jumlah puskesmas terakreditasi dan ketersediaan fasilitas rawat inap, puskesmas di wilayah Maluku masing-masing sudah mencapai 234 puskesmas (65,73%) dan 269 (75,56%). Distribusi antarprovinsi untuk puskesmas terakreditasi dan memiliki rawat inap terbanyak terdapat di Provinsi Maluku masing-masing sebanyak 132 dan 156 puskesmas. Berdasarkan persentase puskesmas memiliki fasilitas rawat inap dan terakreditasi, tertinggi di Provinsi Maluku Utara yaitu dengan fasilitas rawat inap (69,39%), dan yang terakreditasi (76,87%).

Tabel 27:
Jumlah dan Persentase Puskesmas rawat Inap dan Terakreditasi menurut Provinsi Tahun 2019

Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Rawat Inap		Jumlah Puskesmas Terakreditasi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Maluku	209	132	63,16	156	74,64
Maluku Utara	147	102	69,39	113	76,87
MALUKU	**356**	**234**	**65,73**	**269**	**75,56**

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019, Kemenkes

Rumah Sakit. Rumah Sakit di wilayah Maluku pada periode 2015-2019 mengalami peningkatan sebanyak 5 rumah sakit dan penurunan jumlah tempat tidur sebanyak 82 tempat tidur. Distribusi rumah sakit dan tempat tidur pada tahun 2019, terbanyak terdapat di Provinsi Maluku yakni mencapai 30 rumah sakit dan 126 tempat tidur.

Gambar 30:
Jumlah Rumah Sakit dan Tempat Tidur Rumah Sakit Antarprovinsi Tahun 2019

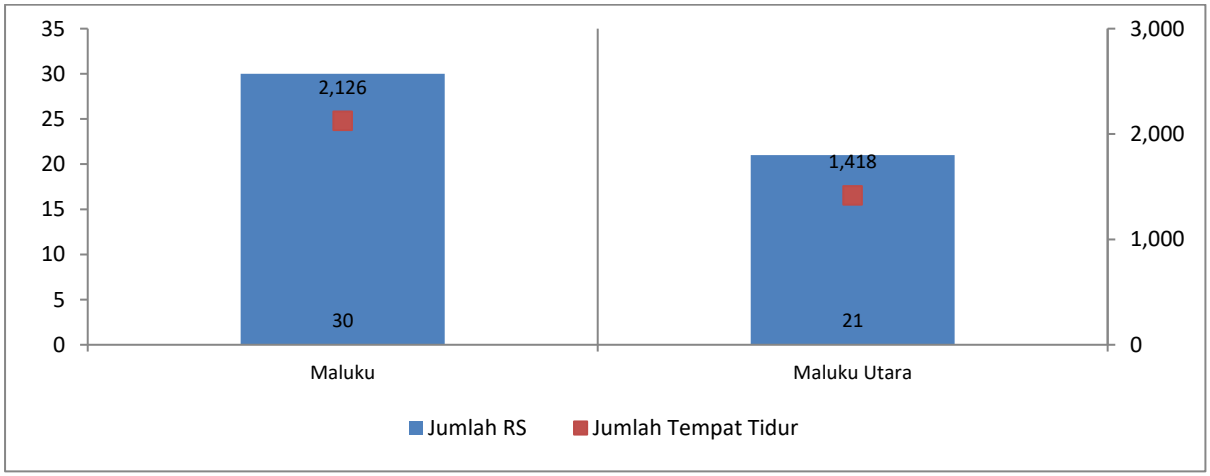

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019, Kemenkes

Berdasarkan standar WHO adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Dengan demikian, kedua provinsi di wilayah Maluku sejak tahun 2015 hingga tahhun 2019 telah memenuhi standar (rasio di atas 1), dengan rasio tertinggi di Provinsi Maluku. Perkembangan rasio tidur untuk 1.000 penduduk selama periode 2015-2019, kedua provinsi menunjukkan penurunan jumlah tempat tidur, namun secara rasio masih berada di atas 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk (**Tabel 28**).

Tabel 28:
Jumlah Rumah Sakit dan Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk

Provinsi	2015			2019			Δ (2015 - 2019)		
	RS	Tempat Tidur		RS	Tempat Tidur		RS	Tempat Tidur	
		Jumlah	Rasio		Jumlah	Rasio		Jumlah	Rasio
Maluku	27	2.417	1,43	30	2.126	1,18	3	-291	-0,25
Maluku Utara	19	1.500	1,29	21	1.418	1,13	2	-82	-0,16
MALUKU	**46**	**3.917**	**1,36**	**51**	**3544**	**1,155**	**5**	**-373**	**-0,21**

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019, Kemenkes

Kecukupan Tenaga Medis di Puskesmas. Kecukupan tenaga kesehatan di puskesmas diatur berdasarkan Permenkes, yaitu pada puskesmas non-rawat inap minimal jumlah dokter adalah satu orang, sedangkan pada Puskesmas rawat inap minimal jumlah dokter dua orang, baik pada wilayah perkotaan, perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil. Berdasarkan gambaran tingkat kecukupan tersebut, di Provinsi Maluku dan Maluku Utara masih memiliki proporsi puskesmas dengan kekurangan dokter yang tinggi terutama dokter gigi, yakni untuk puskesmas kekurangan dokter gigi mencapai 74,1 persen di Provinsi Maluku Utara, dan 83,89 persen di Provinsi Maluku, dan prsentase puskesmas kekurangan dokter di Provinsi Maluku sebesar 51,66 persen, dan di Provinsi Maluku Utara sebesar 48,2 persen.

Gambar 31:
Gambaran Tingkat Kecukupan Tenaga Medis di Puskesmas Antarprovinsi Tahun 2019

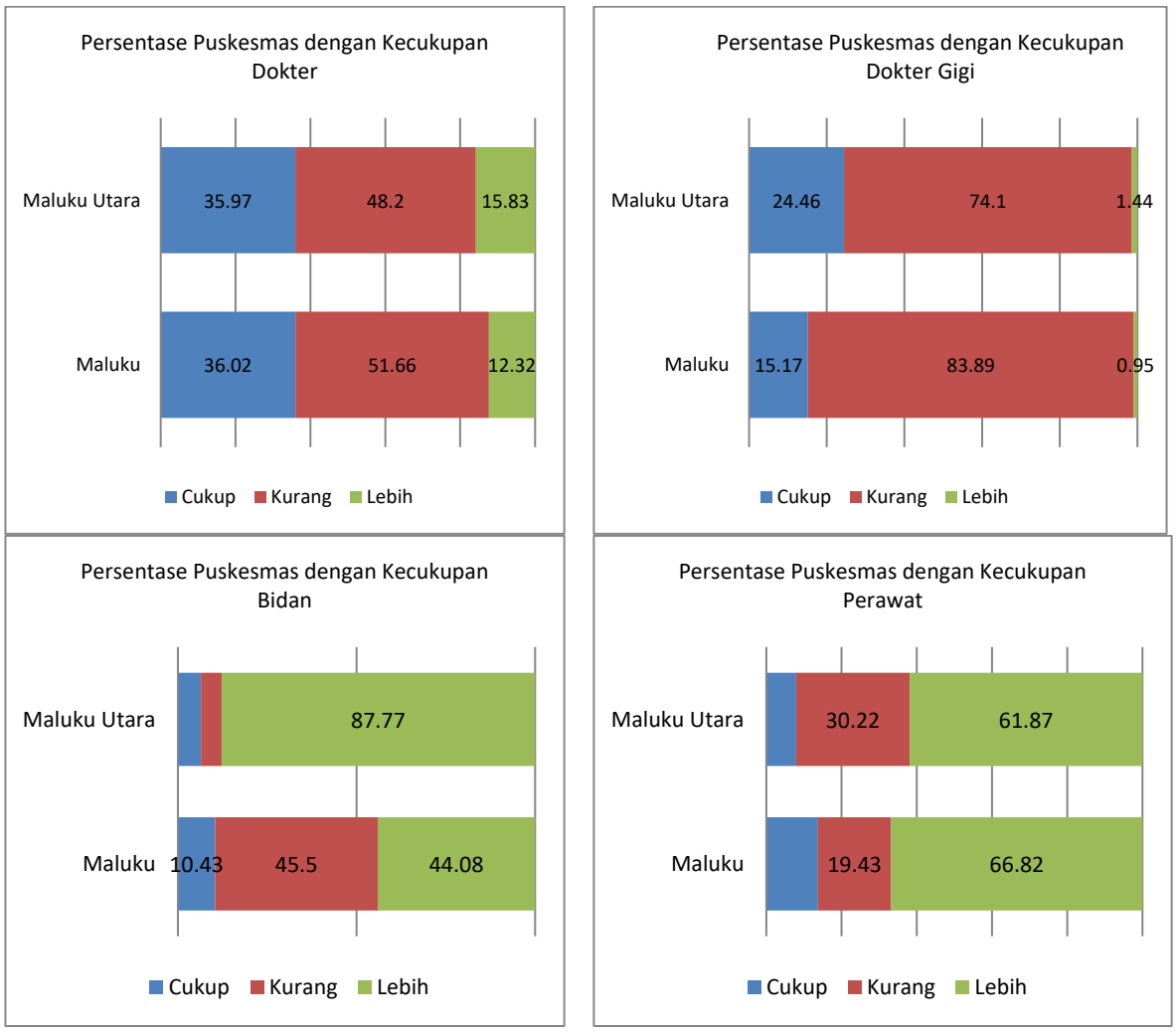

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019, Kemenkes

Untuk kecukupan perawat, sebanyak 30,22 persen puskesmas di Provinsi Maluku Utara, dan sebanyak 19,43 persen di Provinsi Maluku. Sebagian besar puskesmas telah mencapai kategori lebih perawat, yakni 61,87 persen di Provinsi Maluku Utara, dan 66,82 persen di Provinsi Maluku.

3.3. Ekonomi Masyarakat

Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Riil Yang Disesuaikan. Kondisi ekonomi masyarakat diantaranya dapat didekati dengan perhitungan standar hidup layak yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya perekonomian. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) berbasis formula Rao, dan menjadi komponen dalam perhitungan IPM.

Gambaran dari standar hidup layak masyarakat wilayah Maluku selama periode 2015-2019 berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan menunjukkan tren peningkatan, dengan rata-rata pengeluaran perkapita pada tahun 2019 di Provinsi Maluku menunjukkan nilai tertinggi yakni sebesar Rp. 740.583,- sedangkan di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 692.333,-. Berdasarkan peningkatannya selama periode 2015-2019, di Provinsi Maluku Utara meningkat sebesar Rp. 73.750,- (11,92%), sedangkan di Provinsi Maluku meningkat sebesar Rp. 71.750,- (10,73%).

Tabel 29:

Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Disesuaikan Antarprovinsi Tahun 2015-2019

Provinsi	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp./Bulan)						Pertumbuhan 2015-2019 (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	Δ (2019-2015)	
Maluku	668.833	684.583	702.750	726.750	740.583	71.750	10,73
Maluku Utara	618.583	628.750	649.333	665.000	692.333	73.750	11,92
MALUKU	**643.708**	**656.667**	**676.042**	**695.875**	**716.458**	**72.750**	**11,30**

Sumber: BPS, 2020

Rata-Rata Pengeluaran Untuk Konsumsi. Persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun sejalan dengan meningkatnya pendapatan (Hukum Engel). Porsi pengeluaran pangan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan. Porsi pengeluaran pangan semakin kecil, menggambarkan tingkat kesejahteraan yang makin membaik (Trisnowati,2013).

Gambar 32:

Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Wilayah Maluku menurut Kelompok Barang Tahun 2015 dan 2019

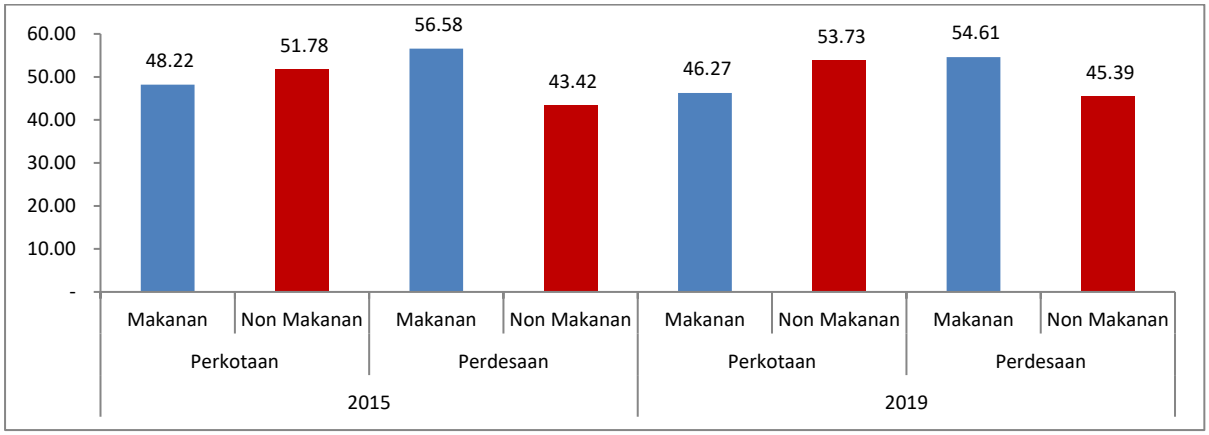

Sumber: Susenas, BPS.

Pada tahun 2015 dan tahun 2019, rata-rata pengeluaran per kapita/bulan masyarakat di perdesaan seluruh provinsi di wilayah Maluku sebagian besar untuk makanan, sementara di perkotaan sebagian besar untuk bukan makanan. Persentase rata-rata pengeluaran per kapita/bulan masyarakat di perkotaan menunjukkan peningkatan sebesar 1,95 persen dibanding tahun 2015. Berdasarkan gambaran perubahan persentase pengeluaran perkapita/bulan antar tahun 2015 dan 2019, menunjukkan porsi pengeluaran untuk bukan makanan cenderung meningkat, artinya hal ini mengindikasikan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Perubahan persentase pengeluaran untuk makanan antarprovinsi selama antar tahun 2015 dan tahun 2019, peningkatan persentase untuk bukan makanan yang diikuti oleh penurunan persentase untuk makanan di Perkotaan terjadi di Provinsi Maluku sebesar 2,24 persen, sedangkan di Maluku Utara sebesar 1,63 persen. Sementara itu, di perdesaan terjadi peningkatan persentase untuk bukan makanan sebesar 1,41 persen di Provinsi Maluku, dan sebesar 2,52 persen di Maluku Utara.

Tabel 30:

Persentase Pengeluaran Perkapita/Bulan untuk Makanan dan Bukan Makanan di Perdesaan/ Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2019

Provinsi	2015				2019				Δ (2019-2015)			
	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan		Perdesaan	
	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan
Maluku	48,73	51,27	57,02	42,98	46,49	53,51	55,61	44,39	-2,24	2,24	-1,41	1,41
Maluku Utara	47,70	52,30	56,17	43,83	46,07	53,93	53,65	46,35	-1,63	1,63	-2,52	2,52
MALUKU	**48,22**	**51,78**	**56,58**	**43,42**	**46,27**	**53,73**	**54,61**	**45,39**	**-1,95**	**1,95**	**-1,97**	**1,97**

Sumber: Susenas, BPS.

PEREKONOMIAN DAERAH WILAYAH MALUKU

- *Ekonomi wilayah Maluku periode 2015-2020 didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian dengan kecenderungan kontribusinya menurun, sebaliknya sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran dengan kecenderungan kontribusinya meningkat.*
- *Transformasi struktur ekonomi Maluku terjadi dari sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor pertanian, ke sektor industri pengolahan dan sektor jasa.*
- *Perekonomian wilayah Maluku dari sisi pengeluaran didominasi oleh konsumsi rumah tangga (> 60 %) dengan kecenderungan menurun, ssebaliknya kontribusi dari komponen iinvestasi dan pengeluaran pemerintah cenderung meningkat.*
- *Nilai realisasi investasi PMDN tahun 2018 mencapai Rp. 3.289,8 miliar, namun pada tahun 2019 menurun tajam hanya mencapai Rp Rp. 965,9 miliar. Nilai investasi PMA 2015-2019 tumbuh positif, dengan nilai PMA 2019 mencapai 1.041,5 juta US$ meningkat tajam dari tahun 2018.*
- *Perdagagangan wilayah Maluku didominasi non-migas rata-rata mencapai 61,15 persen, dengan kontribusi terbesar dari Provinsi Maluku. Untuk perdagangan migas terbesar dari Provinsi Maluku Utara yaitu mecapai 81,50 persen. Ekspor migas dan non-migas sebagian besar dari Provinsi Maluku Utara, sedangkan untuk impor terbesar didominasi oleh non-migas mencapai 81,7 persen oleh Maluku Utara.*
- *Komoditas perkebunan terbesar yang dihasilkan di wilayah Maluku antara lain kelapa, kakao, kelapa sawit, dan karet. Produksi kelapa terbesar terdapat di Provinsi Maluku Utara diikuti oleh Provinsi Maluku, sedangkan produksi kakao terbesar di Provinsi Maluku Utara, dan untuk produksi kelapa sawit dan karet terbesar di wilayah Maluku terdapat di Provinsi Maluku.*
- *Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan di tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2014, kecuali perikanan tangkap perairan umum. Sedangkan perikanan budidaya tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013 kecuali untuk tambak dan kolam. Daerah dengan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya terbesar berada di Provinsi Maluku.*
- *Jumlah IMK pada tahun 2019 terbanyak terdapat di Provinsi Maluku dengan jumlah IMK sebanyak 25.004 unit, dan di Provinsi Maluku Utara sebanyak 14.213 unit.*
- *Rasio kemandirian daerah antarprovinsi pada periode 2015-2019 di Provinsi Maluku dan Maluku Utara menunjukkan tren meningkat, dengan peningkatan tertinggi di provinsi Maluku Utara sebesar 2,78 persen, sedangkan di Provinsi Maluku sebesar 1,90 persen.*
- *Kapasitas fiskal di Provinsi Maluku menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, yakni pada periode 2015-2017 menunjukkan tren menurun dari kategori rendah menjadi sangat rendah, namun di tahun 2019 meningkat menjadi kategori rendah. Sementara itu, di provinsi Maluku Utara menunjukkan penurunan kategori kapasitas fiskal tinggi (2015 dan 2016) dan menurun drastis menjadi kategori sangat rendah pada periode 2017-2019.*

04 Perkembangan Ekonomi Wilayah

4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Peran dan Struktur Ekonomi Maluku. Nilai PDRB wilayah Maluku tahun 2015 berdasarkan harga belaku sebesar Rp. 61 triliun meningkat menjadi Rp. 86 pada tahun 2019, dan berdasarkan harga konstan (2015) sebesar Rp. 45,2 triliun meningkat menjadi Rp. 57,7 triliun pada tahun 2019 (**Tabel 31**). Sementara untuk peran perekonomian wilayah Maluku terhadap pembentukan PDB nasional selama perideo 2015-2020 Triwulan I rata-rata sebesar 0,55 persen, dengan kontribusi perekonomian wilayah Maluku berasal dari Provinsi Maluku dengan proporsi lebih besar dibandingkan kontribusi dari Maluku Utara (**Tabel 33**).

Tabel 31:

Nilai PDRB ADHB dan ADHK Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015-2020 Triwulan II, (dalam triliun rupiah)

Provinsi	Nilai ADHB						Nilai ADHK					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maluku	34,3	37,1	39,9	43,1	46,3	23,2	24,9	26,3	27,8	29,5	31,1	15,5
Maluku Utara	26,6	29,2	32,3	36,5	39,7	19,9	20,4	21,6	23,2	25,1	26,6	13,3
MALUKU	**61,0**	**66,2**	**72,2**	**79,6**	**86,0**	**43,1**	**45,2**	**47,8**	**51,0**	**54,5**	**57,7**	**28,7**

Sumber: PDRB Provinsi 2015-2020, BPS

Tabel 32:

Peran Ekonomi Wilayah Maluku Terhadap Perekonomian Nasional ADHB Tahun 2015-2020 Triwulan II, (dalam persen)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020_Tr II
Maluku	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30
Maluku Utara	0,23	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25
MALUKU	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,55

Sumber: PDRB Provinsi 2015-2020, BPS

Tabel 33:

Peran Ekonomi Provinsi Terhadap Perekonomian Wilayah Maluku Tahun 2015-2020 Triwulan II, (dalam persen)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020_TR II
Maluku	56,32	55,97	55,27	54,13	53,80	53,71
Maluku Utara	43,68	44,03	44,73	45,87	46,20	46,29

Sumber: PDRB Provinsi 2015-2020, BPS

Struktur perekonomian wilayah Maluku terbesar disumbang dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor adm. Pemerintahaan, sektor pertambangan, dan sektor konstruksi. Kelima sektor tersebut berkontribusi rata-rata sebesar 77 persen terhadap perekonomian wilayah Maluku (**Gambar 33**). Hal yang sama untuk struktur perekonomian provinsi, Provinsi Maluku dan Maluku Utara terbesar disumbang dari sektor pertanian, sektor adm. Pemerintahan, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan. Sektor pertambangan dan penggalian menyubang cukup besar terhadap perekonomian Maluku Utara, yaitu rata-rata sebesar 9,5 persen dan 2,3 persen di Provinsi Maluku (**Gambar 34**).

Gambar 33:
Perkembangan Struktur Perekonomian ADHB Wilayah Maluku
Tahun 2015 dan 2020 Triwulan I, (dalam persen)

Sumber: PDRB Provinsi 2015-2020, BPS

Gambar 34:
Struktur Perekonomian Provinsi di Wilayah Maluku ADHB Tahun 2015-2020,
(rata-rata dalam persen).

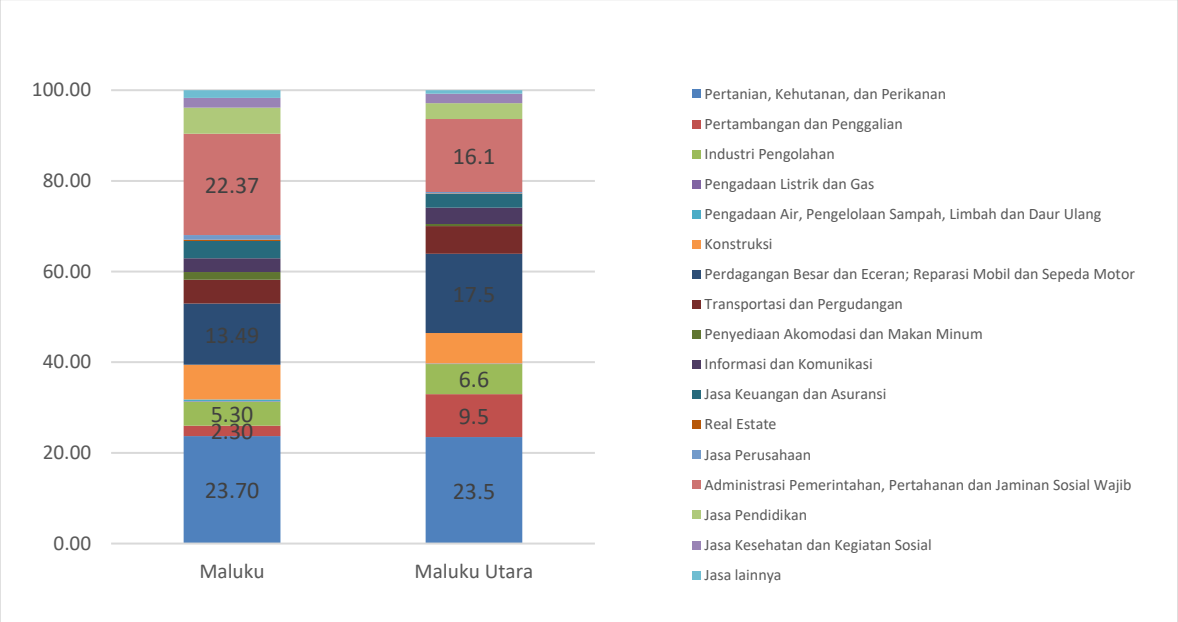

Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2015-2020, BPS

PDRB Perkapita. Perkembangan PDRB perkapita Provinsi di wilayah Maluku selama periode 2015-2019 rata-rata mengalami peningkatan. Pertumbuhan PDRB perkapita antarprovinsi di wilayah Maluku, Maluku Utara lebih tinggi dibandingkan Provinsi Maluku, yaitu tumbuh sebesar 4,18 persen dan Provinsi Maluku tumbuh sebear 3,87 persen di tahun 2019 (**Tabel 34**). Perbandingan PDRB perkapita antarprovinsi, PDRB perkapita Maluku Utara relatif lebih tinggi dibandingkan Provinsi Maluku, dengan PDRB perkapita tahun 2019 Maluku Utara tercatat sebesar 31.627 ribu/jiwa dan Provinsi Maluku sebesar 25.658 ribu/jiwa (**Tabel 35**).

Tabel 34:
Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK (2010) menurut Provinsi di Wilayah Maluku
Tahun 2016-2019, (persen)

Provinsi	2016	2017	2018*	2019**
Maluku	3,94	4,05	4,20	3,87
Maluku Utara	3,67	5,59	5,88	4,18

Sumber: PDRB 2019, BPS

Tabel 35:
Perkembangan PDRB Perkapita ADHB menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015-2019,
(Rp. ribu/jiwa)

Provinsi	ADHK					ADHB				
	2015	2016	2017	2018*	2019**	2015	2016	2017	2018*	2019**
Maluku	14740	15321	15942	16612	17255	20366	21599	22859	24280	25658
Maluku Utara	17534	18177	19193	20322	21171	22918	24581	26686	29610	31627

Sumber: PDRB 2019, BPS

PDRB Pengeluaran. Pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku selama periode 2015-2019 dari sisi pengeluaran hampir semua komponen pengeluaran tumbuh positif, kecuali komponen ekspor luar negeri tumbuh negatif di tahun 2015 dan 2020 Triwulan I. Pertumbuhan tertinggi komponen Pengeluaran yaitu pada komponen impor luar negeri rata-rata tumbuh sebesar 73,80 persen, komponen ekspor luar negeri sebesar 31,45 persen, dan PMTB tumbuh rata-rata sebesar 26,70 persen. Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran tahun 2020 Triwulan I seiring dengan kondisi pandemi Covid-19, pertumbuhan komponen pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, komponen ekspor terkontraksi di angka -10,97 persen. Sementara untuk komponen impor, PMTB, net-ekspor antardaerah meningkat cukup tajam (**Tabel 36**).

Tabel 36:
Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Wilayah Maluku
Tahun 2015-2020 Triwulan I, (persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Tr1	Rata-rata
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,85	5,61	5,29	3,94	4,78	3,04	4,75
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,78	7,36	5,79	8,63	12,16	2,69	6,90
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,45	2,02	2,00	2,26	2,90	2,98	3,27
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,44	8,84	10,01	9,37	34,31	91,23	26,70
5. Perubahan Inventori	(299,20)	367,29)	(81,64)	860,47	(163,67)	(234,54)	(47,64)
6. Ekspor Luar Negeri	(6,09)	10,48	105,09	74,75	15,44	(10,97)	31,45
7. Impor Luar Negeri	26,52	51,60	(14,08)	32,22	82,25	264,26	73,80
8. Net Ekspor Antar Daerah	0,84	(3,43)	27,41	17,62	5,47	16,96	10,81
P D R B	**5,76**	**5,75**	**6,66**	**6,84**	**5,83**	**3,57**	**5,73**

Sumber: PDRB 2015- 2019, BPS

Sumber utama pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku dari sisi pengeluaran terbesar dari komponen PMTB rata-rata 7,77 persen, diikuti impor luar negeri rata-rata sebesar 6,46 persen, dan konsumsi rumah tangga rata-rata sebesar 2,93 persen (**Tabel 37**). Sumber pertumbuhan utama Provinsi Maluku terbesar dari komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB, sementara Provinsi Maluku Utara terbesar dari PMTB, impor luar negeri, ekspor luar negeri, dan konsumsi pemerintah (**Gambar 39**).

Tabel 37:

Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Wilayah Maluku Tahun 2015-2020 Triwulan I, (persen).

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Tr1	Rata-rata
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,69	3,54	3,33	2,45	2,89	1,81	2,95
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,09	0,13	0,11	0,16	0,23	0,05	0,13
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,68	0,74	0,70	0,76	0,93	0,83	1,11
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,89	2,62	3,05	2,95	11,05	25,07	7,77
5. Perubahan Inventori	(0,39)	0,90	(0,50)	0,91	(1,56)	5,40	0,79
6. Ekspor Luar Negeri	(0,36)	0,55	5,73	7,83	2,65	(1,93)	2,41
7. Impor Luar Negeri	1,60	3,71	(1,45)	2,68	8,46	23,75	6,46
8. Net Ekspor Antar Daerah	(0,25)	0,99	(7,22)	(5,54)	(1,89)	(3,91)	(2,97)
PDRB	**5,76**	**5,75**	**6,66**	**6,84**	**5,83**	**3,57**	**5,73**

Sumber: PDRB Pengeluaran , BPS 2020

Tabel 38:

Pertumbuhan PDRB Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015-2020 Triwulan I, (rata-rata persen)

Komponen Pengeluaran	Maluku	Maluku Utara
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,20	4,14
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,77	7,40
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,54	4,39
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,83	57,67
5. Perubahan Inventori	(4,53)	(213,69)
6. Ekspor Luar Negeri	(3,94)	158,71
7. Impor Luar Negeri	(2,21)	226,52
8. Net Ekspor Antar Daerah	2,27	36,87
PDRB	**5,43**	**6,11**

Tabel 39:

Sumber Pertumbuhan PDRB Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Provinsi di Wilayah Maluku

Komponen Pengeluaran	Maluku	Maluku Utara
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,43	2,37
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,16	0,09
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,98	1,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,82	14,74
5. Perubahan Inventori	(0,06)	1,80
6. Ekspor Luar Negeri	(0,29)	5,67
7. Impor Luar Negeri	(0,17)	14,23
8. Net Ekspor Antar Daerah	(0,78)	(5,59)

Sumber: PDRB Pengeluaran , BPS 2020

Struktur perekonomian wilayah Maluku dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar berasal dari Komponen pengeluaran rumah tangga rata-rata sebesar 64,18 persen; diikuti komponen pengeluaran konsumsi pemerintan rata-rata 34,20 persen, PMTB sebesar 35,06 persen; dan komponen impor barang dan jasa sebesar 17,66 persen; dan komponen ekspor sebesar 11,46 persen (**Tabel 40**). Struktur perekonomian provinsi, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, komponen PMTB, konsumsi pemerintah, ekspor dan impor luar negeri (**Tabel 41**).

Tabel 40:

Share PDRB menurut Pengeluaran ADHB (Tahun 2010) Wilayah Maluku
Tahun 2015-2020 Triwulan I (persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Tr1	Rata-rata
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	64,79	65,84	65,16	63,22	63,18	62,89	64,18
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,75	1,80	1,82	1,85	2,02	2,05	1,88
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	37,11	36,44	35,38	34,18	33,05	29,04	34,20
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,71	29,24	30,81	32,86	40,77	48,96	35,06
5. Perubahan Inventori	(0,33)	0,66	0,12	0,97	(0,51)	3,34	0,71
6. Ekspor Luar Negeri	6,02	6,21	9,82	16,50	18,05	12,17	11,46
7. Impor Luar Negeri	9,91	12,19	11,58	14,90	24,02	33,38	17,66
8. Net Ekspor Antar Daerah	27,14)	(27,99)	(31,54)	(34,68)	(32,54)	(25,07)	(29,83)

Sumber: PDRB Pengeluaran , BPS 2020

Tabel 41:

Share PDRB menurut Pengeluaran ADHB Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015-2020,
(rata-rata persen)

Komponen Pengeluaran	Maluku	Maluku Utara
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	70,84	56,10
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,39	1,26
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	37,58	30,08
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,64	39,04
5. Perubahan Inventori	0,55	0,88
6. Ekspor Luar Negeri	8,12	15,25
7. Impor Luar Negeri	16,10	19,29
8. Net Ekspor Antar Daerah	(35,02)	(23,31)

Sumber: PDRB Pengeluaran , BPS 2020

4.2. Investasi PMA dan PMDN

Investasi PMDN dan PMA. Nilai PMDN wilayah Maluku Tahun 2019 mencapai 965,5 miliar rupiah atau rata-rata (2015-2019) sekitar 0,35 persen dari total realisasi PMDN nasional. Perkembangan realisasi investasi PMDN di wilayah Maluku selama periode 2015-2019 cukup fluktuatif dan mengalami peningkatan cukup tajam di tahun 2017 dengan nilai PMDN sebesar Rp. 1.202,9 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp. 3.289,8 miliar (**Gambar 35**). Secara spasial penyebaran Investasi PMDN di wilayah Maluku relatif merata, proprosi PMDN di Maluku Utara sebesar 49,9 persen dan Provinsi Maluku sebesar 50,1 persen (**Gambar 36**).

Gambar 35:

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. miliar) Wilayah Maluku Tahun 2015-2019

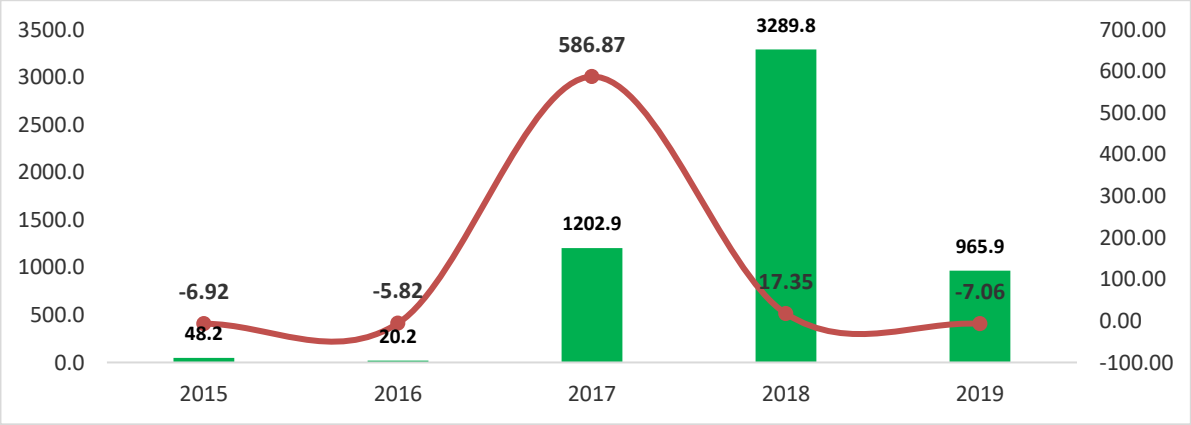

Sumber : BKPM, Tahun 2019

Gambar 36:
Distribusi Nilai Realisasi Investasi PMDN (%) menurut Wilayah dan Provinsi
Tahun 2015-2019

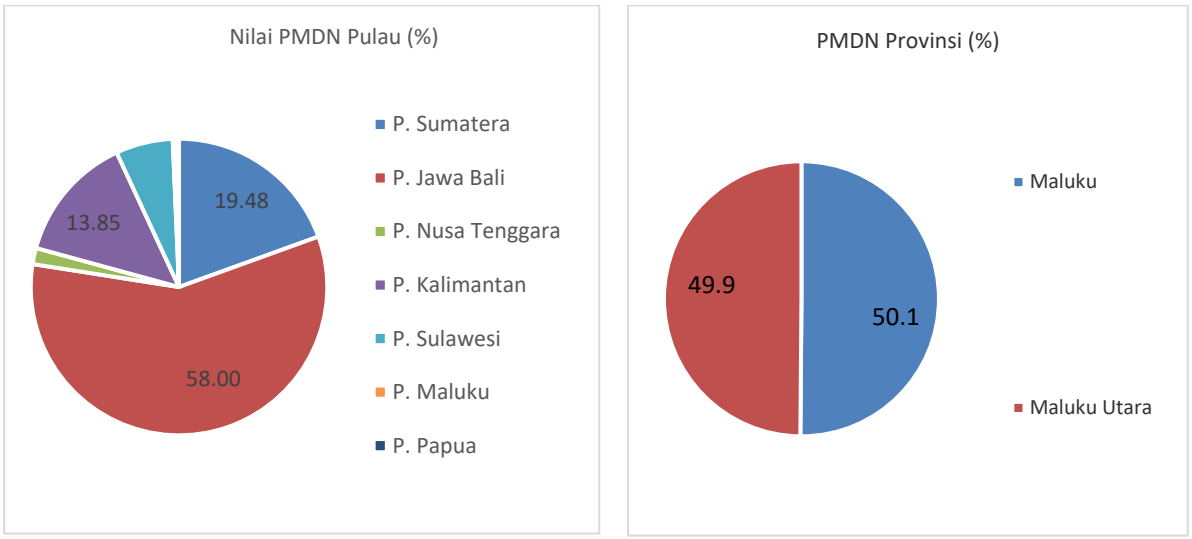

Sumber : BKPM, Tahun 2019

Nilai realisasi PMA wilayah Maluku tahun 2019 mencapai 1.041 juta US$ atau rata-rata (2015-2019) sekitar 1,83 persen dari total realisasi PMA nasional. Perkembangan realisasi investasi PMA di wilayah Maluku selama periode 2015-2019 terakhir mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2018, namun pada akhir tahun 2019 PMA tumbuh sebesar 180 persen dari tahun 2018 (**Gambar 37**). Secara spasial penyebaran Investasi PMA di wilayah Maluku terbesar di Maluku Utara yaitu rata-rata sebesar 68,1 persen lebih tinggi dibandingan nilai PMA di Povinsi Maluku (**Gambar 38**).

Gambar 37:
Perkembangan Realisasi Investasi PMA (juta US$) Wilayah Maluku Tahun 2015-2019

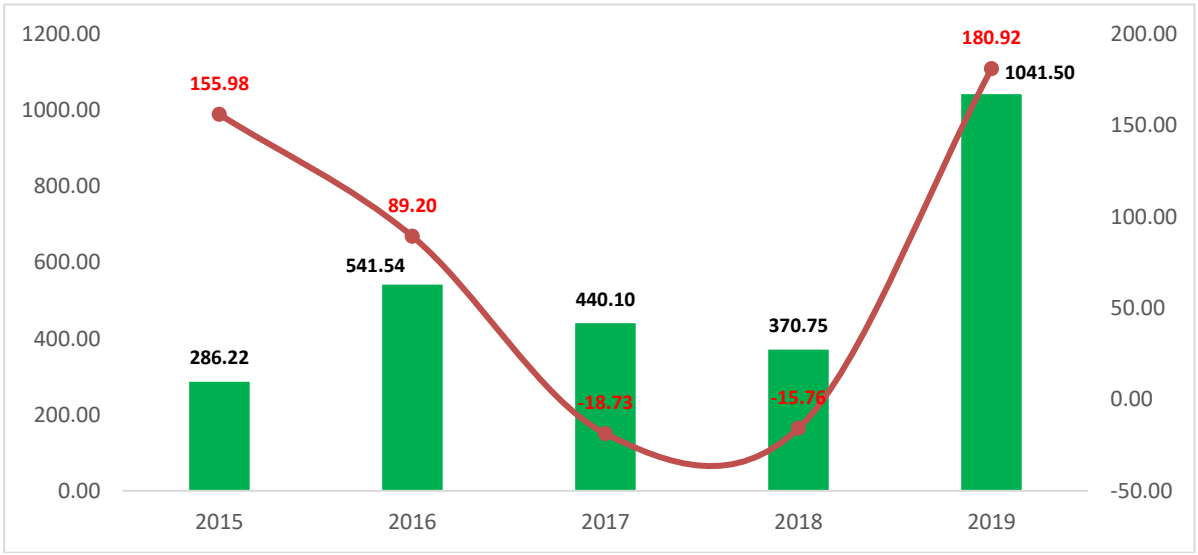

Sumber : BKPM, Tahun 2018

Gambar 38:
Distribusi Nilai Realisasi Investasi PMA (%) menurut Wilayah dan Provinsi Tahun 2015-2019

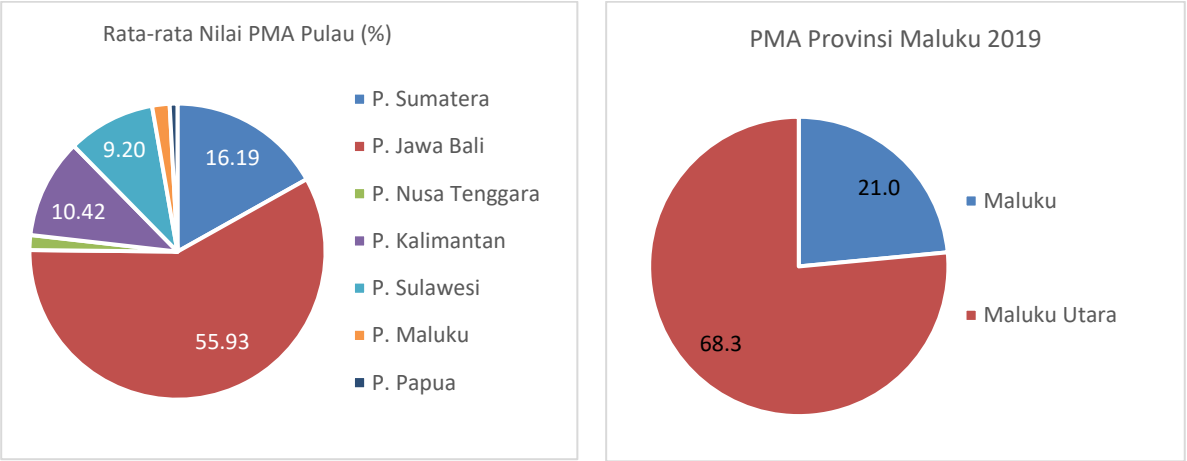

Sumber : BKPM, Tahun 2019

4.3. Ekspor dan Impor

Perdagangan Ekspor-Impor. Perkembangan perdagangan wilayah Maluku selama periode 2015-2019 didominasi perdagangan non-migas atau rata-rata mencapai 61,15 persen, dengan kecenderungan meningkat. Nilai perdagangan non-migas tahun 2019 tercata sebesar 1.751 juta US$ mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebaliknya untuk perkembangan nilai perdagangan migas cenderung menurun di tahun 2019, nilai migas tahun 2019 tercatat sebesar 2019,24 juta US$ menurun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 520,53 persen (**Gambar 39**). Secara spasial perdagangan migas terbesar berasal dari Provinsi Maluku Utara mencapai 81,50 persn dari total perdagangan migas Maluku, dan non-migas dari Provinsi Maluku (**Gambar 40**).

Gambar 39:
Perkembangan Perdagangan Migas dan Non-migas Wilayah Wilayah Maluku dan Provinsi Tahun 2015-2019. (dalam juta US$)

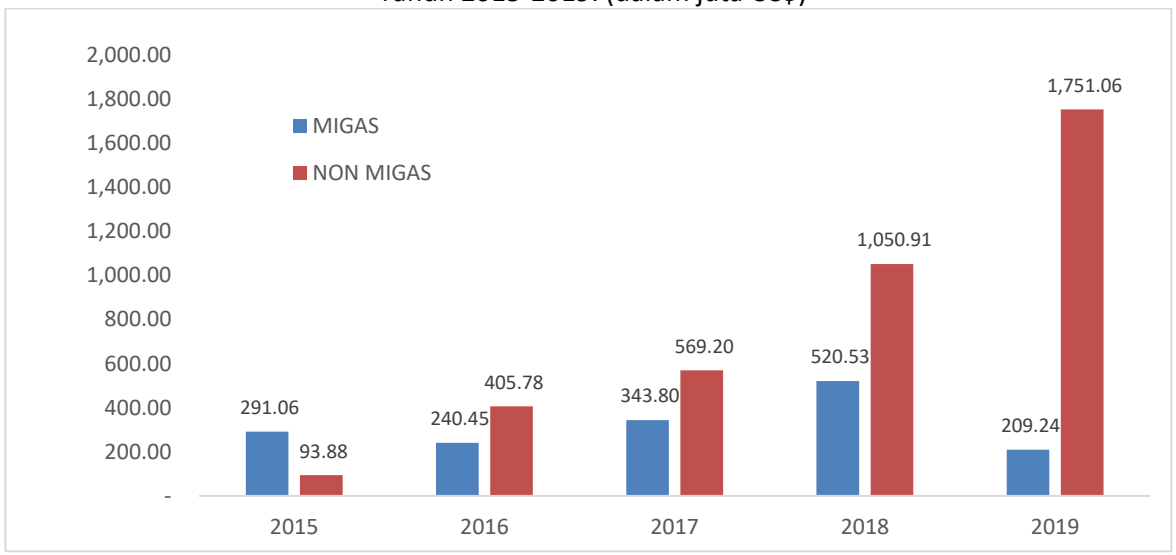

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan 2019

Gambar 40:
Perdagangan Migas dan Non-migas menurut Provinsi di Wilayah Maluku
Tahun 2015-2019. (rata-rata dalam persen)

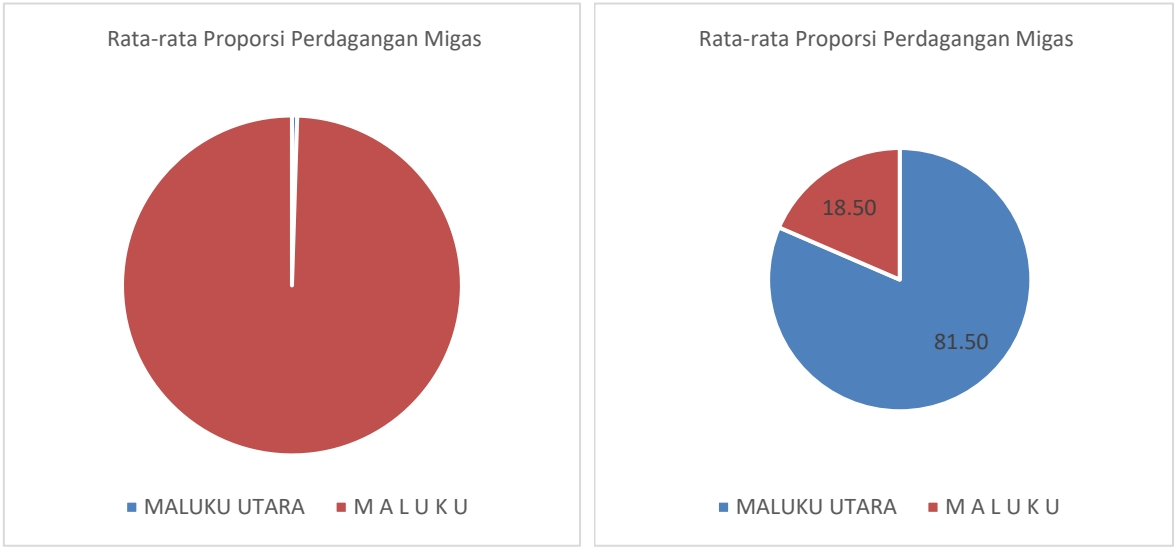

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangantahun 2019

Nilai ekspor wilayah Maluku 2019 mencapai 1.811 juta US$ meningkat dibandingkan dari nilai ekspor tahun sebelumnya. Nilai ekspor wilayah Maluku relatif seimbang antara migas dan non-migas, yaitu ekspor non-migas mencapai 49,41 persen dan migas 51 persen dari total ekspor (**Gambar 41**). Secara spasial nilai ekspor non-migas dan migas terbesar berasal dari Maluku Utara rata-rata mencapai > 68 persen, (**Gambar 42**).

Gambar 41:
Perkembangan Nilai Ekspor Migas dan Non-migas Wilayah Maluku
Tahun 2015-2019, (dalam juta US$)

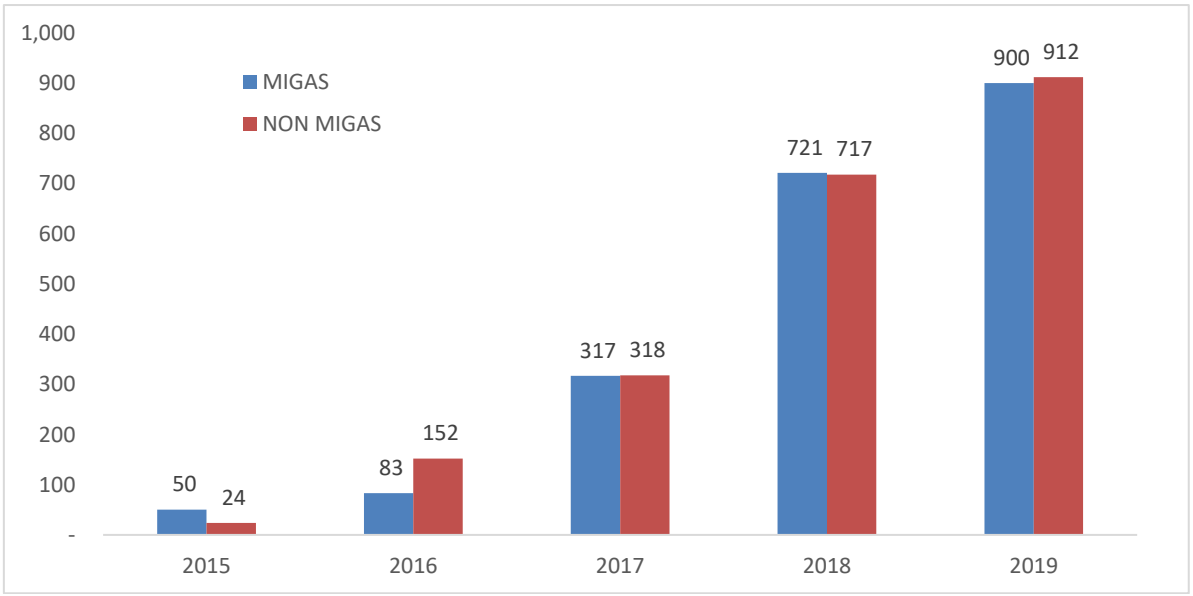

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan Tahun 2019

Gambar 42:
Kontribusi Nilai Ekspor Migas dan Non-migas Menurut Provinsi di Wilayah Maluku
Tahun 2015 - 2019. (rata-rata dalam persen)

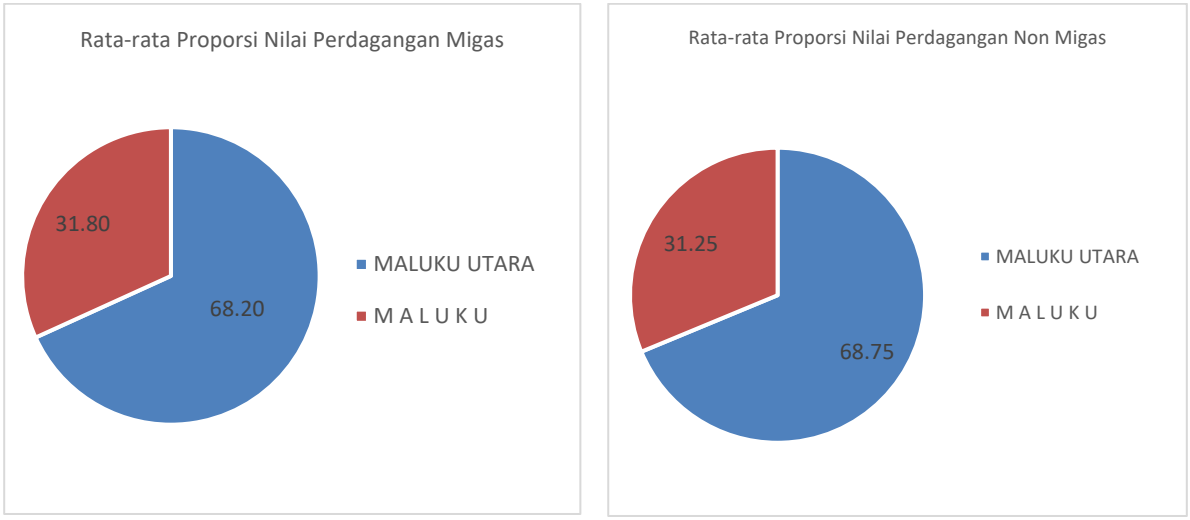

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan Tahun 2018

Nilai total Impor wilayah Maluku 2019 mencapai 1.027 juta US$ meningkat cukup tajam dari nilai impor tahun 2018 (813 juta US$). Nilai impor terbesar tahun 2019 didominasi dari non-migas yaitu sebesar 839 juta US$ atau rata-rata sekitar 81,71 persen dari total impor (**Gambar 43**). Secara spasial impor non-migas terbesar dari Provinsi Maluku Utara rata-rata mencapai 85,15 persen per tahun, sedangkan untuk impor migas terbesar di Provinsi Maluku hingga mencapai 100 persen (**Gambar 44**).

Gambar 43:
Perkembangan Nilai Impor Migas dan Non-migas Wilayah Maluku
Tahun 2015-2019, (dalam juta US$)

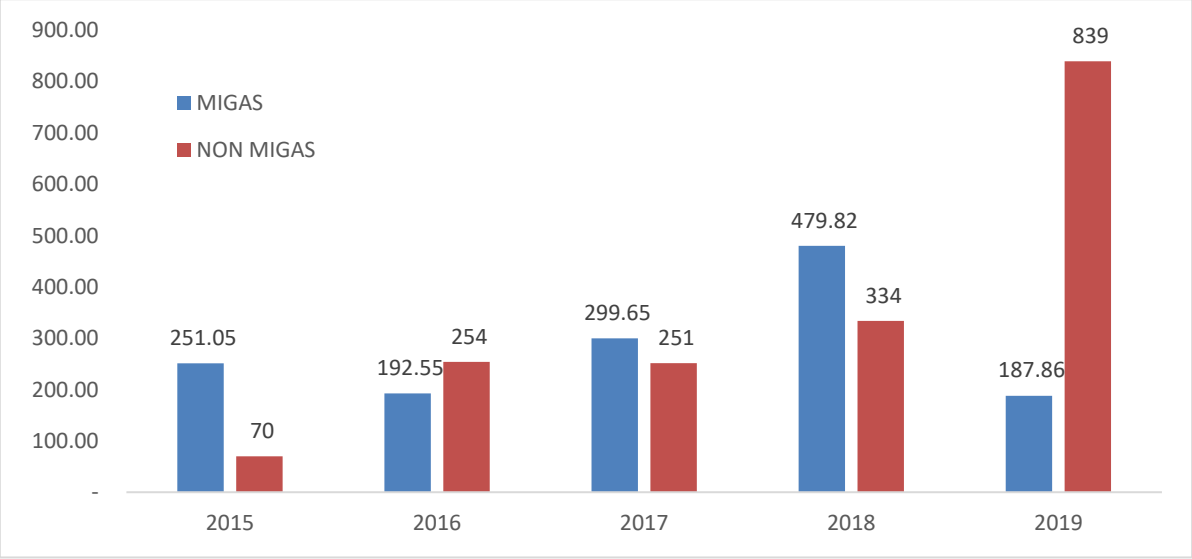

Gambar 44:
Perkembangan Kontribusi Nilai Impor Migas dan Non-migas Wilayah Maluku
Tahun 2015-2019. (dalam persen)

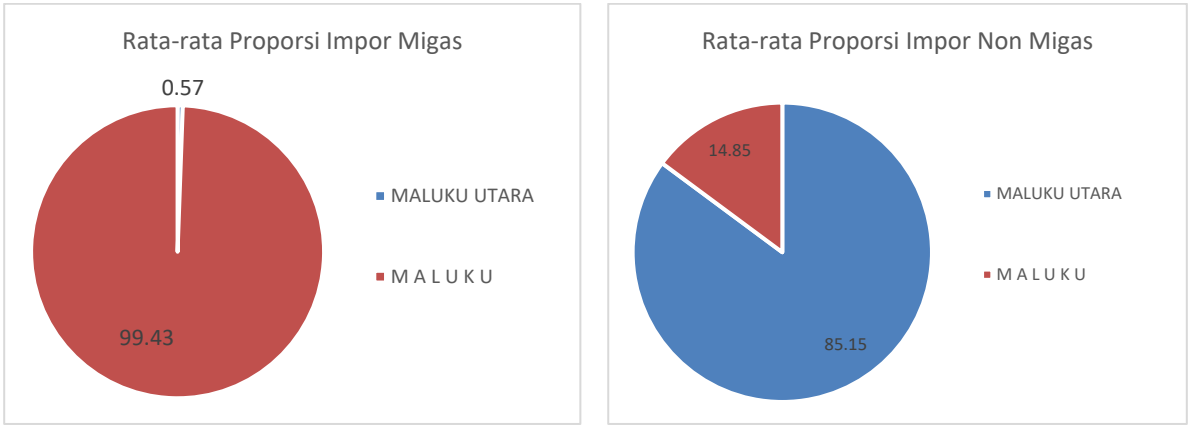

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian perdagangan Tahun 2019

4.4. Perbankan

Sektor perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dimana peranan penting perbankan yaitu dalam menggerakkan roda perekonomian wilayah. Selama periode 2015-2019, jumlah tabungan masyarakat menurut rupiah dan valas Bank Umum dan BPR di wilayah Maluku mengalami peningkatan, tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 18.830 miliar dan meningkat menjadi Rp 22.688 miliar pada tahun 2019. Hal yang sama untuk nilai pinjaman/kredit mengalami peningkatan, tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 15.921 miliar dan meningkat menjadi Rp 32.267 miliar (**Gambar 45**). Secara spasial distribusi nilai tabungan/simpanan dan pinjaman di Provinsi Maluku relatif lebih besar dibandingan di Maluku Utara, dan untuk perkembangan nilai simpanan maupun pinjaman mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 (**Gambar 46**).

Gambar 45:
Perkembangan nilai Pinjaman/Kredit dan Simpanan (Rp. miliar) Masyarakat Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR Tahun 2015-2019

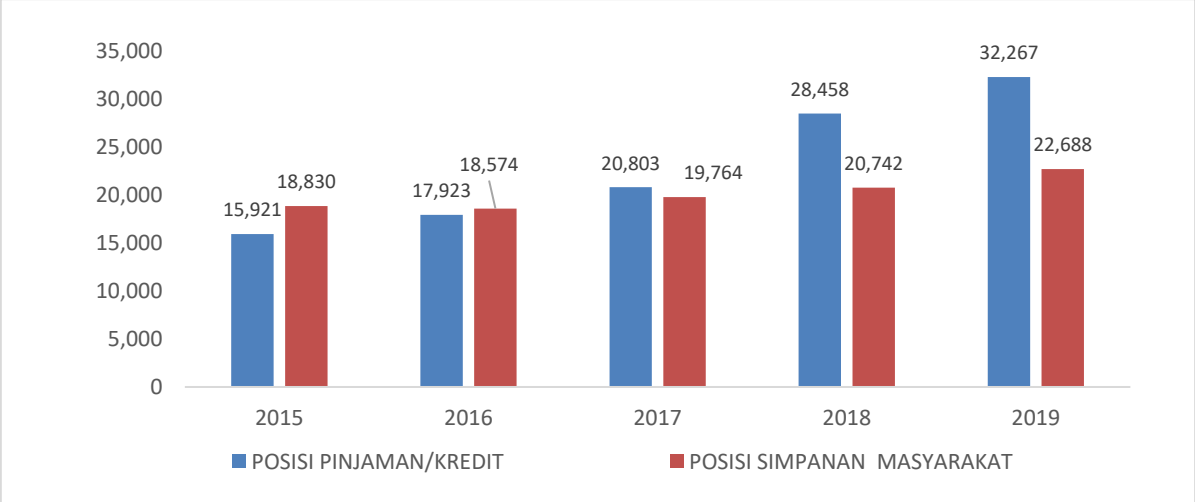

Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2019

Gambar 46:
Posisi Pinjaman/Kredit yang Diberikan Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR menurut Provinsi (Rp. miliar)

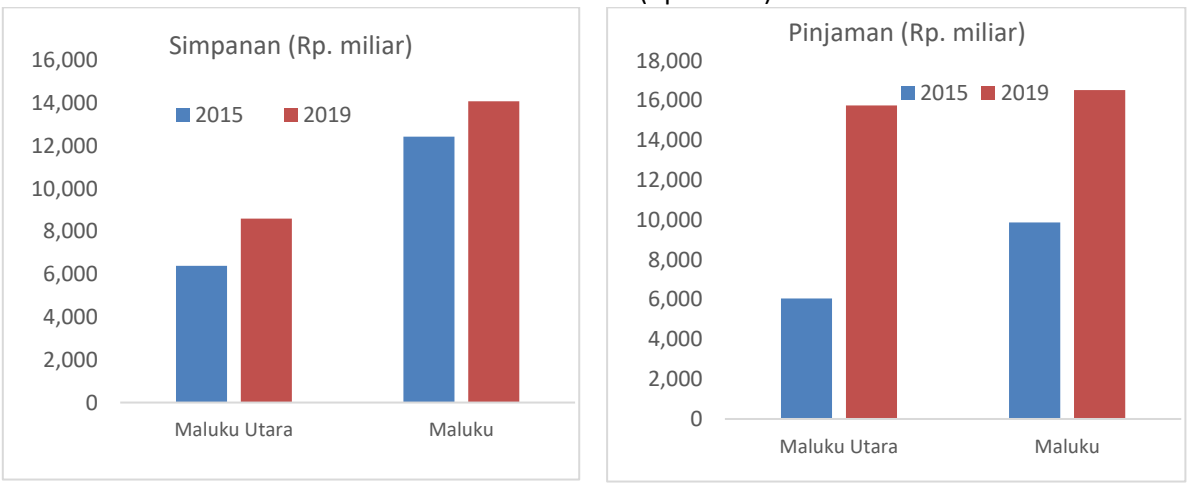

Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2019

Sementara berdasarkan rasio pinjaman terhadap simpanan masyarakat Rupian dan Valas pada Bank Umum dan BPR rata-rata masih di bawah 1 (satu), kecuali di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019 rasio pinjaman terhadap simpanan meningkat menjadi 1,17 dari 0,79 di tahun 2015. Rasio pinjaman terhadap simpanan terbesar di Provinsi Maluku Utara (**Gambar 47**).

Gambar 47:
Rasio Pinjaman/Kredit terhadap Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR menurut Provinsi Tahun 2015 dan 2019.

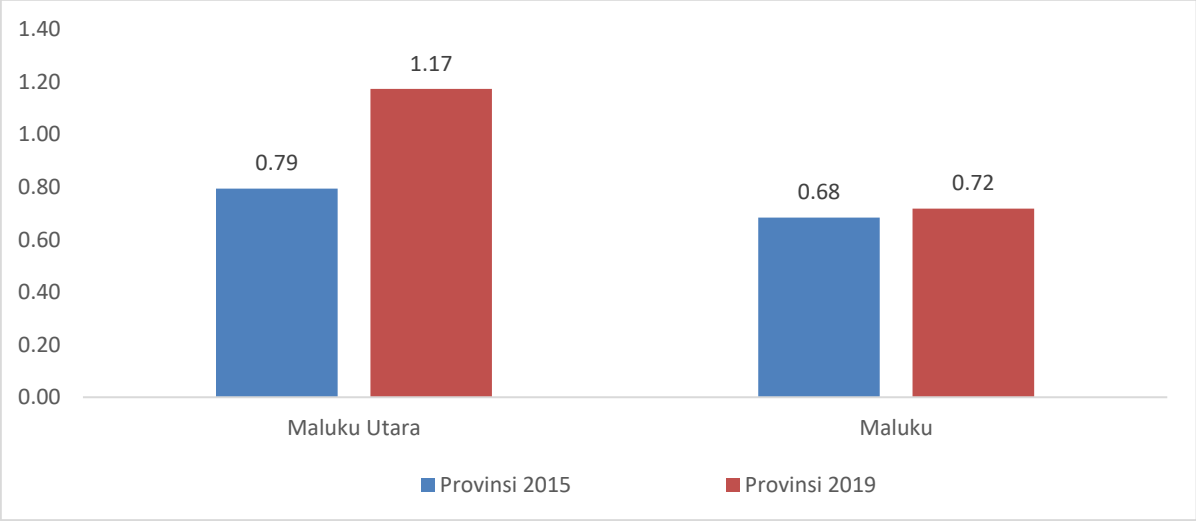

Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2019

Sementara berdasarkan rasio kredit bermasalah terhadap jumlah pinjaman/kredit di wilayah Maluku, baik Provinsi Maluku maupun Provinsi Maluku Utara cenderung turun dibandingkan dengan tahun 2014 dengan 2019. Di masa pandemi Covid-19 pun, kedua provinsi ini menurun rasio kredit bermasalahnya terhadap jumlah pinjaman pada April 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 (**Gambar 48**).

Gambar 48:
Rasio Kredit Bermasalah terhadap Pinjaman/Kredit menurut Provinsi

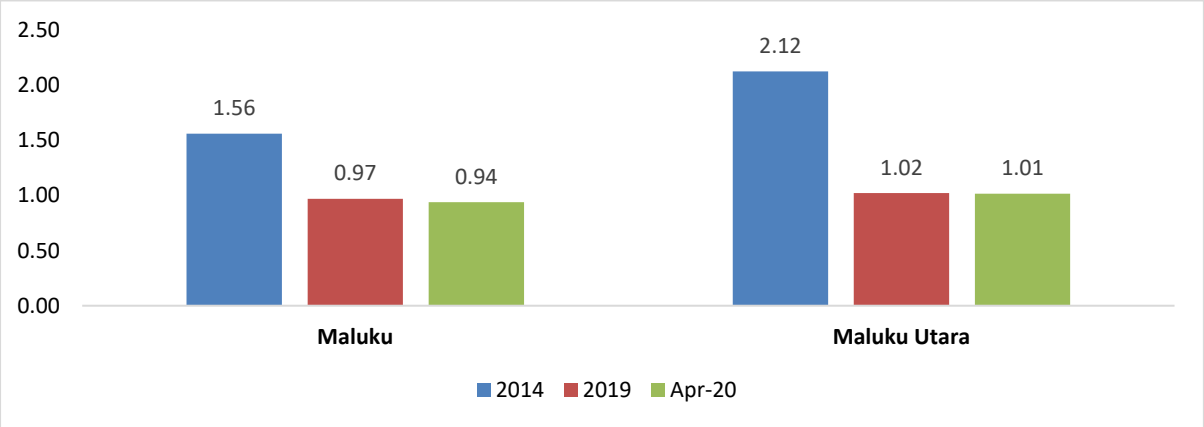

Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2018

4.5. Pembangunan Sektor Unggulan

Pengembangan Sektor Pangan dan Perkebunan

Tanaman Pangan. Produksi padi tahun 2020 mencapai 162 ribu ton atau 0,29 persen dari total produksi padi nasional, dengan produktivitas 4,04 ton/ha, masih lebih rendah dari produktivitas padi nasional (**Gambar 49**). Perkembangan produksi padi selama 2016-2020 rata-rata menurun 4,6 ribu ton per tahun atau menurun 1,29 persen per tahun. Tahun 2018 menjadi tahun dengan penurunan tertinggi sebesar 35,3 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan luas panen rata-rata 1,6 ribu hektar per tahun. Penurunan luas panen tertinggi terjadi pada tahun 2018 mencapai 10,75 ribu hektar dan ini sangat mempengarui produksi di tahun 2018. Produksi padi terbesar berada di Provinsi Maluku mencapai 119 ribu ton atau 73,69 persen dari produksi padi di wilayah Maluku (**Gambar 50**).

Gambar 49:
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi di Wilayah Maluku Tahun 2016-2020

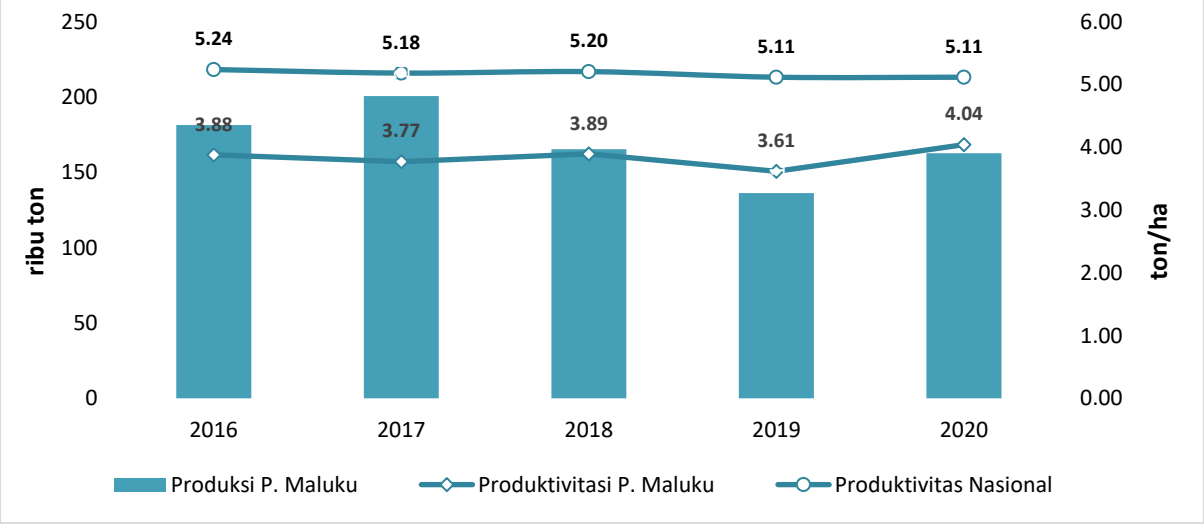

Sumber: BPS, Tahun 2020

Gambar 50:

Distribusi Produksi Padi menurut Wilayah dan Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2020

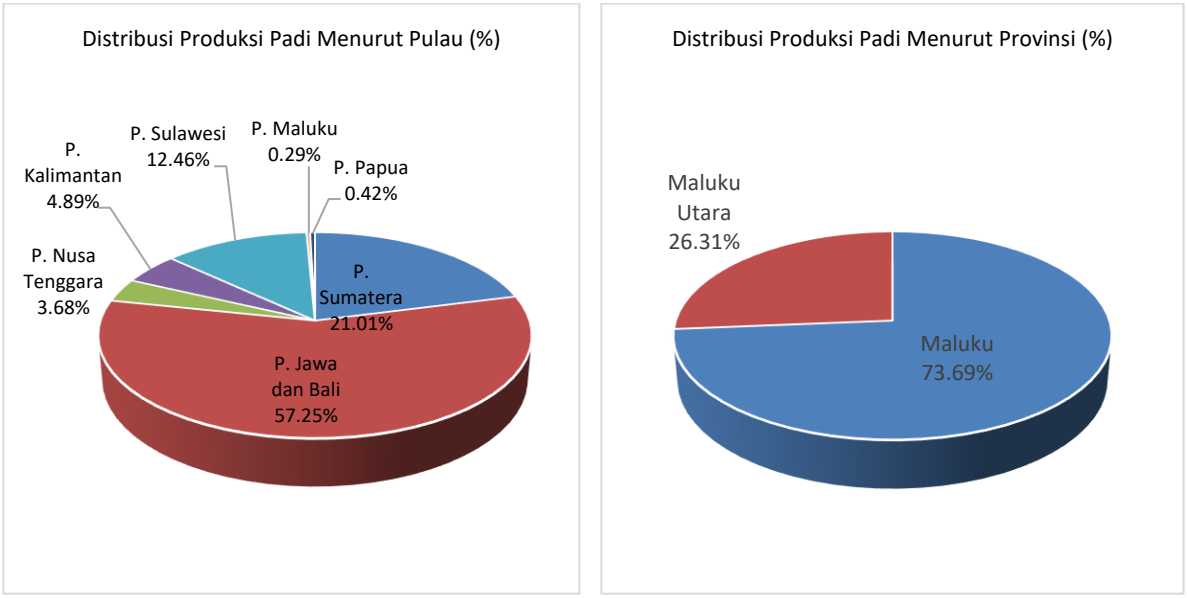

Sumber: BPS, Tahun 2020

Produksi jagung tahun 2018 mencapai 278 ribu ton atau sekitar 0,93 persen dari total produksi jagung nasional, dengan produktivitas sebesar 2,7 ton/ha lebih rendah dari produktivitas jagung nasional (5,24 ton/ha). Produksi jagung selama periode 2015-2018 rata-rata meningkat sebesar 62,1 ribu ton per tahun. Untuk luas panen juga terjadi peningkatan luas panen rata-rata sebesar 23,12 ribu ha per tahun. Produksi jagung terbesar terdapat di Provinsi Maluku Utara diikuti oleh Provinsi Maluku, yaitu masing-masing mencapai 237 ribu ton (85,43 persen) dan 40,5 ribu ton (14,57 persen) dari produksi jagung wilayah Maluku.

Gambar 51:

Perkembangan Produksi dan Produktivitas Jagung di Wilayah Maluku Tahun 2014-2018

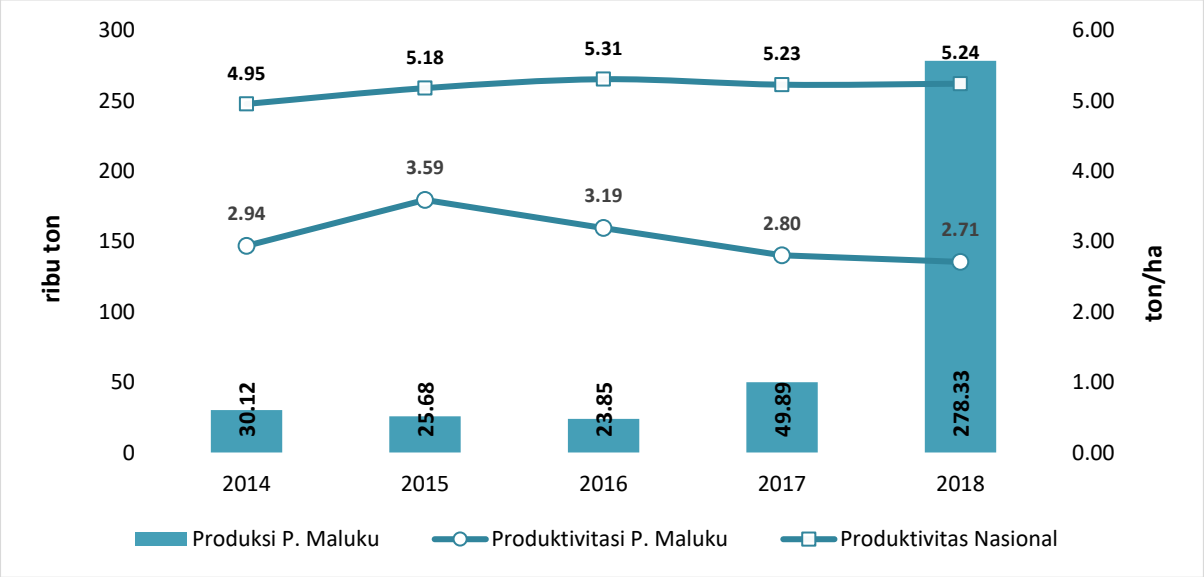

Sumber: BPS, Tahun 2020

Gambar 52:

Distribusi Produksi Jagung menurut Wilayah dan Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2018

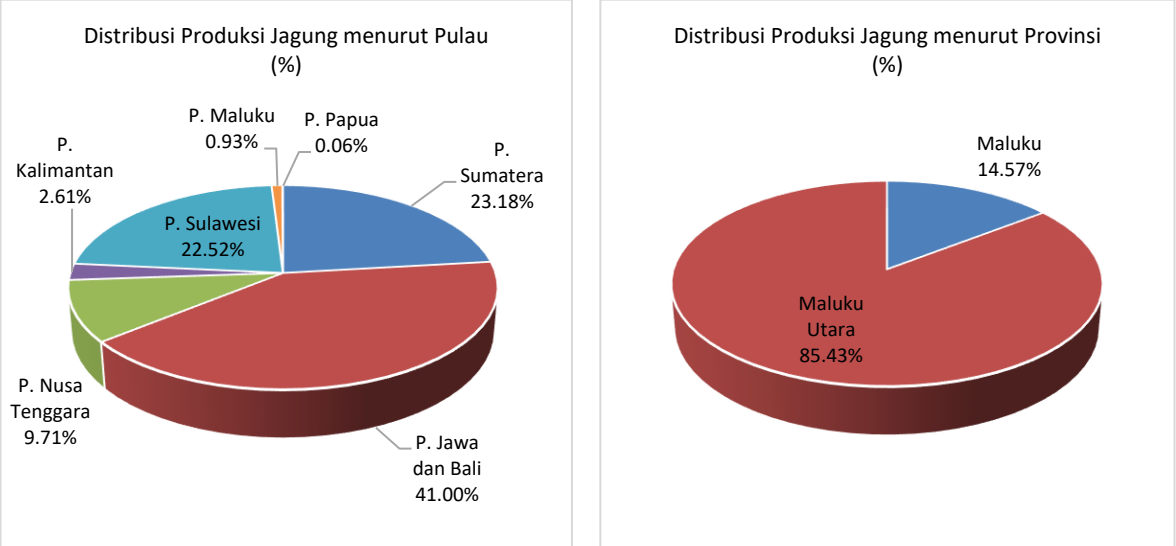

Sumber: BPS, Tahun 2019

Produksi kedelai tahun 2018 mencapai 343 ton atau sekitar 0,03 persen dari total produksi kedelai nasional, dengan produktivitas sebesar 0,74 ton/ha atau lebih rendah dibandingkan produktivitas kedelai nasional (1,44 ton/ha). Produksi kedelai selama periode 2015-2018 mengalami penurunan, dengan rata-rata penurunan sebesar 249 ton per tahun atau 8,9 persen per tahun.

Terjadi penurunan produksi di tahun 2018 sebesar 1.591 ton atau sekitar 82,26 persen dari tahun sebelumnya. Untuk luas panen juga mengalami penurunan yang sangat tajam di tahun 2018 hingga 466 hektar dimana tahun sebelumnya 1.663 hektar, dengan *share* 0,07 persen terhadap luas lahan nasional. Produksi kedelai terbesar tahun 2018 di wilayah Maluku terdapat di Provinsi Maluku sebesar 228 ton (66,74 %), dan di Provinsi Maluku Utara sebesar 115 ton (33,53%) dari produksi kedelai wilayah Maluku.

Gambar 53:

Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Kedelai di Wilayah Maluku Tahun 2014-2018

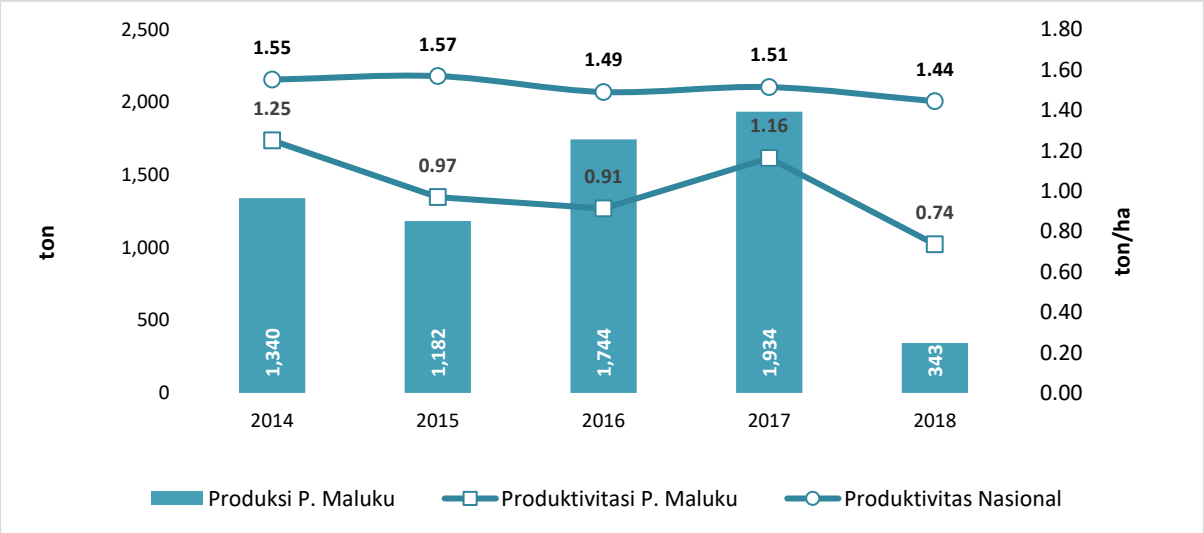

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Gambar 54:

Distribusi Produksi Kedelai menurut Wilayah dan Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2018

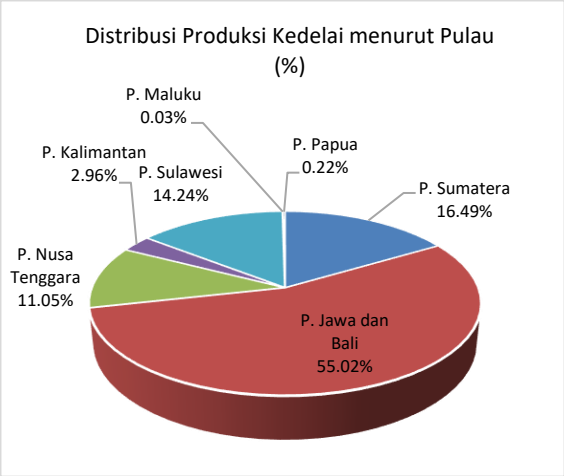

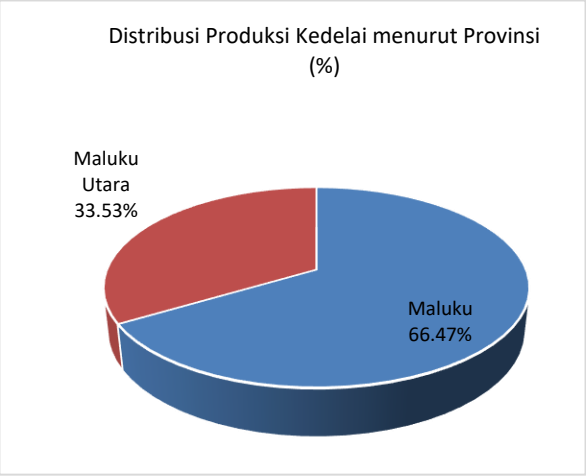

Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 42 :

Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Padi tahun 2020 dan Jagung serta Kedelai tahun 2018 menurut Provinsi di Wilayah Maluku.

Provinsi	Padi			Jagung			Kedelai		
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
Maluku	29.644	119.828	4,04	21,724	40,550	1.87	336	228	0.68
Maluku Utara	10.608	42.778	4,03	81,026	237,778	2.93	130	115	0.88

Sumber: BPS, Tahun 2020

Tanaman Perkebunan. Komoditas terbesar yang dihasilkan di wilayah Maluku antara lain kelapa, kakao, kelapa sawit, dan karet (**Tabel 43**). Produksi kelapa di wilayah Maluku tahun 2019 sebesar 307,6 ribu ton atau 10,88 persen dari produksi kelapa sawit nasional, turun jika dibandingkan dengan produksi tahun 2015. Selain kelapa, komoditas lainnya adalah kakao dengan produksi mencapai 17,8 ribu ton atau sekitar 2,27 persen dari total produksi kakao nasional. Sementara kelapa sawit menghasilkan produksi sebesar 25,3 ribu ton atau 0,06 persen dari produksi kelapa sawit nasional. Komoditas lain yang juga memiiki *share* tinggi yaitu karet dengan *share* sebesar 0,04 persen dari nasional dengan produksi sebesar 1,4 ribu ton dari produksi nasional sebesar 3,45 juta ton.

Tabel 43:

Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Utama Wilayah Maluku Tahun 2015 dan 2019

Komoditi	P. Maluku (000 ton)		Nasional (000 ton)		Share (%)	
	2015	2019	2015	2019	2015	2019
Kelapa Sawit	0.0	25.3	42,447.2	45,861.0	0.0	0.1
Kelapa	328.9	307.6	2,920.7	2,828.4	11.3	10.9
Karet	0.8	1.4	3,145.3	3,449.0	0.0	0.0
Kopi	0.5	0.4	639.2	761.1	0.1	0.1
Kakao	17.3	17.8	593.2	784.1	2.9	2.3
Tebu	0.0	0.0	2498.1	2258.2	0.0	0.0
Teh	0.0	0.0	132.5	137.8	0.0	0.0
Tembakau	0.0	0.0	193.7	197.4	0.0	0.0

Sumber: BPS, Tahun 2020

Produksi kelapa terbesar terdapat di Provinsi Maluku Utara diikuti oleh Provinsi Maluku dengan produksi masing-masing sebesar 210 ribu ton dan 97,6 ribu ton. Sedangkan produksi kakao terbesar di Provinsi Maluku Utara dengan produksi sebesar 9,6 ribu ton atau 53,93 persen dari total produksi kakao di Maluku. Sementara produksi kelapa sawit dan karet terbesar di wilayah Maluku terdapat di Provinsi Maluku, untuk kelapa sawit sebesar 25,3 ribu ton dan untuk karet di provinsi yang sama dengan produksi sebesar 1,4 ribu ton (**Tabel 44**).

Tabel 44:
Penyebaran Produksi Tanaman Perkebunan Utama menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2019

Provinsi	Kelapa		Kakao		Kelapa Sawit		Karet	
	ribu ton	%	ribu ton	%	ribu ton	%	tibu ton	%
Maluku	97.6	31.7	8.2	46.1	25.3	100.0	1.4	100.0
Maluku Utara	210	68.3	9.6	53.9	-	-	-	-
TOTAL	**307.60**	**100.00**	**17.80**	**100.00**	**25.30**	**100.00**	**1.40**	**100.00**

Sumber: BPS, Tahun 2020

Peternakan. Populasi ternak besar paling banyak diusahakan meliputi jenis kambing, babi, dan sapi potong. Populasi ternak kambing tahun 2019 mencapai 250 ribu ekor, babi sebanyak 159 ribu ekor dan sapi potong sebanyak 142 ribu ekor (**Gambar 55**). Penyebaran populasi ternak babi dan sapi potong didominasi oleh Provinsi Maluku, sedangkan kambing terbesar didominasi oleh di Provinsi Maluku Utara, dengan populasi ternak babi berjumlah 87,9 ribu ekor, sapi potong 84,3 ribu ekor, dan kambing sejumlah 144,4 ribu ekor (**Tabel 45**).

Gambar 55 :
Perkembangan Populasi Ternak Besar di Wilayah Maluku Tahun 2015 dan 2019,
(dalam ribu ekor)

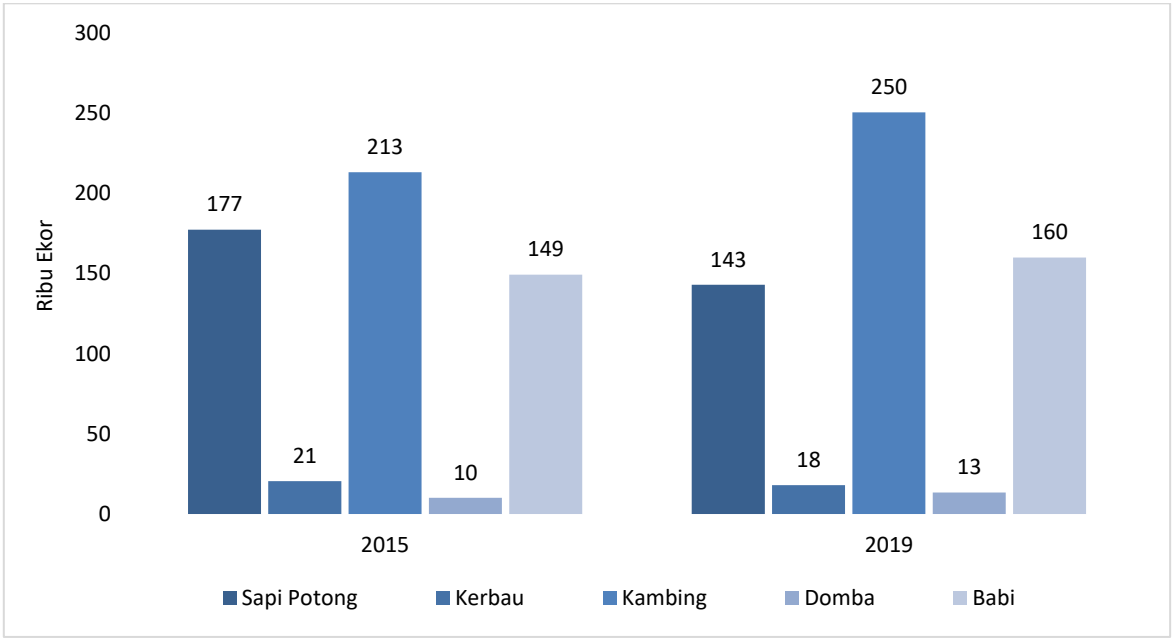

Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 45:

Populasi Ternak Besar menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2019 (ekor)

Provinsi	2019				
	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
Maluku	84,330	17,418	105,915	13,434	87,999
Maluku Utara	58,509	539	144,394	0	71,890
TOTAL	**142,839**	**17,957**	**250,309**	**13,434**	**159,889**

Sumber: BPS, Tahun 2020

Populasi ternak unggas terbesar meliputi jenis ayam buras dan ras pedaging dengan populasi pada tahun 2019 sebesar 3.56 juta ekor ayam buras dan 942 ribu ekor ayam ras pedaging. Jika diperhatikan pada (**Gambar 56)**, populasi unggas di wilayah Maluku terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2019 terutama untuk ayam ras pedaging yang artinya kebutuhan akan protein hewani dari ayam permintaannya semakin meningkat di wilayah Maluku. Hampir semua populasi unggas, seperti ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik manila terbesar didominasi di Provinsi Maluku (**Tabel 46**).

Gambar 56:

Perkembangan Populasi Ternak Unggas di Wilayah Maluku Tahun 2015 dan 2019, (ribu ekor)

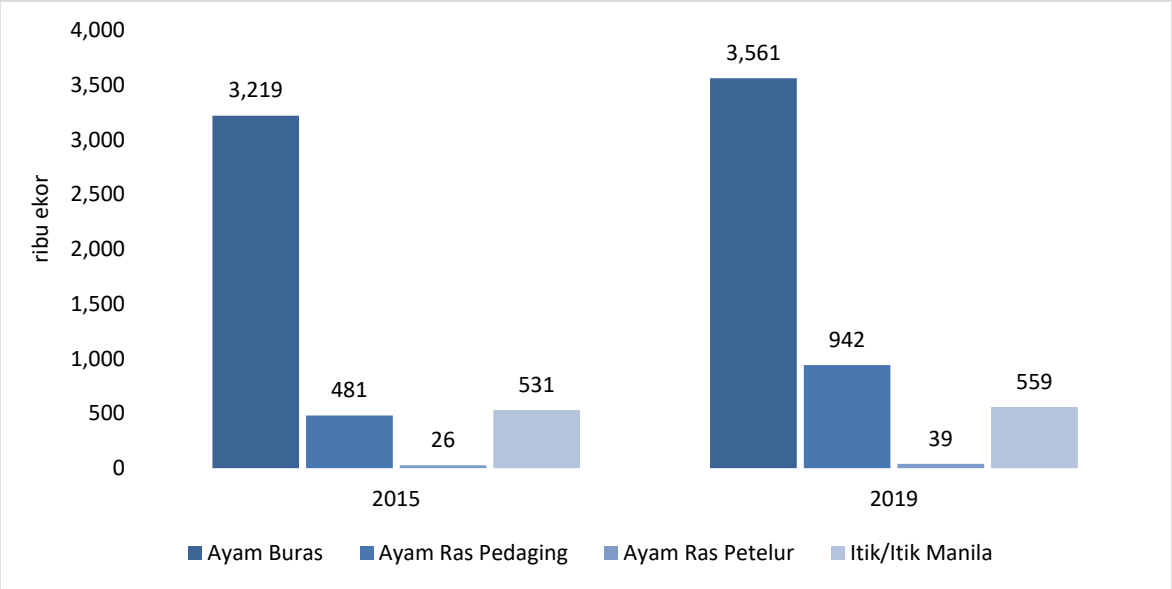

Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 46:

Perkembangan Populasi Ternak Unggas menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015 dan 2019, (ribu ekor)

Provinsi	Ayam Buras		Ayam Ras Pedaging		Ayam Ras Petelur		Itik/Itik Manila	
	2015	2019	2015	2019	2015	2019	2015	2019
Maluku	2,597	2,871	74	682	10	34.379	476.073	454.653
Maluku Utara	621	690	406	259	16	4.908	54.844	104.713
TOTAL	**3,219**	**3,219**	**3,561**	**481**	**942**	**26**	**39**	**531**

Sumber: BPS, Tahun 2020

Pengembangan Sektor Kemaritiman dan Kelautan.

Perikanan dan Kelautan. Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan di tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2014 kecuali perikanan tangkap perairan umum. Sedangkan perikanan budidaya tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013 kecuali untuk tambak dan kolam. Produksi perikanan tangkap 2018 mencapai 889 ribu ton atau sekitar 12,09 persen dari produksi perikanan tangkap nasional, sedangkan produksi perikanan budidaya sebesar 775 ribu ton atau sekitar 5,05 persen dari produksi perikanan budidaya nasional. Jika dilihat dari jenis perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap tahun 2018 didominasi oleh perikanan laut sebesar 889 ribu ton atau 100 persen dari total perikanan tangkap di wilayah Maluku. Daerah dengan produksi perikanan tangkap terbesar berada di Provinsi Maluku. Sedangkan untuk perikanan budidaya, produksi tahun 2018 didominasi oleh budidaya laut sebesar 769 ribu ton atau sekitar 99,12 % dari total produksi perikanan budidaya di wilayah Maluku. Provinsi dengan produksi perikanan budidaya terbesar adalah Provinsi Maluku.

Gambar 57:
Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya berdasarkan Wilayah di Indonesia, (ton)

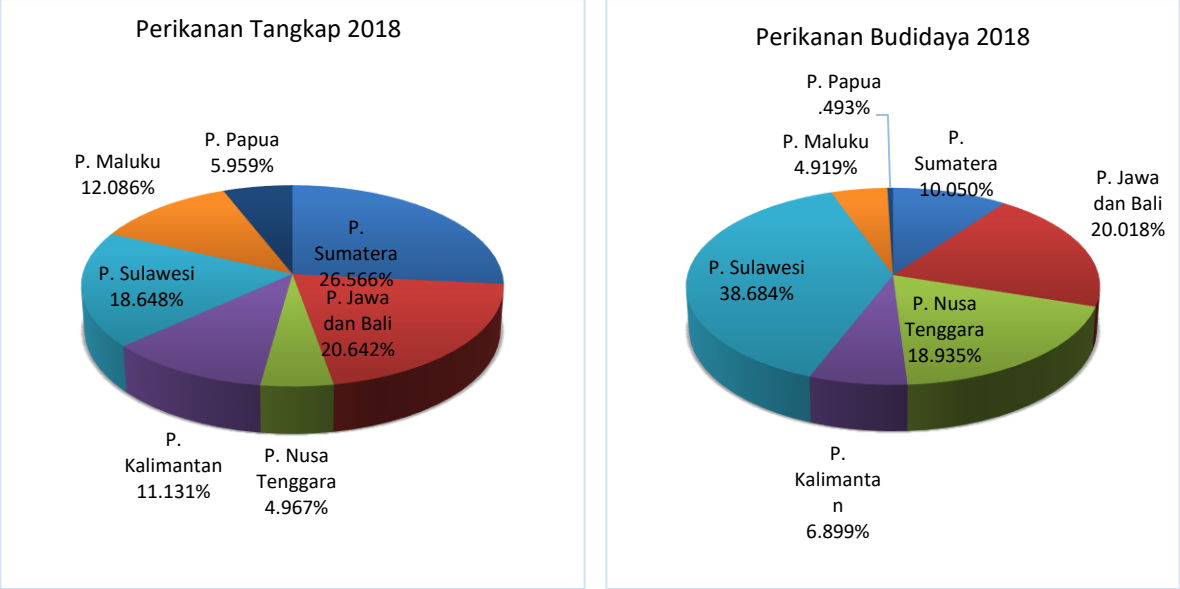

Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 47:
Perkembangan Perikanan Tangkap di Wilayah Maluku Tahun 2014 dan 2018 bBerdasarkan Provinsi, (ton)

Provinsi	Perikanan Laut		Perairan Umum		Jumlah	
	2014	2018	2014	2018	2014	2018
Maluku	538.121	603.000	27	0	538.148	603.000
Maluku Utara	218.097	286.629	0	0	218.097	286.629
TOTAL	**756.218**	**889.629**	**27**	**0**	**756.245**	**889.629**

Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 48:

Perkembangan Perikanan Budidaya di Wilayah Maluku tahun 2014 dan 2018 berdasarkan Provinsi, (ton)

Provinsi	Budidaya Laut		Tambak		Kolam		Keramba		Jaring Apung		Jaring Tancap		Sawah	
	2014	2018	2014	2018	2014	2018	2014	2018	2014	2018	2014	2018	2014	2018
Maluku	496.004	664.640	5.415	925	163	176	-	-	-	4.251	-	-	-	7
Maluku Utara	103.213	104.422	156	80	569	395	-	679	37	279	-	1	-	-
TOTAL	**599.218**	**769.063**	**5.571**	**1.005**	**732**	**571**	**-**	**679**	**37**	**4.530**	**-**	**1**	**-**	**7**

Sumber: BPS, Tahun 2020

Pengembangan Sektor Pariwisata dan Industri.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang merupakan motor penggerak perekonomian di Indonesia. Kekayaan alam Indonesia yang tersebar luas menjadikan wilayah Indonesia unggul dalam sektor pariwisata. Keberadaan destinasi-destinasi potensial seperti wisata budaya, wisata alam, agro wisata, desa wisata dan wisata-wisata tematik lainnya. Perkembangan pariwisata di Indonesia salah satunya dapat dilihat dari perkembangan jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata sebagai produk unggulan daerah di masa mendatang, pemerintah harus melakukan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang lebih memadai.

Salah satu indikator kinerja sektor pariwisata dapat ditunjukan dengan perkembangan jumlah wisatawan baik yang berasal dari mancanegara maupun domestik. Perkembangan jumlah tamu asing dan domestik dari tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan tamu asing di wilayah Maluku mencapai 12.919 orang dengan pertumbuhan rata-rata pertahunnya sebesar -14,3 persen per tahun dengan *share* 0,09 persen dari total Indonesia. Apabila dilihat perkembangannya provinsi dengan jumlah tamu asing terbesar ada di Provinsi Maluku dan diikuti oleh Provinsi Maluku Utara (**Tabel 49**).

Sementara untuk perkembangan jumlah tamu domestik tahun 2019 mencapai 947 ribu orang, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata 2015-2019 sebesar 1,9 persen per tahun. Jumlah tamu domestik terbesar menurrut Provinsi ada di Provinsi Maluku (**Tabel 50**).

Tabel 49 :

Jumlah Tamu Asing pada Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2015-2019, (orang)

Provinsi	Tamu Asing Hotel Bintang dan Non Bintang					Rata-Rata
	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan
M a l u k u	87.595	8.684	10.109	14.806	11.743	-12,0%
Maluku Utara	686	2.226	1.320	2.407	1.176	53,7%
MALUKU	**88.281**	**10.910**	**11.429**	**17.213**	**12.919**	**-14,3%**
INDONESIA	**11.936.138**	**14.011.814**	**15.276.184**	**20.118.749**	**14.590.705**	**6,6%**
SHARE (%)	**0,17**	**0,63**	**0,07**	**0,06**	**0,12**	

Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 50 :

Jumlah Tamu Domestik pada Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2015-2019, (orang)

Provinsi	Tamu Domestik Hotel Berbintang dan Non Berbintang					Rata-Rata Pertumbuhan
	2015	2016	2017	2018	2019	
Maluku	745.223	298.936	356.846	451.225	546.066	1,7%
Maluku Utara	172.303	418.840	452.308	447.731	401.679	34,9%
MALUKU	**917.525**	**717.776**	**809.153**	**898.956**	**947.745**	**1,9%**
INDONESIA	**68.908.048**	**118.392.155**	**128.376.800**	**132.689.627**	**131.437.282**	20,7%
SHARE (%)	**1,33**	**0,61**	**0,63**	**0,68**	**0,72**	

Sumber: BPS, Tahun 2020

Untuk perkembangan jumlah akomodasi/hotel, secara nasional di indonesia terdapat 28.230 unit hotel dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2014-2018 sebesar 15,57 persen. Di wilayah Maluku sendiri pada tahun 2018 jumlah hotel yang tercatat sebanyak 607 unit dengan *share* terhadap nasional sebesar 2,15 persen yang di dominasi oleh hotel non-bintang dengan persentase 96 persen dari total hotel yang ada di wilayah Maluku. Provinsi dengan jumlah hotel terbesar ada di Provinsi Maluku. Untuk jumlah kamar di wilayah Maluku tersedia sebanyak 12.698 kamar dengan Provinsi yang memiliki kamar terbanyak ada di Provinsi Maluku.

Tabel 51 :

Jumlah Akomodasi/Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2014-2018

Provinsi	Jumlah Akomodasi Berbintang dan Non Bintang					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2018	Pertumbuhan
Maluku	199	201	203	235	341	15.7%
Maluku Utara	171	196	198	199	266	12.5%
MALUKU	**370**	**397**	**401**	**434**	**607**	14.1%
INDONESIA	**16,685**	**17,484**	**18,353**	**18,829**	**28,230**	**15.6%**
SHARE (%)	**2.22**	**2.27**	**2.18**	**2.30**	**2.15**	

Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 52 :

Jumlah kamar Akomodasi/Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2014-2018

Provinsi	Jumlah Kamar Hotel Bintang dan Non Bintang					Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2018	Pertumbuhan
Maluku	5,220	5,187	5,161	6,090	7,927	11.76%
Maluku Utara	3,376	3,959	4,147	4,303	4,771	9.16%
MALUKU	**8,596**	**9,146**	**9,308**	**10,393**	**12,698**	10.50%
INDONESIA	**664,843**	**706,436**	**744,233**	**775,243**	**1,044,312**	**12.62%**
SHARE (%)	**1.29**	**1.29**	**1.25**	**1.34**	**1.22**	

Sumber: BPS, Tahun 2020

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, perhotelan berkontribusi secara nasional menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 652 ribu orang di tahun 2018 yang berkerja di hotel bintang dan non-bintang dengan pertumbuhan rata-rata 25,50 persen pertahun. Pertumbuhan tenaga kerja rata-rata tertinggi di Provinsi Maluku Utara. Tetapi provinsi yang menyerap tenaga kerja terbanyak di tahun 2018 yaitu Provinsi Maluku.

Tabel 53 :

Jumlah Tenaga Kerja Akomodasi/Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2014-2018

Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja Akomodasi Bintang dan Non Bintang					Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2018	Pertumbuhan
M a l u k u	1,753	1,870	1,810	1,960	3,304	20.09%
Maluku Utara	1,031	1,160	1,154	1,148	2,188	25.50%
MALUKU	**2,784**	**3,030**	**2,965**	**3,108**	**5,492**	22.06%
INDONESIA	**307,280**	**326,315**	**333,123**	**340,416**	**652,018**	**25.50%**
SHARE (%)	**0.91**	**0.93**	**0.89**	**0.91**	**0.84**	

Sumber: BPS, Tahun 2020

Dilihat dari sisi tingkat penghunian kamar pada hotel bintang wilayah Maluku dalam satu tahun terakhir megalami penurunan. Pada bulan April 2020 tingkat penghunian kamar pada hotel bintang wilayah Maluku sebesar 12,9 poin, menurun dari tahun sebelunya yaitu pada bulan April 2019 sebesar 42,3 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi covid sangat berpengaruh terhadap aktivitas perhotelan di Provinsi Maluku. Akan tetapi dari gambar terlihat tren hingga oktober 2020 menunjukkan penimgkatan artinya sektor perhotelan sudah mulai bangkit walaupun masih lebih rendah di bandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 58 :

Tingkat Penghunian Kamar Pada Hotel Bintang di Wilayah Maluku Tahun 2019-2020

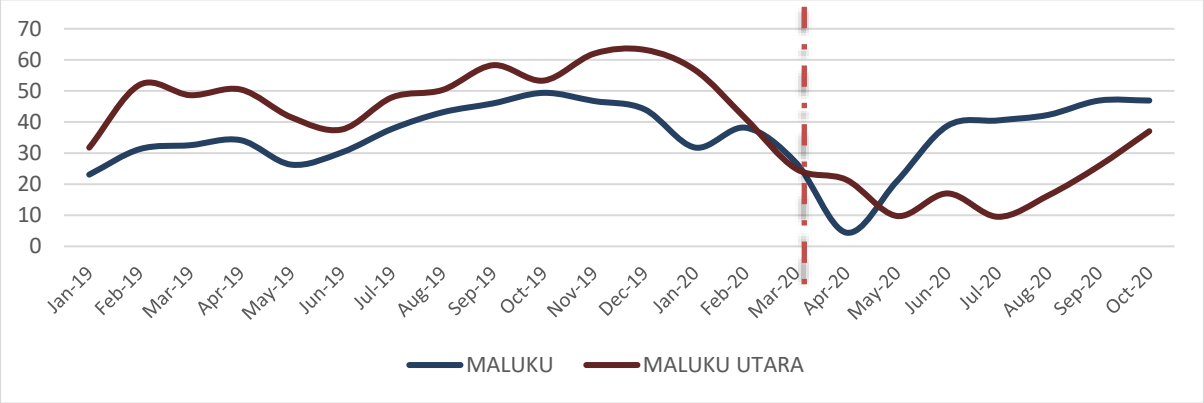

Sumber: BPS, Tahun 2020

Industri Mikro Kecil (IMK)

Perkembangan jumlah IMK di wilayah Maluku dalam 5 tahun terakhir mengalami Peningkatan. Peningkatan jumlah IMK tahun 2019 sebanyak 39.217 unit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 26.626 unit pada tahun 2015, artinya ada selisih peningkatan sebesar 12.59 unit sepanjang tahun 2015-2019. Jumlah IMK terbanyak terdapat di Provinsi Maluku dengan jumlah IMK sebanyak 25.004 unit pada tahun 2019, kemudian diikuti oleh Provinsi Maluku Utara dengan jumlah IMK sebanyak 14.213 unit (**Gambar 59**).

Sementara untuk total pendapatan (*revenue*) IMK Wilayah Maluku tahun 2019 sebesar 3,08 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2015 (1,6 triliun rupiah), dengan *revenue* terbesar di Provinsi Maluku. *Revenue* yang meningkat mengindikasikan bahwa IMK maju di wilayah Maluku. Sementara untuk penyerapan jumlah tenaga kerja IMK, total tenaga kerja yang terserap tahun 2019 mencapai 59 ribu orang meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 46 ribu orang. Penyerapan jumlah tenaga kerja IMK paling besar terdapat di Provinsi Maluku (**Tabel 54**).

Gambar 59:
Perkembangan Jumlah Industri Usaha Mikro-Kecil (IMK) Wilayah Maluku Tahun 2015 dan 2019, (dalam unit)

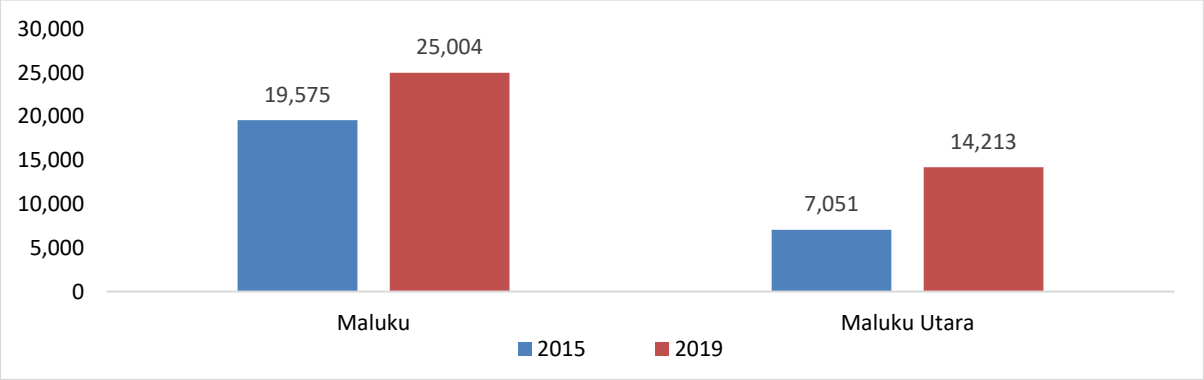

Sumber: BPS, Tahun 2019

Tabel 54:
Perkembangan Jumlah Pendapatan dan Tenaga Kerja Industri Mikro-Kecil menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015 dan 2019

Provinsi	Pendapatan (Rp. juta)			Tenaga Kerja (orang)		
	2015	2019	D 2015-2019	2015	2019	D 2015-2019
Maluku	1.199.999	1.593.273	393.274	34.376	35.719	1.343
Maluku Utara	436.571	1.495.393	1.058.822	11.659	23.818	12.159
MALUKU	**1.636.570**	**3.088.665**	**1.452.095**	**46.035**	**59.537**	**13.502**

Sumber: BPS, Tahun 2019

Industri Mengenah dan Besar

Perkembangan industri menengah besar di wilayah Maluku pada tahun 2017 menunjukkan bahwa kontribusi Wilayah Maluku terhadap total penciptaan nilai tambah Nasional sebesar 0,01 persen setara dengan 393 miliar. Provinsi yang berkontribusi paling besar di wilayah Maluku adalah Provinsi Maluku dengan kontribusi sebesar 305 miliar rupiah kemudian diikuti oleh Provinsi Maluku Utara dengan kontribusi sebesar 88 miliar rupiah. Dari sisi tenaga kerja, industri menengah besar di Provinsi Maluku menyerap tenaga kerja sebesar 2.441 orang dengan komposisi 1.747 orang laki-laki dan 694 orang perempuan. Sedangkan di Provinsi Maluku Utara menyerap tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Maluku (484 orang).

Gambar 60:
Komposisi Perkembangan Nilai Tambah Industri Menengah Besar di Indonesia Tahun 2017

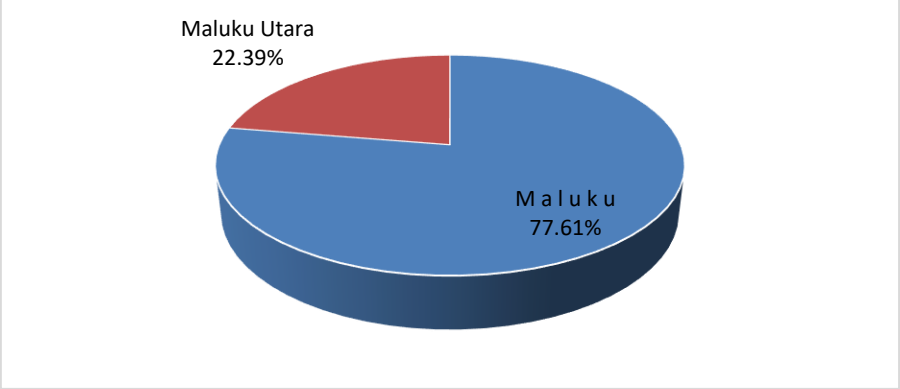

Sumber: Survey Industri, BPS

Gambar 61:
Nilai Tambah Industri Menengah Besar di Wilayah Maluku Berdasarkan Provinsi Tahun 2017

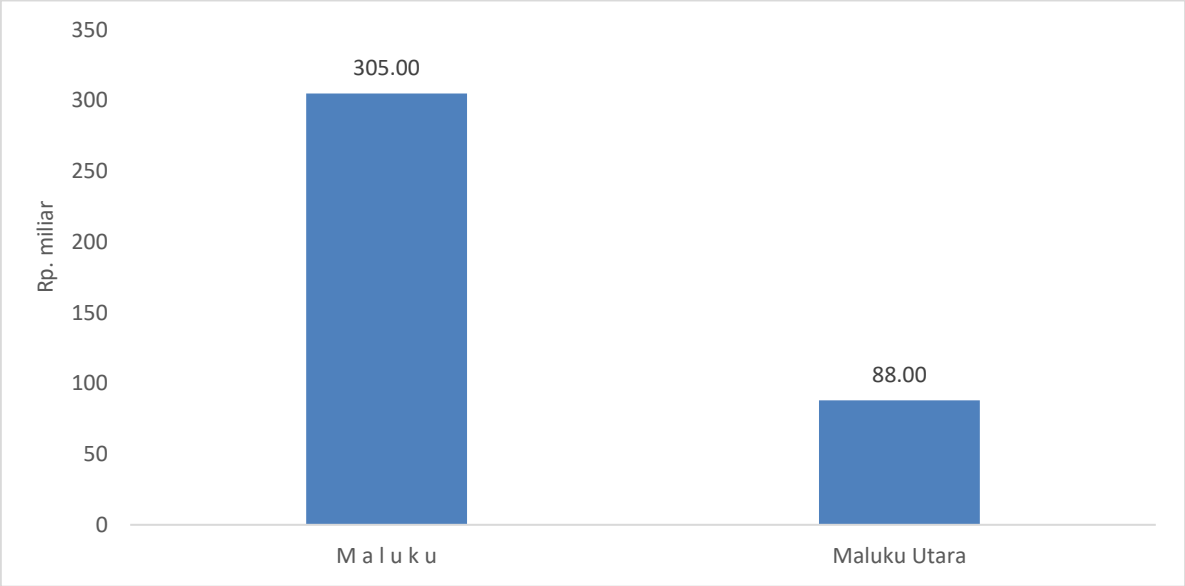

Sumber: Survey Industri, BPS

Gambar 62:
Jumlah Tenaga Kerja Industri Menengah Besar di Wilayah Maluku berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017

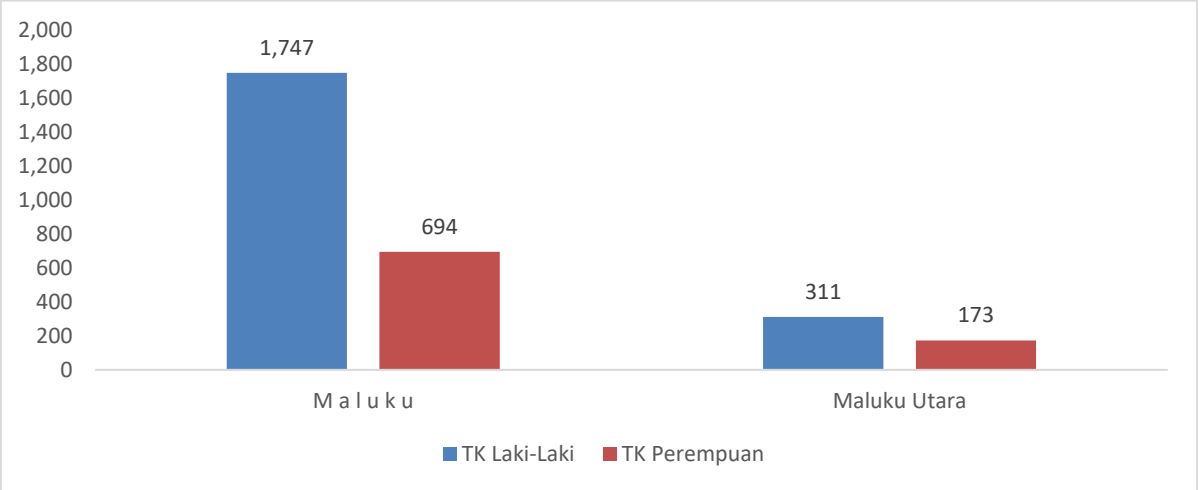

Sumber: Survey Industri, BPS

4.6. Perkembangan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Komponen utama pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Untuk menggambarkan perkembangan keuangan daerah antarprovinsi di wilayah Maluku digunakan data gabungan APBD Provinsi dan Kabupaten Kota (Se-Provinsi).

Gambar 63:
Perkembangan PAD dan Rasio Kemandirian Antarprovinsi Tahun 2015-2019

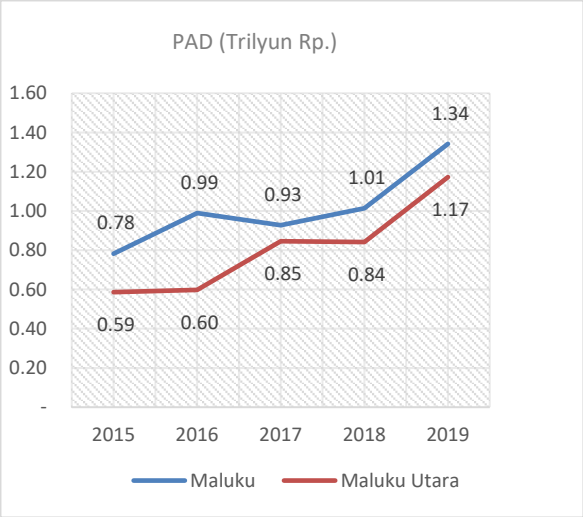

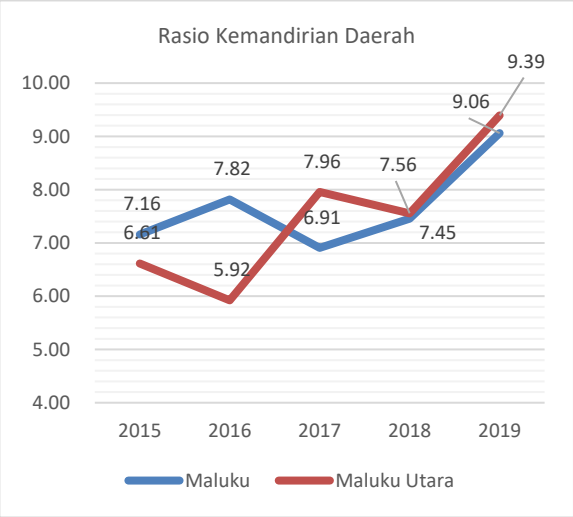

Jumlah PAD antarprovinsi di wilayah Maluku tahun 2019, tertinggi di Provinsi Maluku sebesar 1,34 triliun, sedangkan di Provinsi Maluku Utara sebesar 1,17 triliun (**Gambar 62**). Perkembangan PAD antarprovinsi di wilayah Maluku pada periode 2015-2019 secara umum menunjukkan tren meningkat, dengan pertumbuhan PAD tertinggi di Provinsi Maluku Utara sebesar 100,02 persen, dan Provinsi Maluku sebesar 71,55 persen (**Tabel 55**).

Tabel 55:
Perkembangan PAD dan Rasio Kemandirian Daerah Antarprovinsi Tahun 2015-2019

Provinsi	PAD (Rp. triliun)					Tumbuh ('15-'19)	Rasio PAD/APBD (%)					Δ ('15-19)
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
Maluku	0,78	0,99	0,93	1,01	1,34	71,55	7,16	7,82	6,91	7,45	9,06	1,90
Maluku Utara	0,59	0,60	0,85	0,84	1,17	100,02	6,61	5,92	7,96	7,56	9,39	2,78
MALUKU	**1,37**	**1,59**	**1,77**	**1,85**	**2,51**	**83,75**	**6,91**	**6,98**	**7,37**	**7,50**	**9,21**	**2,30**

Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020
Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Rasio Kemandirian Daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut, dan sebaliknya.

Rasio kemandirian daerah antarprovinsi pada periode 2015-2019 di Provinsi Maluku dan Maluku Utara menunjukkan tren meningkat, dengan peningkatan tertinggi di Provinsi Maluku Utara sebesar 2,78 persen, sedangkan di Provinsi Maluku sebesar 1,90 persen.

Belanja Daerah diseluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Wilayah Maluku pada tahun 2019 sebesar Rp. 28,21 triliun meningkat sebesar Rp. 8,35 triliun dibanding tahun 2015 (Rp. 19,86 triliun). Belanja daerah se-provinsi tertinggi pada tahun 2019 berada di Provinsi Maluku sebesar Rp. 15,18 triliun, dan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 13,03 triliun.

Gambar 64:

Perkembangan Belanja di Seluruh Wilayah Maluku Tahun 2015-2019

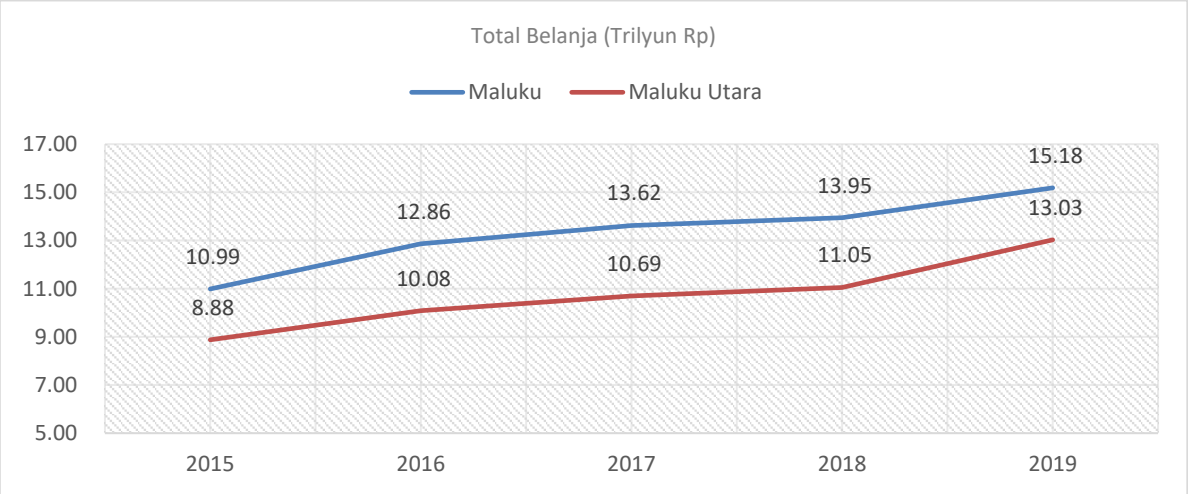

Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020
Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Tabel 56:

Perkembangan Belanja di Seluruh Wilayah Maluku Tahun 2015-2019

Provinsi	Tahun					Δ ('15-19)
	2015	2016	2017	2018	2019	
Maluku	10,99	12,86	13,62	13,95	15,18	4,20
MalukuUtara	8,88	10,08	10,69	11,05	13,03	4,15
MALUKU	**19,86**	**22,95**	**24,31**	**24,99**	**28,21**	**8,35**

Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020
Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Rasio Belanja Pegawai yang mencerminkan porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah, diharapkan dapat semakin menurun porsinya, sehingga dapat dioptimalkan untuk belanja modal dan belanja produktif lainnya yang dapat berdampak terhadap peningkatan kinerja perekonomian daerah. Total belanja pegawai antarprovinsi pada periode 2015-2019 seluruhnya menunjukkan peningkatan, dengan belanja pegawai tertinggi terdapat di Provinsi Maluku sebesar Rp. 4,86 triliun, sedangkan di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 3,99 triliun. Pertumbuhan belanja pegawai di Provinsi Maluku Utara sebesar 44,61 persen, dan lebih tinggi dibanding Provinsi Maluku sebesar 21,22 persen.

Gambar 65:

Perkembangan Belanja Pegawai dan Rasio Belanja terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019

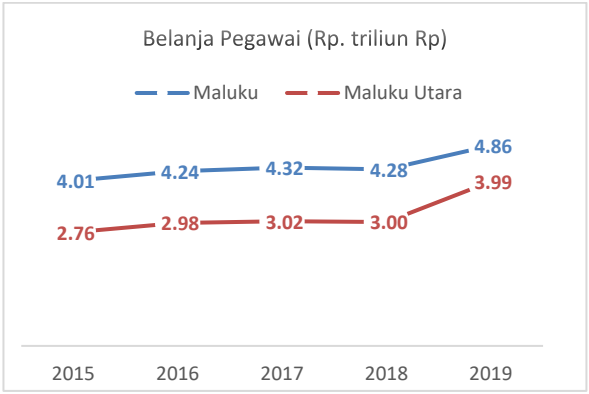

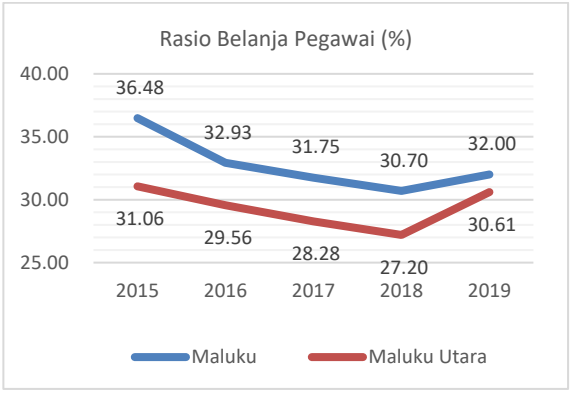

Rasio belanja pegawai di Provinsi Maluku dan Maluku Utara menunjukkan tren menurun selama periode 2015-2018, dan meningkat kembali di tahun 2019. Rasio di Provinsi Maluku pada tahun 2019 sebesar 32 persen, lebih tinggi dibanding Provinsi Maluku Utara sebesar 30,61 persen.

Tabel 57:

Perkembangan Belanja Pegawai dan Rasio Belanja terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019.

Provinsi	Belanja Pegawai (Rp. triliun)					Tumbuh ('15-'19)	Rasio Belanja Pegawai/ Total Belanja (%)					Δ '15-19
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
Maluku	4,01	4,24	4,32	4,28	4,86	21,22	36,48	32,93	31,75	30,70	32,00	-4,48
MalukuUtara	2,76	2,98	3,02	3,00	3,99	44,61	31,06	29,56	28,28	27,20	30,61	-0,46
MALUKU	**6,77**	**7,22**	**7,35**	**7,29**	**8,85**	**30,75**	**34,06**	**31,45**	**30,22**	**29,15**	**31,36**	**-2,70**

Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020
Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Rasio Belanja Modal dapat menunjukkan porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah dalam rangka investasi daerah untuk pembangunan, termasuk pemberian layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, rasio belanja modal semakin tinggi menunjukkan kinerja belanja daerah semakin produktif.

Gambar 66:

Perkembangan Belanja Modal dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019

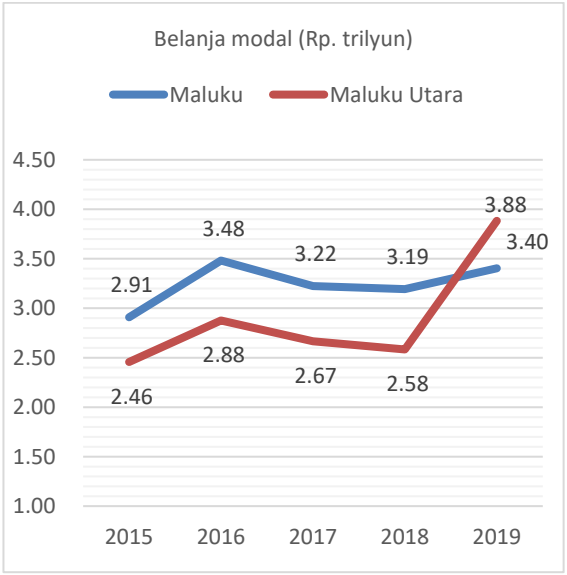

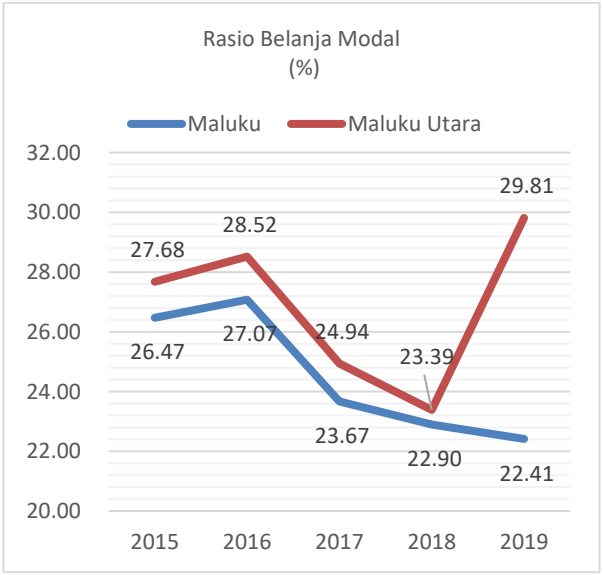

Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020
Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Secara absolut, belanja modal tahun 2019 tertinggi terdapat di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 3,88 triliun, dan Maluku sebesar Rp. 3,40 triliun. Pertumbuhan belanja modal antarprovinsi pada periode 2015-2019 menunjukkan pertumbuhan positif, dengan angka peningkatan di Provinsi Maluku Utara sebesar 58,07 persen, sedangkan di Provinsi Maluku sebesar 17,02 persen.

Berdasarkan gambaran rasio belanja modal terhadap total belanja seluruh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Maluku pada tahun 2015 sebesar 27,01 persen berkurang sebesar 1,18 persen menjadi 25,83 persen pada tahun 2019. Rasio belanja modal antarprovinsi pada periode 2015-2019, Provinsi Maluku menunjukkan penurunan rasio belanja modal sebesar 4,06 persen, sedangkan di Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan sebesar 2,13 persen.

Tabel 58:

Perkembangan Belanja Modal dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019.

Provinsi	Belanja Modal (triliun Rp.)					Tumbuh ('15-'19)	RASIO Belanja Modal/ Total Belanja (%)					Δ ('15-19)
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
Maluku	2,91	3,48	3,22	3,19	3,40	17,02	26,47	27,07	23,67	22,90	22,41	-4,06
Maluku Utara	2,46	2,88	2,67	2,58	3,88	58,07	27,68	28,52	24,94	23,39	29,81	2,13
MALUKU	**5,37**	**6,36**	**5,89**	**5,78**	**7,29**	**35,82**	**27,01**	**27,71**	**24,23**	**23,11**	**25,83**	**-1,18**

Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020

Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, dan untuk menunjukkan keberbandingannya digunakan Indeks Kapasitas Fiskal. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk: (a). pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah; (b). penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; dan/ atau (c). penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gambaran peta kapasitas fiskal ini menggambarkan APBD provinsi di wilayah Maluku.

Kapasitas fiskal di Provinsi Maluku menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan, yakni pada periode 2015-2017 menunjukkan tren menurun dari kategori rendah menjadi sangat rendah, namun di tahun 2019 meningkat menjadi kategori rendah. Sementara itu, di Provinsi Maluku Utara menunjukkan penurunan kategori kapasitas fiskal tinggi (2015 dan 2016) dan menurun drastis menjadi kategori sangat rendah pada periode 2017-2019.

Tabel 59:

Peta Kapasitas Fiskal Antarprovinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015-2019

Provinsi	2015		2016		2017		2018		2019	
	IKF	Kategori	IKF	kategori	IKF	kategori	IKF	kategori	IKF	Kategori
Maluku	0,30	rendah	0,34	rendah	0,29	Sangat Rendah	0,33	Sangat Rendah	0,32	Rendah
Maluku Utara	1,15	tinggi	1,01	tinggi	0,30	Sangat Rendah	0,30	Sangat Rendah	0,25	Sangat Rendah

Sumber: www. Jdih.kemenkeu.go.id

Gambar 67:

Peta kapasitas Fiskal Antarprovinsi di Wilayah Maluku Tahun 2015 dan Tahun 2019

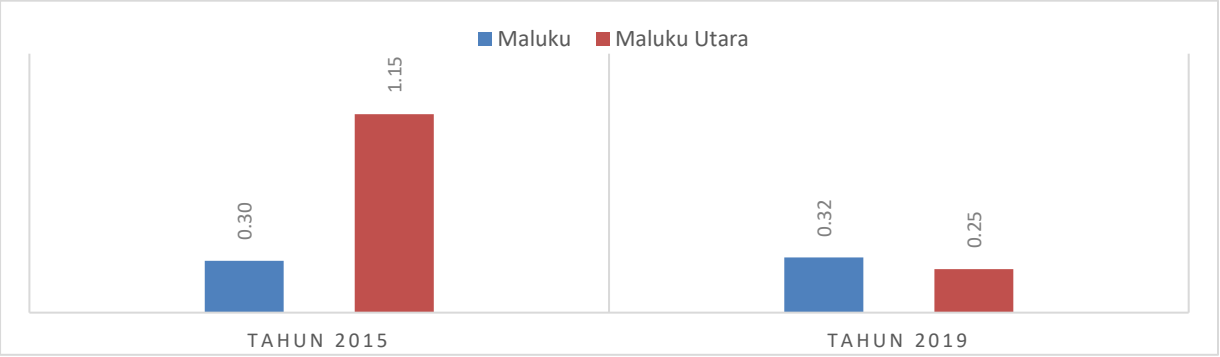

Sumber: www. Jdih.kemenkeu.go.id

PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

- Perkembangan panjang jalan dalam empat tahun terakhir tidak banyak mengalami banyak kenaikan di tahun 2015-2017, sedangkan di tahun 2018 tidak mengalami penambahan ruas jalan.
- Kondisi kualitas jalan di Wilayah Maluku pada tahun 2018 rata-rata termasuk kedalam kategori mantap (baik+sedang), yaitu mencapai 50,83 persen dan kondisi tidak mantap sebesar 49,17 persen dari total panjang jalan. Rata-rata persentase panjang jalan (Provinsi, Kabupaten dan Kota) dengan kualitas mantap terbesar dicapai oleh Provinsi Maluku kemudian diikuti oleh Provinsi Maluku Utara.
- Perkembangan produksi energi listrik di Wilayah Maluku meningkat, di tahun 2014 dan 2018 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun yang lain. Produksi listrik tahun 2018 mencapai 794,78 GWh atau turun sebesar 7,4 persen dari produksi tahun 2017.
- Perkembangan rasio elektrifikasi, dalam kurun waktu 2016-2019 Wilayah Maluku meningkat, walaupun dI Provinsi Maluku (91,34%) masih berada di bawah rata-rata rasio elektrifikasi nasional (99,0%).

05 PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

5.1. Jalan

Perkembangan panjang jalan dalam empat tahun terakhir tidak banyak mengalami banyak kenaikan di tahun 2015-2017, dan di tahun 2018 tidak mengalami penambahan ruas jalan **(Gambar 68**). Pada tahun 2018 total panjang jalan di wilayah Maluku tercatat sepanjang 17.645 km dengan panjang jalan negara sepanjang 2.975 km, jalan provinsi sepanjang 2.357 km, dan jalan kabupaten sepanjang 12.313 km. Jika di rasiokan dengan jumlah kendaraan di wilayah Maluku, dalam setiap kilometer menampung 66 kendaraan pada tahun 2018, dan trennya terus meningkat dari tahun 2015 hingga 2018.

Gambar 68:
Perkembangan Panjang Jalan Menurut Kewenangan di Wilayah Maluku
Tahun 2015-2018, (dalam Km)

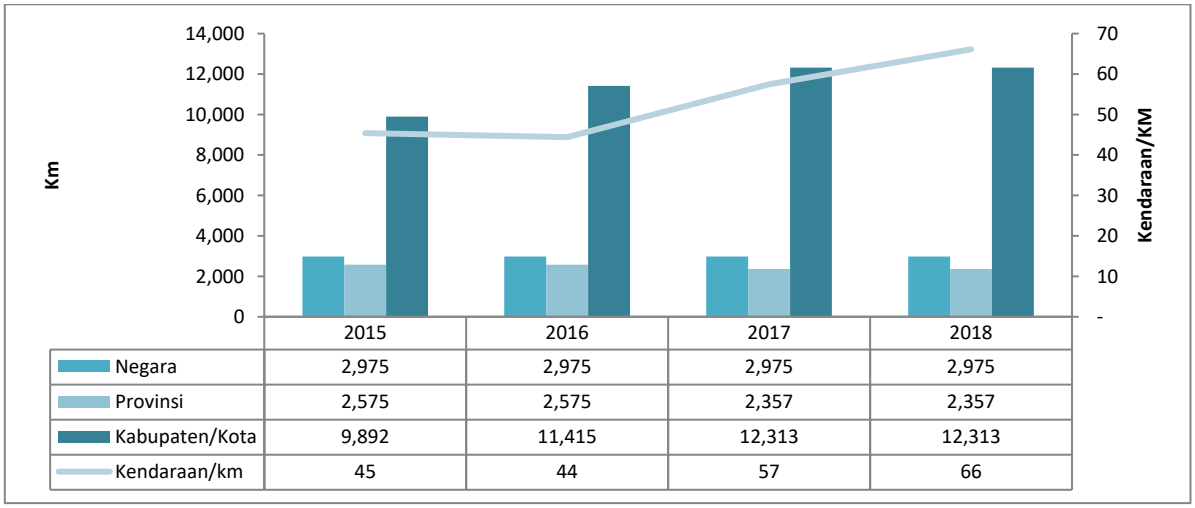

	2015	2016	2017	2018
Negara	2,975	2,975	2,975	2,975
Provinsi	2,575	2,575	2,357	2,357
Kabupaten/Kota	9,892	11,415	12,313	12,313
Kendaraan/km	45	44	57	66

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, 2019

Kondisi kualitas jalan di wilayah Maluku pada tahun 2018 rata-rata termasuk kedalam kategori mantap (baik+sedang), yaitu mencapai 50,83 persen dan kondisi tidak mantap sebesar 49,17 persen dari total panjang jalan. Rata-rata persentase panjang jalan (provinsi, kabupaten dan kota) dengan kualitas mantap terbesar dicapai oleh Provinsi Maluku dengan persentase yaitu mencapai 55,96 persen, dan untuk kualitas jalan dengan kelompok tidak mantap mencapai 44,04 persen. (**Tabel 60**).

Tabel 60:
Kualitas Jalan menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2018

Provinsi	Jalan Provinsi		Jalan Kabupate		Jalan Kota	
	% Mantap	% Tidak Mantap	% Mantap	% Tidak Mantap	% Mantap	% Tidak Mantap
Maluku	43,5	56,5	43,9	56,1	80,48	19,52
Maluku Utara	35,3	64,7	46,1	53,9	55,73	44,27

Sumber: Statistik Perhubungan, BPS

5.2. Listrik

Perkembangan produksi energi listrik di wilayah Maluku meningkat, di tahun 2014 dan 2018 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun yang lain. Produksi listrik tahun 2018 mencapai 794,78 GWh atau turun sebesar 7,4 persen dari produksi tahun 2017 (**Gambar 69**). Produksi energi listrik di wilayah Maluku seluruhnya dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yaitu mencapai 100 persen (**Gambar 70**).

Gambar 69:
Perkembangan Energi yang Diproduksi di Wilayah Maluku Tahun 2014-2018, (dalam GWh)

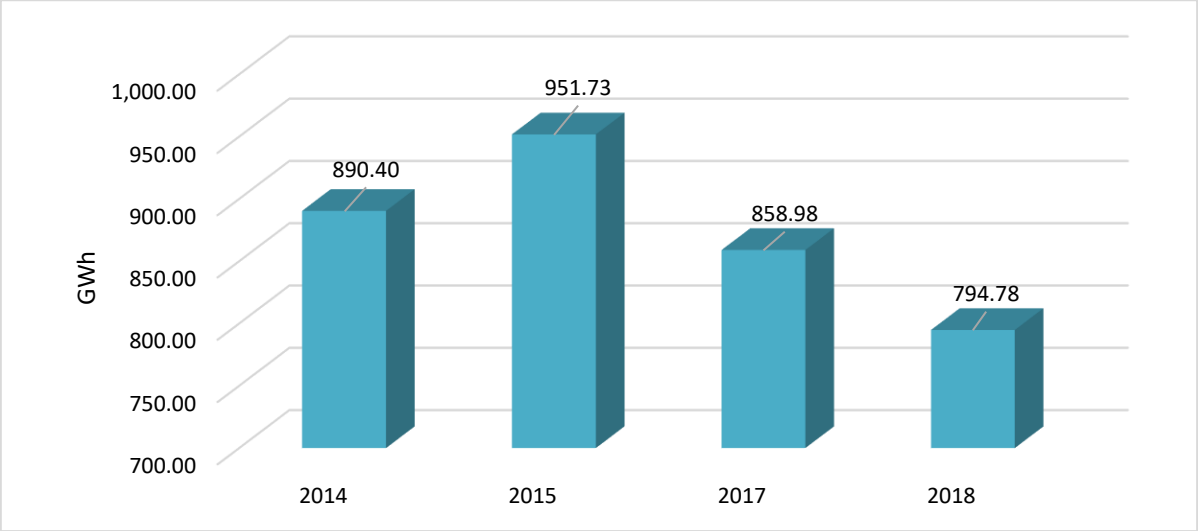

Sumber : BPS, 2020

Gambar 1:
Komposisi Produksi Energi Listrik menurut Jenis Pembangkit di Wilayah Maluku Tahun 2019, (dalam persen)

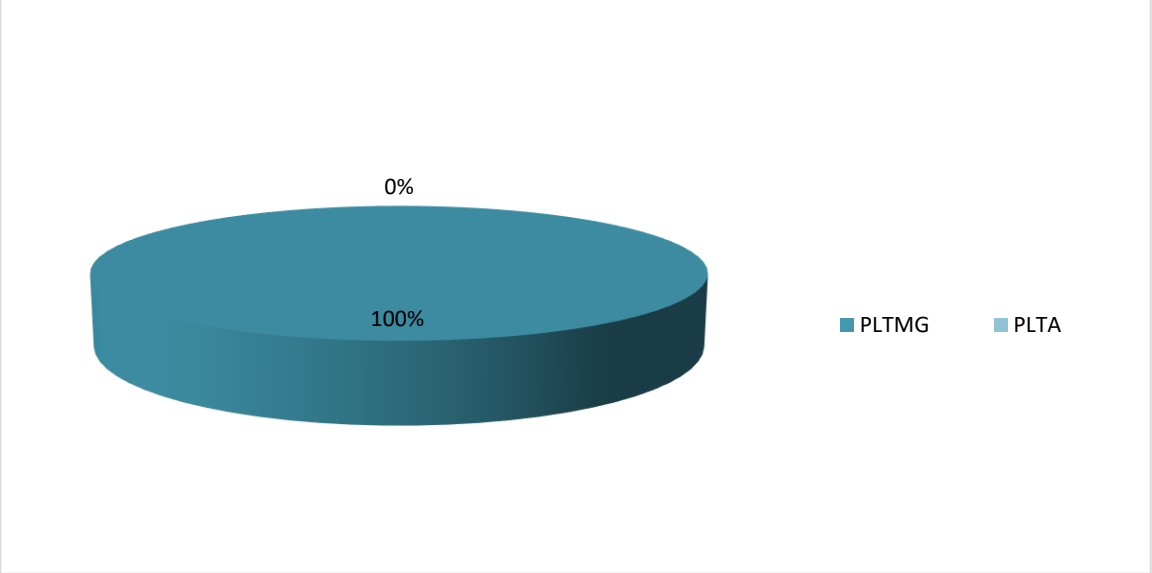

Sumber : BPS, 2020

Perkembangan rasio elektrifikasi, dalam kurun waktu 2016-2019 wilayah Maluku meningkat walaupun masih ada provinsi yang angkanya berada di bawah rata-rata rasio elektrifikasi nasional. Capaian rasio elektifikasi tahun 2016 mencapai 91,59 persen, lebih rendah 0,03 dibandingkan dengan nilai nasional (**Gambar 71**). Capaian rasio elektrifikasi di tahun 2019 mengalami peningkatan 3,48 persen, masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional 3,82 persen. Pada tahun 2019 hanya Provinsi Maluku yang memiliki angka rasio elektrifikasinya di bawah nasional. (**Gambar 72**).

Gambar 71:
Perkembangan Rasio Elektrifikasi Wilayah Maluku Tahun 2016-2019, (dalam persen)

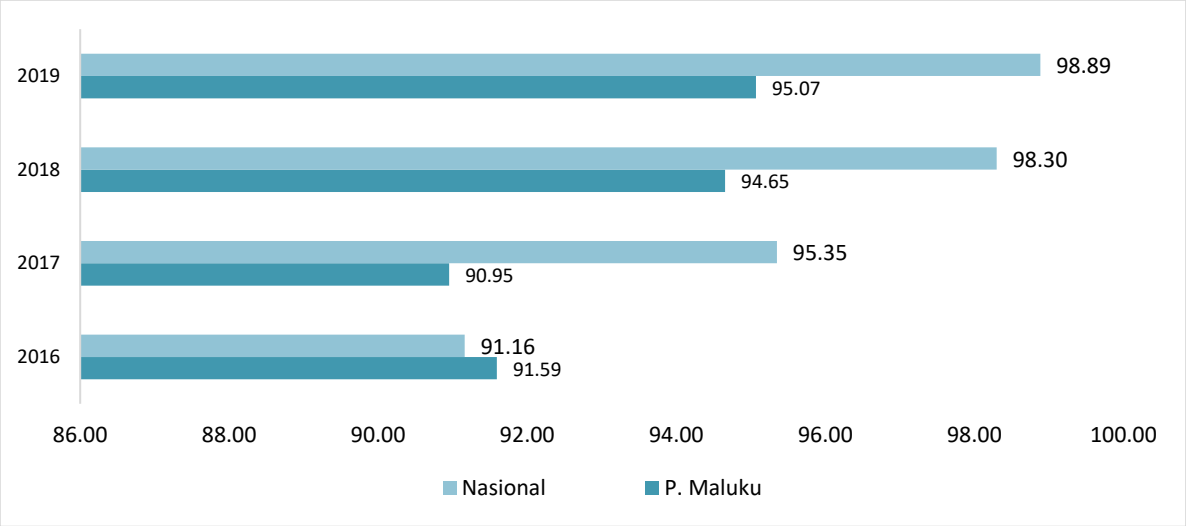

Sumber : BPS, 2020

Gambar 72:
Rasio Elektrifikasi menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2019, (dalam persen)

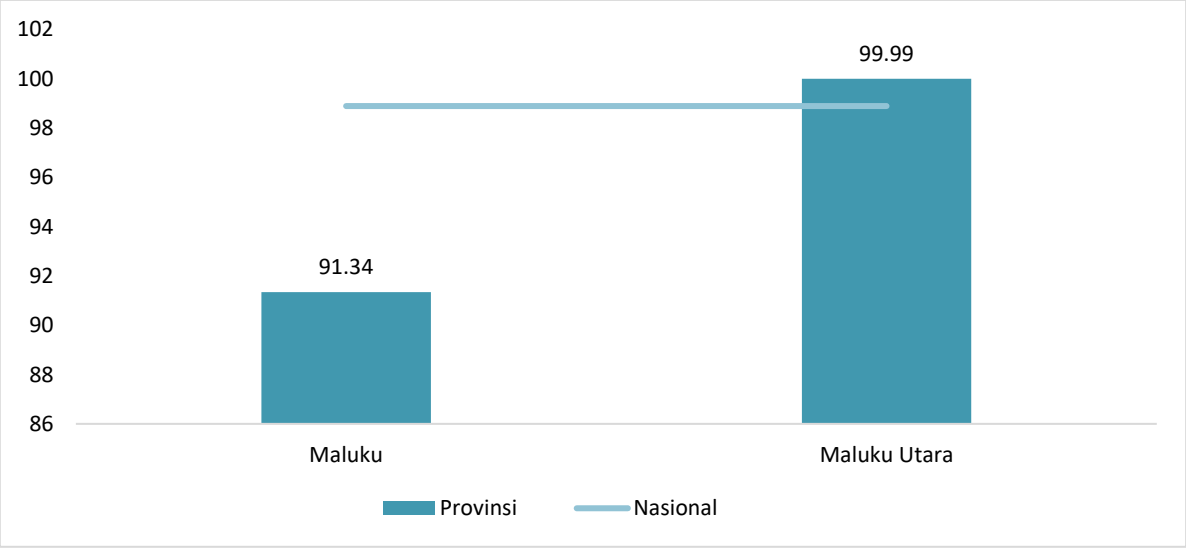

Sumber : BPS, 2020

PENGEMBANGAN WILAYAH

Masterplan KEK Morotai (Falila)

Masterplan Adendum KEK Morotai (Tanjung Dehegila)

KEK Morotai

Berlokasi di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini terletak di pulau paling utara Indonesia. Pulau Morotai memiliki potensi yang tinggi untuk pariwisata, industri perikanan, dan sebagai hub logistik. Selain menjadi KEK, Pulau Morotai juga ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP).

KEK Morotai dibagi menjadi 4 (empat) kegiatan yaitu Pengolahan Ekspor, Logistik, Industri, dan Pariwisata.

PT. Jababeka Morotai menjadi badan usaha yang mengusulkan pengembangan KEK Morotai.

Total nilai investasi KEK Morotai sebesar Rp. 41 triliun dengan nilai realisasi investasi sebesar Rpx. 936 miliar sampai dengan bulan Mei tahun 2020.

DAERAH TERTINGGAL DI WILAYAH MALUKU

NO	PROVINSI	KABUPATEN
1	Maluku	Maluku Tenggara Barat
2	Maluku	Kepulauan Aru
3	Maluku	Seram Bagian Barat
4	Maluku	Seram Bagian Timur
5	Maluku	Maluku Barat Daya
6	Maluku	Buru Selatan
7	Maluku Utara	Kepulauan Sula
8	Maluku Utara	Pulau Taliabu

06 Pengembangan Wilayah

6.1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wilayah Maluku

1. KEK Morotai

KEK Morotai berlokasi di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini terletak di pulau paling utara Indonesia. Pulau Morotai memiliki potensi yang tinggi untuk pariwisata, industri perikanan, dan sebagai hub logistik. Selain menjadi KEK, Pulau Morotai juga ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Dengan potensi pariwisata yang tinggi KEK Morotai dapat menjadi magnet baru bagi wisatawan domestik dan mancanegara. KEK morotai memiliki luas sebesar 1.101,76 Hektar. KEK Morotai telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan PP No. 50 Tahun 2014, dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 April 2019. PT Jababeka Morotai menjadi badan usaha yang mengusulkan pengembangan KEK Morotai. Kini, PT Jababeka Morotai tengah mengusulkan perluasan bisnis ke bidang pariwisata, yang berdampak pada perubahan luasan area KEK menuju Tanjung Dehegila. KEK Morotai dibagi menjadi 4 (empat) kegiatan yaitu Pengolahan Ekspor, Logistik, Industri, dan Pariwisata.

Gambar 73:
Masterplan KEK Morotai

Masterplan KEK Morotai (Falila)

Masterplan Adendum KEK Morotai (Tanjung Dehegila)

Dengan potensi perikanan dan pariwisata yang dimiliki, KEK Morotai ditargetkan mampu menarik investasi sebesar Rp. 37,24 triliun, dan menyerap 30.000 tenaga kerja. Jika ini tercapai, KEK Morotai diproyeksikan akan berkontribusi terhadap perekonomian nasional dengan peningkatan output sebesar Rp. 1,452 triliun pada tahun 2025. Total nilai investasi KEK Morotai sebesar Rp. 41 triliun dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 936 miliar sampai dengan bulan Mei tahun 2020. Luas lahan yang akan dikembangkan di kota baru adalah seluas 100 ha dan di lokasi pariwisata seluas 100 ha. Total investasi dari PT Royal Castle Investment untuk mengembangkan kedua kawasan adalah sebesar kurang lebih Rp. 1 M .

Tabel 61:

Perkembangan Investasi di KEK Morotai

NO	INVESTOR	TAHUN	NEGARA	REALISASI INVESTASI (Rp juta)		BIDANG USAHA	KETERANGAN
				KOMITMEN	REALISASI		
1	PT. Jababeka Morotai	2012 - 2020	INDONESIA	4.700.000	831.950	Properti / Industri / Pariwisata / Ekspor - Impor	sudah melakukan pembangunan dan sudah beroperasi
2	A-Yes Global Co. Ltd	2014	TAIWAN	2.100.000	-	Perikanan / Pertanian / Logistik / Pariwisata	MoU / Tertahan regulasi KKP mengenai dilarangnya kapal asing beroperasi
3	Ching Fu Shipbuiding Co. Ltd	2016	TAIWAN	970.000	-	Industri Perikanan / Pariwisata	MoU / Tertahan regulasi KKP mengenai dilarangnya kapal asing beroperasi
4	West Pasific	2016	TAIWAN	1.450.000	-	Perikanan Tangkap / Industri perikanan / Galangan Kapal	Agreement / Tertahan regulasi KKP mengenai dilarangnya kapal asing beroperasi
5	Hubei Zhong Qing International Travel Service - Wanda Group	2017	CHINA	1.500.000	-	Pariwisata	MoU / masalah internal Perusahaan
6	Mitsui & Co., Ltd	2017	JEPANG	-		Pembangkit listrik tenaga surya & mini hydro	MoU / terpending karena sedang mempelajari kebutuhan pasar
7	Zann Corporation	2017	JEPANG	-	-	Industri / Pariwisata / Pertanian / Industri Logistik	Agreement / Menunggu bandara internasional
8	Bank of Asia	2018	HONG KONG	15.000.000	-	Property & Pariwisata	Proses NDA / Menunggu perkembangan bandara
9	PT. Proven Force Indonesia	2018	INDONESIA	-	-	Green energy pilot project	MoU / masalah internal Perusahaan
10	PT. Morotai Paradis Resor	2018	INDONESIA	350.000	100.000	Pariwisata / Hotel / Resort / Villa	sudah melakukan pembangunan dan sudah beroperasi
11	PT. Royal Castle Investment	2019	TAIWAN	15.000.000	5.000	Pariwisata / Industri / Kastil / Apartement	sudah melakukan investasi atas lahan
TOTAL KOMITMEN INVESTASI				**41.070.000**			
TOTAL REALISASI INVESTASI					**936.950**		

Sumber : BUPP KEK Likupang, 2020

Hingga saat ini, perkembangan infrastruktur di KEK Morotai cukup terlihat. Pembangunan kawasan telah menghasilkan jalan sepanjang 1,6 km dan gerbang kawasan yang memadai, juga penyediaan air bersih dan jaringan listrik. BUPP KEK Morotai juga telah membangun pengolahan air limbah, fasilitas persampahan, dan fasilitas pemadam kebakaran. Di luar kawasan KEK Morotai juga telah tersedia Bandara Pitu Morotai dan Jalan Nasional Sofi-Wayabula. Sudah tersedia berbagai akomodasi untuk menunjang kegiatan pariwisata di KEK Morotai antara lain D'Aloha Resort dan Villa Marahai. Selain itu, saat juga sudah tersedia 41 unit *homestay* dan 6 unit ruko UMKM.

Gambar 74:
Infrastruktur yang sudah dibangun di KEK Morotai

Gambar 75:
Hotel / Resort yang sudah dibangun di KEK Morotai

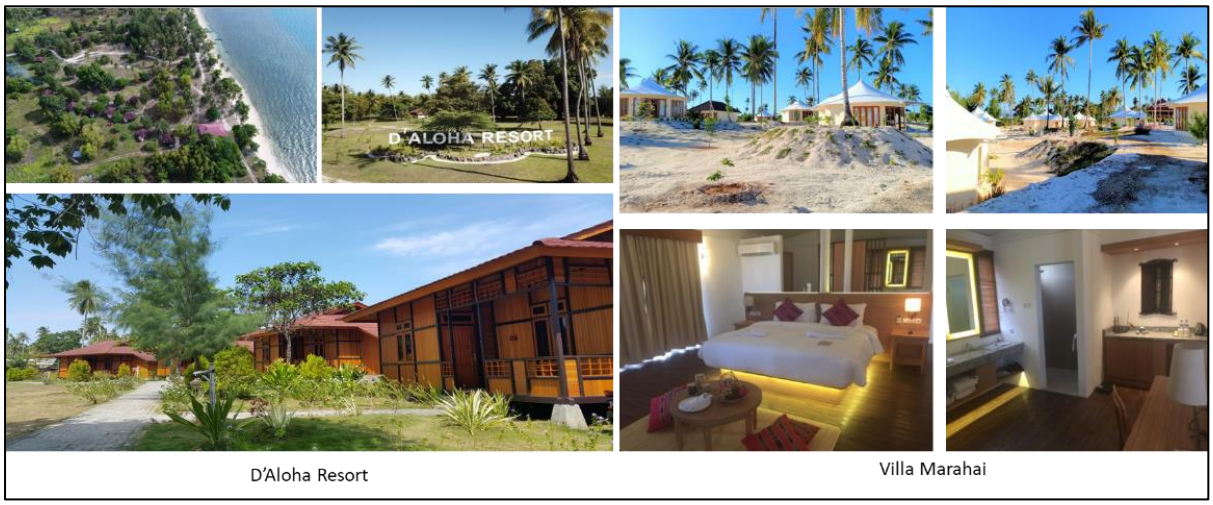

Sumber : BUPP KEK Likupang, 2020

Pulau Morotai memiliki berbagai macam daya tarik wisata seperti keunikan pulau-pulau, keanekaragaman biota laut, dan pesona sejarah yang kuat. Beberapa destinasi wisata di Pulau Morotai antara lain Pulau Dodola yang merupakan destinasi ikonik, Pulau Mitita yang merupakan tempat diving, Tanjung Gorango yang memiliki pemandangan landscape laut, Air Terjun Raja. Selain wisata alam, Pulau Morotai juga memiliki wisata sejarah seperti Monumen Teruo Nakamura, Patung Mac Arthur, dan Museum Perang Dunia II & Museum Trikora.

Gambar 76:
Destinasi Wisata di Pulau Morotai

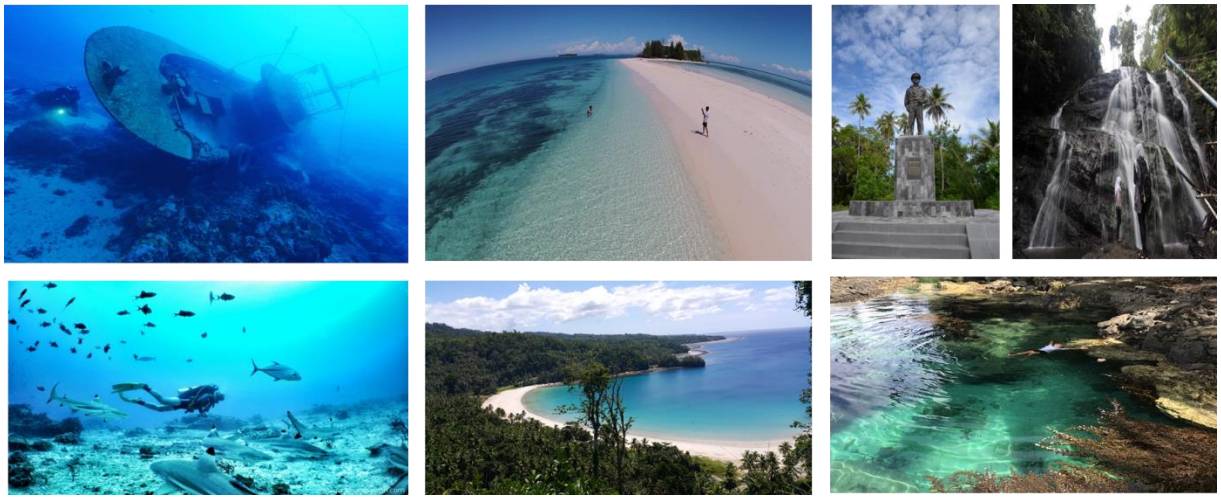

6.2. Pembangunan Daerah Tertinggal

Daerah Tertinggal, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024, telah ditetapkan sebanyak 62 daerah (kabupaten). Berdasarkan jumlah kabupaten tersebut, maka selama periode 2015-2019 telah berhasil mengentaskan sebanyak 60 kabupaten dari 122 kabupaten tertinggal. Ada enam kriteria terkait penetapan daerah tertinggal, yaitu: (a). perekonomian masyarakat; (b). sumber daya manusia; (c). sarana dan prasarana; (d). kemampuan keuangan daerah; (e). aksesibilitas; dan (f). karakteristik daerah.

Tabel 62:
Jumlah Daerah tertinggal di Wilayah Maluku

NO	PROVINSI	KABUPATEN
1	Maluku	Maluku Tenggara Barat
2	Maluku	Kepulauan Aru
3	Maluku	Seram Bagian Barat
4	Maluku	Seram Bagian Timur
5	Maluku	Maluku Barat Daya
6	Maluku	Buru Selatan
7	Maluku Utara	Kepulauan Sula
8	Maluku Utara	Pulau Taliabu

Provinsi Maluku memiliki daerah tertinggal terbanyak yaitu 6 kabupaten, sedangkan di Provinsi Maluku Utara terdapat 2 kabupaten. Ketertinggalan daerah-daerah di Wilayah Maluku secara umum disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan infrastruktur ekonomi dan sosial, belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, tingginya persentase penduduk miskin, serta perekonomian masyarakat masih tertumpu pada sektor primer (seperti pertanian, perikanan dan kehutanan).

Gambaran umum daerah tertinggal di wilayah Maluku disajikan pada **Tabel 63**, dengan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi daerah tertinggal, diantaranya adalah: IPM, PDRB Perkapita, tingkat pengangguran, dan kemiskinan, sesuai dengan data yang tersedia. Menurut data IPM tahun 2019, tingkat pembangunan sumberdaya manusia di 8 daerah tertinggal di Wilayah Maluku masih rendah dan masih berada di bawah IPM nasional (71,92). IPM tertinggi terdapat di kabupaten Seram Bagian Barat (65,49) dan terendah di Kabupaten Pulau Taliabu (60,62). Berdasarkan perhitungan reduksi *short fall* pertahun *(annual reduction in short fall) y*ang mengindikasikan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai IPM ideal (IPM =100), hanya Kabupaten Seran Bagian Timur (1,72) yang termasuk kategori cepat (>1,70), dan kabupaten lainnya termasuk kategori Mengengah (1,5-1,7).

Berdasarkan perkembangan PDRB Perkapita (ADHB) pada tahun 2018, seluruh kabupaten daerah tertinggal memiliki PDRB perkapita di bawah PDB perkapita nasional (Rp. 55,99 juta), dengan PDRB tertinggi di Kabupaten Kepulauan Aru (Rp. 34,24 juta), dan terendah berada di Kabupaten Seram Bagian Barat (Rp. 16,44 juta). Berdasarkan perkembangan pada periode 2015-2018, peningkatan PDRB tertinggi berada di Kabupaten Pulau Taliabu (Rp. 6,4 juta), dan terendah di Kabupaten Maluku Barat Daya (3,73 juta).

Dilihat dari indikator kemiskinan semester 1 tahun 2020, seluruh kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional (9,78%), sedangkan di kabupaten Kepulauan Sula (8,35%) dan Pulau Taliabu (7,30%) di Provinsi Maluku Utara sudah berada di bawah tingkat kemiskinan Nasional. Tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Maluku Barat Daya (29,15%), Maluku Tenggara Barat (27,11%). Berdasarkan perkembangan pada periode 2015-2020, tingkat kemiskinan disebagian besar kabupaten menunjukkan penurunan, kecuali di kabupaten Taliabu meningkat sebesar 0,26 persen. Penurunan tingkat kemiskinan tertinggi berada di kabupaten Maluku Barat Daya (2,43%), dan Kepulauan Aru (2,38%).

Berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019, sebagian besar kabupaten sudah berada di bawah TPT nasional (5,01%), kecuali kabupaten Seram Bagian Barat dengan TPT 5,40 persen. TPT terendah berada di kabupaten Buru Selatan (2,38%). Berdasarkan perkembangan pada periode 2015-2019, sebagian besar kabupaten menunjukkan penurunan TPT, kecuali di kabupaten Maluku Barat Daya menunjukkan peningkatan sebesar 0,02 persen, dan Kabupaten Kepulauan Sula meningkat sebesar 1,18 persen. Penurunan TPT yang signifikan terjadi di Kabupaten Buru Selatan yang berkurang sebesar 6,76 persen, dan kabupaten Pulau Taliabu berkurang sebesar 4,93 persen

Tabel 63:

Karakteristik Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku Tahun 2017/2019

Kabupaten	IPM			Persentase Penduduk Miskin (Persen)			PDRB Perkapita			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
	2015	2019	Reduksi Shortfall	2015	2020	Δ ('15-'20)	2015	2018**	Δ ('15-18)	2015	2019	Δ ('15-19)
MALUKU												
Maluku Tenggara Barat	60,26	62,86	1,60	29,17	27,11	-2,06	17.202	22.119	4.917	5,25	4,85	-0,40
Kepulauan Aru	60,50	63,64	1,68	28,64	26,26	-2,38	28.690	34.239	5.549	5,19	4,05	-1,14
Seram Bagian Barat	63,02	65,49	1,61	26,35	25,11	-1,24	13.161	16.438	3.277	8,21	5,40	-2,81
Seram Bagian Timur	60,27	63,74	1,72	25,37	23,04	-2,33	20.377	25.183	4.806	6,18	3,36	-2,82

Maluku Barat Daya	58,64	61,55	1,63	31,58	29,15	-2,43	16.438	21.001	4.563	3,73	3,75	0,02
Buru Selatan	61,48	64,42	1,66	17,58	15,75	-1,83	17.098	20.952	3.854	9,14	2,38	-6,76
MALUKU UTARA												
Kepulauan Sula	60,50	63,64	1,68	8,85	8,35	-0,50	18.813	22.682	3.869	3,75	4,93	1,18
Pulau Taliabu	58,26	60,62	1,54	7,04	7,30	0,26	19.122	25.553	6.431	9,72	4,79	-4,93
INDONESIA	**69,55**	**71,92**	**1,67**	**11,22**	**9,78**	**-1,44**	**45.120**	**55.987**	**10.867**	**5,81**	**5,01**	**-0,80**

Sumber: Publikasi BPS, 2020

Keterangan: Kategori reduksi short fall pertahun : (a) Sangat lambat jika : < 1,3; (b) Lambat jika : 1,3 – 1,5; (c). Menengah : 1,5 – 1,7; dan (d) Cepat jika : > 1,7.

Dalam rangka percepatan pembangunan di daerah tertinggal di wilayah Maluku, alokasi dana desa yang telah dikucurkan kepada kabupaten daerah tertinggal di wilayah Maluku menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode 2015-2019. Pada tahun 2019 alokasi dana desa telah mencapai Rp. 813,38 Milyar yang terbagi kepada 832 desa, dengan rata-rata perdesa sebesar 977,62 juta per desa.

Gambar 77:
Alokasi Dana Desa untuk Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku Periode 2015-2019

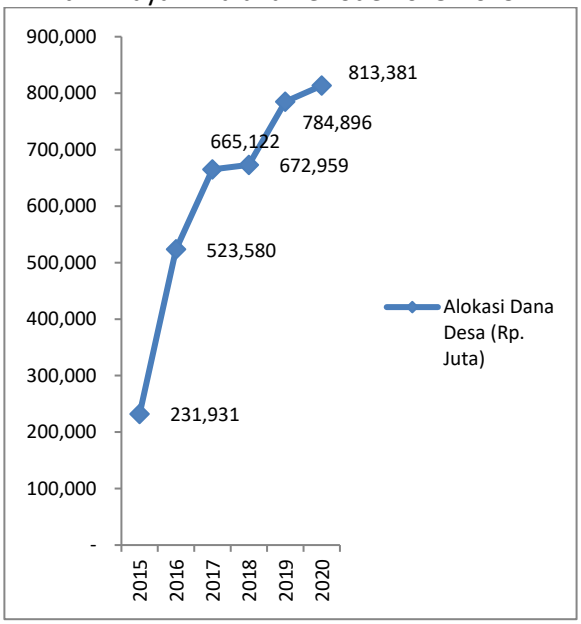

Gambar 78:
Alokasi Dana Desa untuk Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku Tahun 2019.

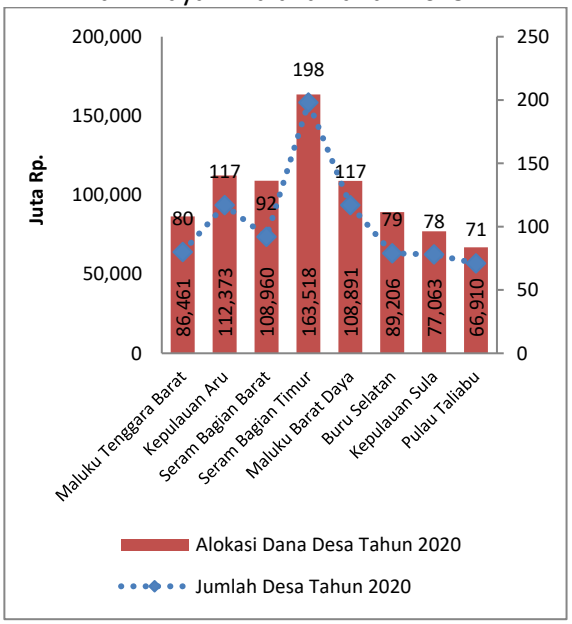

Sumber Data: Pusdatin Kemendes PPDT, 2020.

Rincian pagu dana desa menurut kabupaten-kabupaten daerah tertinggal di wilayah Maluku dapat dilihat pada Tabel 64. Kabupaten Seram Bagian Timur dengan jumlah desa sebanyak 198 desa merupakan kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan alokasi tertinggi (Rp. 163,52 miliar rupiah) atau rata-rata perdesa sebesar Rp.825,85 Juta.

Tabel 64:

Perkembangan Alokasi Dana Desa untuk Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku
Periode 2015-2020

Provinsi	Kabupaten	Jum. Desa 2020	Pagu Dana Desa (Rp. juta)					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maluku	Maluku Tenggara Barat	80	23.320	52.352	66.312	71.097	82.697	86.461
Maluku	Kepulauan Aru	117	32.643	73.194	93.058	90.552	108.538	112.373
Maluku	Seram Bagian Barat	92	26.557	59.573	76.288	86.318	103.750	108.960
Maluku	Seram Bagian Timur	198	51.628	119.100	151.736	140.066	159.642	163.518
Maluku	Maluku Barat Daya	117	32.890	73.780	93.305	93.674	105.365	108.891
Maluku	Buru Selatan	79	22.544	50.558	64.073	74.041	87.194	89.206
Maluku Utara	Kepulauan Sula	78	22.224	49.859	63.209	62.700	73.756	77.063
Maluku Utara	Pulau Taliabu	71	20.126	45.163	57.141	54.511	63.954	66.910
TOTAL		**832**	**231.931**	**523.580**	**665.122**	**672.959**	**784.896**	**813.381**

Sumber Data: Pusdatin Kemendes PPDT, 2019.

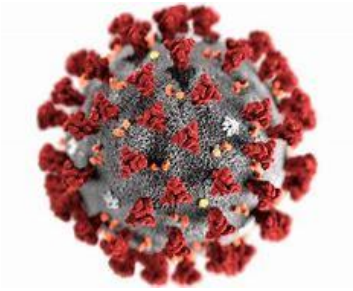

Perkembangan Penyebaran COVID-19 dan Dampak Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat

- Hingga akhir November 2020, penduduk wilayah Maluku yang telah terkonfirmasi terjangkit COVID-19 mencapai 6.602 orang atau 1,33 persen dari total penduduk Indonesia yang terkonfirmasi, dan yang meninggal sebanyak 132 orang (0,84%).
- Penyebaran antarprovinsi, tertinggi di Provinsi Maluku sebanyak 4.255 orang (64,45%) dan yang meninggal sebanyak 57 orang (43,18%). Sedangkan di Provinsi Maluku Utara terkonfirmasi sebanyak 2.347 orang (35,55%) dan meninggal sebanyak 75 orang (56,82%).
- Dampak tersebut menunjukkan peningkatan jumlah pengangguran terbuka di wilayah Maluku sebanyak 17,35 ribu orang, meliputi sebanyak 10,79 ribu orang di Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara (6,56 ribu orang).
- Pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku pada Triwulan II 2020 terkontraksi di angka -0,75 persen (yoy) menurun cukup tajam dibandingan Triwulan II 2019 yang tumbuh sebesar 6,73 persen (yoy). Menurut provinsi, kinerja ekonomi provinsi Maluku Utara dan Maluku pada Triwulan II 2020 terkontraksi masing-masing pada angka -1,26 persen dan -0,16 persen dibandingan kinerja ekonomi pada triwulan II 2019.
- kinerja ekonomi ini dipengaruhi oleh menurunnya pertumbihan dari sector sector penyediaan akomodasi dan makan minum, sector perdagangan besar dan eceran, sector pertambangan dan penggalian
- Realisasi PMDN Triwulan II 2020 di Provinsi Maluku dan Maluku Utara cenderung mengalami peningkatan dibandingakan nilai realisasi PMDN triwulan I 2020.
- Sebaliknya untuk nilai realisasi PMA, terjadi penurunan baik di Maluku maupun di Maluku Utara, penurunan cukup tajam di Maluku Utara yaitu pada triwulan I sebesar 768 juta US$ menurun menjadi 226 juta US$ di triwulan II 2020.

07 Penyebaran COVID-19 dan Dampak Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat.

7.1. Penyebaran COVID-19

Pandemi Coronavirus jenis baru, telah memberikan dampak luas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Coronavirus tersebut, ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Gejala umum berupa demam ≥ 38^0C, batuk kering, dan sesak napas. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi COVID19.

Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularan, serta jenis vaksin yang tepat. Berdasarkan perkembangan COVID-19 di Indonesia hingga November 2019, akan terus bertambah hingga proses vaksinasi yang tepat dapat diaplikasikan kepada penduduk Indonesia.

Berdasarkan data yang tersedia hingga awal bulan November 2019, dapat digambarkan penyebaran wabah di masyarakat yang berada di wilayah Maluku berdasarkan jumlah terkonfirmasi (terinfeksi), sembuh dan meninggal Akibat COVID-19.

Gambar 79:

Jumlah Terkonfirmasi, Sembuh dan Meninggal Akibat COVID-19 Antarprovinsi di Wilayah Maluku

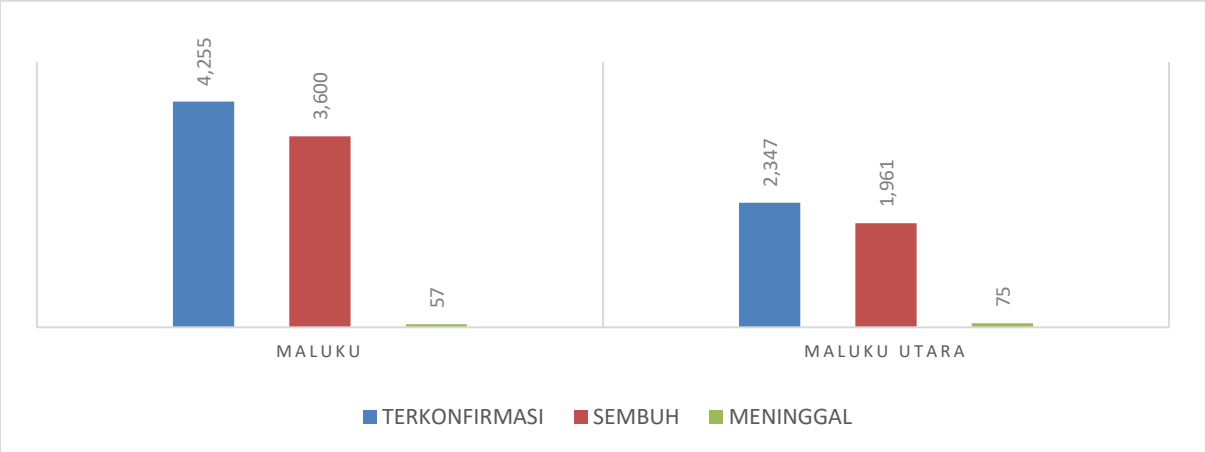

Sumber: www.covid19.go.id last update: 24-11-2020

Penduduk wilayah Maluku yang telah terkonfirmasi terjangkit COVID-19 mencapai 6.602 orang atau 1,33 persen dari total penduduk Indonesia yang terkonfirmasi, dan yang meninggal sebanyak 132 orang (0,84%). Penyebaran antarprovinsi, tertinggi di Provinsi Maluku sebanyak 4.255 orang (64,45%) dan yang meninggal sebanyak 57 orang (43,18%). Sedangkan di Provinsi Maluku Utara terkonfirmasi sebanyak 2.347 orang (35,55%) dan meninggal sebanyak 75 orang (56,82%).

Tabel 65:

Jumlah Terkonfirmasi, Sembuh dan Meninggal Akibat COVID-19 Antarprovinsi di Wilayah Maluku

Provinsi	Terkonfirmasi		Sembuh		Meninggal	
	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
Maluku	4.255	64,45	3.600	64,74	57	43,18
Maluku Utara	2.347	35,55	1.961	35,26	75	56,82
MALUKU	**6.602**	**100,00**	**5.561**	**100,00**	**132**	**100,00**

Sumber: www.covid19.go.id last update: 24-11-2020

Berdasarkan data yang tersedia hingga awal November 2019, dampak yang diakibatkan dari pandemi COVID-19 terhadap masyarakat wilayah Maluku dapat diinformasikan sebagai berikut:

7.2. Dampak Covid-19 Terhadap Pengangguran Terbuka.

Berdasarkan data terakhir pengangguran terbuka pada periode Februari - Agustus 2020, dapat diindikasikan adanya dampak Pandemi Covid-19 terhadap peningkatan jumlah dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di wilayah Maluku. Dampak tersebut menunjukkan peningkatan jumlah pengangguran terbuka di wilayah Maluku sebanyak 17,35 ribu orang, dengan peningkatan jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Maluku sebesar 10,79 ribu orang, dan Provinsi Maluku Utara (6,56 ribu orang). Berdasarkan perkembangan TPT pada bulan Februari-Agustus 2020, Provinsi Maluku (7,57%) dan Maluku Utara (5,15%) menunjukkan peningkatan jumlah dan tingkat pengangguran terbuka, dengan peningkatan TPT di Provinsi Maluku sebesar 0,55 persen, dan Provinsi Maluku Utara sebesar 0,89 persen.

Tabel 66:

Perkembangan Pengangguran Terbuka Periode Februari dan Agustus 2020

Provinsi	Jumlah Pengangguran Terbuka (ribu orang)			Tingkat Pengangguran terbuka (%)		
	Feb 2020	Ags 2020	Δ Feb- Ags 2020	Feb 2020	Ags 2020	Δ Feb- Ags 2020
Maluku	52,71	63,50	10,79	7,02	7,57	0,55
Maluku Utara	23,44	30,00	6,56	4,26	5,15	0,89
MALUKU	**76,15**	**93,50**	**17,35**	**5,85**		

Sumber: Publikasi BPS, Data Sosial Ekonomi November 2020

7.3. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Daerah

Pandemi Covid-19 ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan kinerja perekonomian hampir disebagian besar wilayah di Indonesia. Pada Triwulan II 2020 dengan semakin meluasnya dampak pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan pada kinerja perekonomian daerah yang cenderung menurun. Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat dan barang, yang kemudian menurunkan permintaan domestik serta aktivitas produksi, investasi, dan menurunnya tingkat daya beli masyarakat di berbagai daerah.

Pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku pada Triwulan II 2020 terkontraksi di angka -0,75 persen (yoy) menurun cukup tajam dibandingan Triwulan II 2019 yang tumbuh sebesar 6,73 persen (yoy), (**Gambar 80**). Menurunnya kinerja ekonomi ini dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan dari sector- sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor pertambangan dan penggalian masing-masing pertumbuhan sektor terkontrakasi pada angka pertumbuhan negatif di Triwulan II 2020 (**Gambar 82**). Pada Triwulan III 2020, kondisi pandemic Covid-19 masih mewarnai kinerja ekonomi daerah, dengan adanya kebijakan pelonggaran PSBB mendorong adanya perbaikan terhadap kinerja ekonomi wilayah, tercatat perekonomian wilayah Maluku tumbuh sebesar 1,77 persen (yoy) dan 4,1 persen (q-t-q). Membaiknya kinerja ekonomi pada Triwulan III 2020 didukung oleh meningkatnya kinerja sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor perdagangan besar dan eceran, pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan (**Gambar 82**).

Gambar 80:

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III Wilayah Maluku Tahun 2019 dan 2020

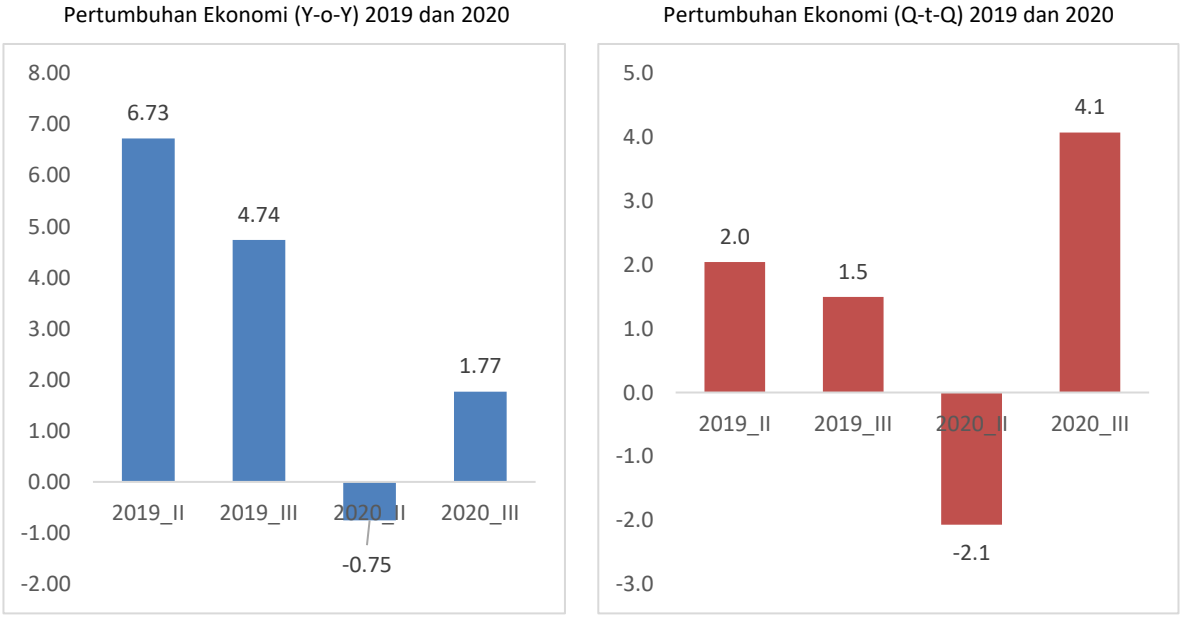

Sumber: Publikasi BPS, Tahun 2020

Gambar 82:

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III Menurut Lapangan Usaha di Wilayah Maluku

Pertumbuhan PDRB Trwulan II 2020 terhadap Triwulan II 2019 (Y-o_Y)

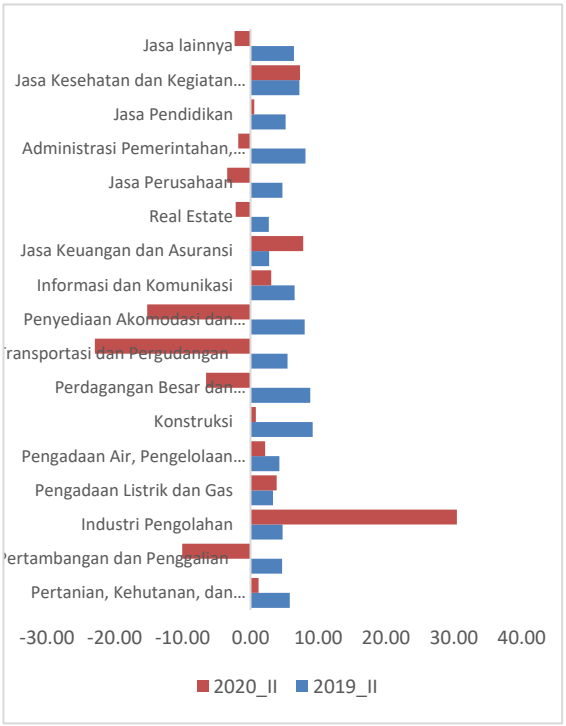

Pertumbuhan PDRB Trwulan III 2020 terhadap Triwulan III 2019 (Y-o-Y)

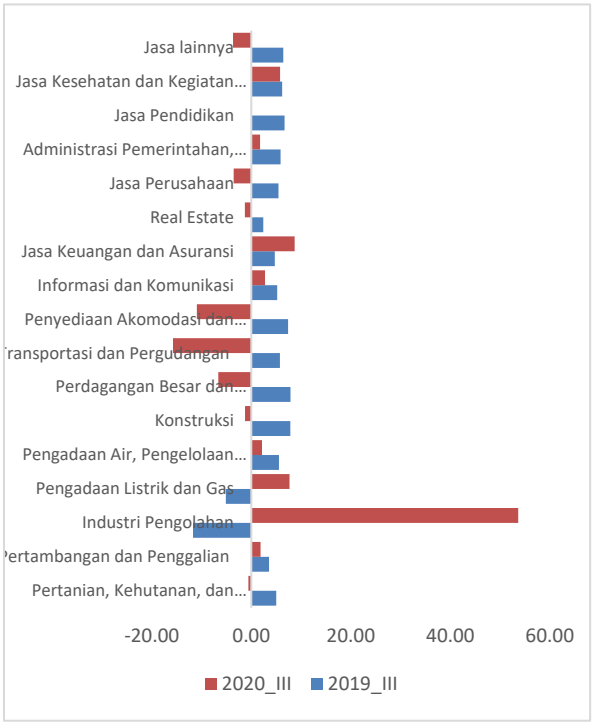

Sumber: Publikasi BPS, Tahun 2020

Kinerja ekonomi Provinsi Maluku Utara dan Maluku pada Triwulan II 2020 terkontraksi masing-masing pada angka -1,26 persen dan -0,16 persen dibandingkan kinerja ekonomi pada Triwulan II 2019. Penyebaran Covid-19 masih mewarnai terhadap kinerja ekonomi Provinsi Maluku pada Triwulan III 2020 yang semakin terkontaksi lebih dalam yaitu tumbuh di angka -2,38 persen, sebaliknya perekonomian Maluku Utara menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu tumbuh sebesar 6,66 persen lebih tinggi dari pertumbuhan Triwulan III 2029 (**Gambar 83**). Meningkatnya kinerja ekonomi Triwulan III 2020 di Provinsi Maluku Utara didukung oleh meningkatnya kinerja dari sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 106,98 persen, sektor informasi dan komunikasi, dan sektor jasa keuangan. Sementara untuk sektor transportasi dan pergudangan dan sektor perdagangan masih terkontraksi masing-masing pada angka -12,61 persen dan -6,03 persen. Pertumbuhan Provinsi Maluku Triwulan III 2020 terkontraksi lebih dalam, dan sebagian besar seluruh sektor menunjukkan kinerja yang menurun kecuali sektor pertambangan dan penggalian, sektor informasi dan komunikasi, dan sektor pengadaan listrik dan gas (**Tabel 67)**.

Gambar 83:

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III Menurut Provinsi di Wilayah Maluku

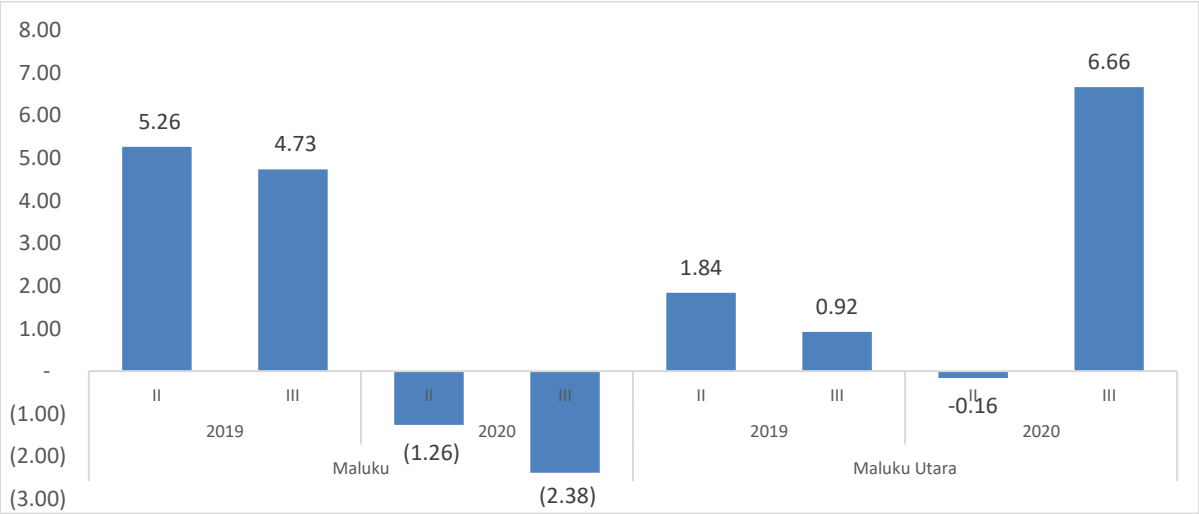

Sumber: Publikasi BPS, Tahun 2020

Tabel 67:

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III menurut Lapangan Usaha dan Provinsi di Wilayah Maluku

Lapangan Usaha	Maluku				Maluku Utara			
	2019		2020		2019		2020	
	II	III	II	III	II	III	II	III
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.00	4.42	1.95	(1.19)	0.02	0.05	0.22	0.22
Pertambangan dan Penggalian	(4.28)	(1.57)	1.41	1.86	4.12	6.55	-13.42	1.86
Industri Pengolahan	2.97	4.02	(4.05)	(3.54)	-10.67	-5.07	60.49	106.98
Pengadaan Listrik dan Gas	(7.47)	(0.04)	2.25	10.03	0.77	-1.40	5.66	5.29
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.60	4.34	0.97	1.95	0.64	1.55	9.33	3.30
Konstruksi	7.32	6.27	0.87	(2.90)	3.20	3.00	0.67	0.75
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.16	6.12	(4.61)	(7.26)	2.53	0.29	-8.37	-6.03
Transportasi dan Pergudangan	4.80	5.04	(17.96)	(18.68)	3.20	1.78	-28.21	-12.61
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.93	3.11	(11.88)	(13.19)	1.81	1.96	-29.40	-1.47
Informasi dan Komunikasi	3.52	2.44	0.24	1.07	1.67	1.10	5.99	4.51
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.74	4.43	8.83	10.15	2.07	5.11	6.19	6.61
Real Estate	1.26	0.87	(0.31)	(0.52)	1.89	1.00	-7.91	-3.57
Jasa Perusahaan	5.26	5.02	(1.51)	(3.57)	2.09	1.04	-10.06	-3.46
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.85	4.07	(1.24)	1.32	6.79	-0.53	-2.71	2.43
Jasa Pendidikan	6.47	8.44	1.74	(1.81)	5.10	3.65	-1.91	3.46
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.11	4.98	5.13	3.09	2.42	-0.21	9.81	8.99
Jasa lainnya	5.37	4.89	(1.66)	(5.13)	3.25	2.79	-3.89	-0.36
TOTAL	**5.26**	**4.73**	**(1.26)**	**(2.38)**	**1.84**	**0.92**	**-0.16**	**6.66**

Sumber: Publikasi BPS, Tahun 2020

Perkembangan realisasi investasi di masa pandemic Covid-19 di wilayah Maluku, tercatat untuk nilai realisasi PMDN Triwulan II 2020 di Provinsi Maluku dan Maluku Utara cenderung mengalami peningkatan dibandingkan nilai realisasi PMDN Triwulan I 2020, dengan peningkatan nilai investasi terbesar di Provinsi Maluku Utara lebih tinggi dibandingkan Provinsi Maluku. Sebaliknya untuk nilai realisasi PMA, terjadi penurunan baik di Provinsi Maluku maupun di Maluku Utara, penurunan cukup tajam di Maluku Utara yaitu pada Triwulan I sebesar 768 juta US$ menurun menjadi 226 juta US$ di Triwulan II 2020 (**Gambar 84**).

Gambar 84:
Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Triwulan I dan II menurut Provinsi di Wilayah Maluku

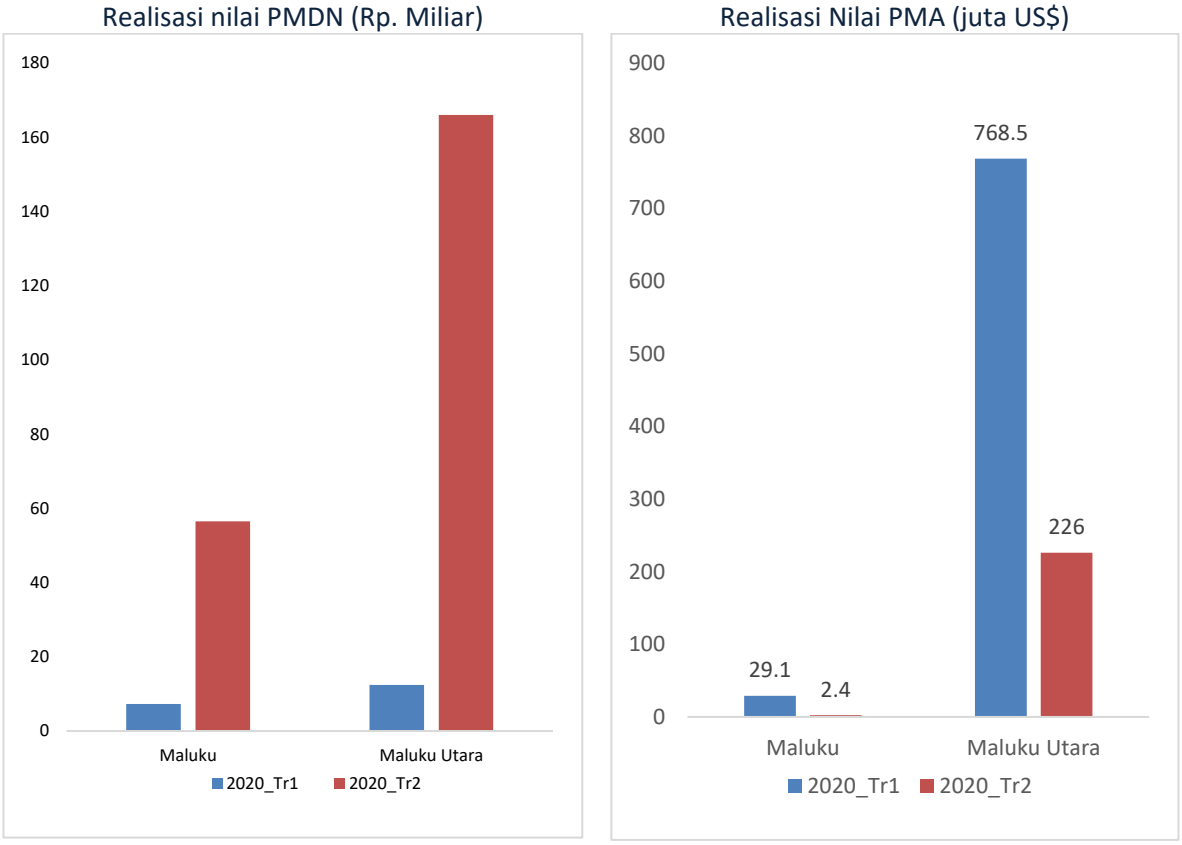

Sumber: BKPM, Tahun 2020